



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



RPJPD

KOTA SINGKAWANG

2025-2045

SINGKAWANG

Cemerlang





WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Singkawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (3) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tahapan RPJPD sebagai berikut:

- a. Tahapan Pertama Tahun 2025-2029;
- b. Tahapan Kedua Tahun 2030-2034;
- c. Tahapan Ketiga Tahun 2035-2039; dan
- d. Tahapan Keempat Tahun 2040-2045.

Pasal 4

RPJPD bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Wali Kota.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJPN.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 31 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR: (7/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
PA. KEPALA BAGIAN HUKUM,



G.K. SARI TANGKAU, S.H, MH
NIP 19851027 201001 2 016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-4
1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dan RPJPN	I-4
1.3.2. Hubungan Antara RPJPD, RPJMD, RKPD Renstra PD dan Renja PD	I-5
1.3.3. Hubungan Antara RPJPD Kota Singkawang dan RTRW Kota Singkawang	I-6
1.3.4. Hubungan Antara RPJPD Kota Singkawang dan KLHS RPJPD Kota Singkawang	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematisasi Dokumen RPJPD	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1. Geologi	II-3
2.1.1.2. Topografi	II-4
2.1.1.3. Penggunaan Lahan	II-5
2.1.2. Aspek Demografi	II-5
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-6
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-6
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	II-12
2.3. Aspek Daya Saing	II-21
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	II-21
2.3.2. Daya Saing SDM	II-31
2.3.3. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah	II-41
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	II-43
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-49
2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar	II-49
2.4.1.1. Pendidikan	II-49
2.4.1.2. Kesehatan	II-56
2.4.1.3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	II-62
2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-65
2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	II-68
2.4.1.6. Sosial	II-69

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II-71
2.4.2.1. Tenaga Kerja	II-71
2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-71
2.4.2.3. Pangan.....	II-73
2.4.2.4. Pertahanan	II-74
2.4.2.5. Lingkungan Hidup	II-75
2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-76
2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	II-77
2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-78
2.4.2.9. Perhubungan	II-79
2.4.2.10. Komunikasi dan Informasi	II-81
2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-82
2.4.2.12. Penanaman Modal.....	II-83
2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga	II-83
2.4.2.14. Statistik	II-84
2.4.2.15. Kebudayaan	II-85
2.4.2.16. Perpustakaan	II-85
2.4.2.17. Kearsipan.....	II-86
2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-87
2.4.3.1. Kelautan dan Perikanan	II-87
2.4.3.2. Pariwisata	II-88
2.4.3.3. Pertanian	II-89
2.4.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-90
2.4.3.5. Perdagangan	II-90
2.4.3.6. Perindustrian	II-91
2.4.4. Penunjang Urusan	II-92
2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan	II-92
2.4.4.2. Keuangan.....	II-92
2.4.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-93
2.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan	II-95
2.4.4.5. Pengawasan	II-95
2.4.4.6. Sekretariat Dewan.....	II-96
2.4.5. Indeks Birokrasi	II-97
2.4.6. Indeks Pelayanan Publik	II-102
2.4.7. Indeks Inovasi Daerah	II-103
2.4.8. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik...	II-103
2.4.9. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	II-104
2.4.10. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik	II-104
2.4.11. Survey Penilaian Integritas	II-105
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-105
2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan.....	II-126
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-136

	2.6.1. Analisis Proyeksi Penduduk 2025-2045.....	II-136
	2.6.1.1. Proyeksi Jumlah penduduk Total Penduduk	II-136
	2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-138
	2.6.2. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana 2025-2045	II-140
	2.6.2.1. Persampahan	II-140
	2.6.2.2. Rumah / Tempat Tinggal.....	II-141
	2.6.2.3. Air.....	II-142
	2.6.2.5. Infrastruktur Kesehatan.....	II-143
	2.6.2.6. Pasar.....	II-144
	2.6.2.7. Infrastruktur Pendidikan.....	II-145
	2.6.2.8. Infrastruktur Rumah Ibadah	II-146
	2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-147
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS	III-1
	3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
	3.1.1. Aspek Ekonomi	III-1
	3.1.2. Aspek Sosial	III-4
	3.1.3. Aspek Infrastruktur	III-5
	3.1.4. Aspek Lingkungan Hidup	III-7
	3.1.5. Aspek Tata Kelola	III-7
	3.2. Isu Strategis Daerah	III-8
	3.2.1. Isu Sustainable Development Goals (SDG's)	III-8
	3.2.2. Isu Strategis RPJPN Tahun 2025-2045	III-9
	3.2.3. Isu-Isu Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	III-10
	3.2.4. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045	III-11
	3.2.5. Isu Strategis Kota Singkawang	III-12
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
	4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045	IV-1
	4.1.1. Penyelarasan antara visi dan sasaran RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPD Kota Singkawang	IV-4
	4.1.2. Sasaran Visi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045	IV-4
	4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045.....	IV-5
	4.2.1. Telaah Misi RPJPN	IV-5
	4.2.2. Misi RPJPD Kalimantan Barat.....	IV-6
	4.2.3. Misi RPJPD kota Singkawang Tahun 2025-2045.....	IV-8
	4.2.4. Tabel Penyelarasan Misi RPJPN,RPJPD Provinsi dan RPJPD Kab/Kota.....	IV-10
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
	5.1. Arah Kebijakan.....	V-1
	5.2. Sasaran Pokok.....	V-7
	5.2.1. Arah pembangunan Daerah.....	V-8

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi	V-14
5.3. Arah Kebijakan dalam Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Barat	V-45
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1. Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
6.2. Konsistensi Perencanaan Pendanaan	VI-1
6.2.1. Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	VI-2
6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam perencanaan Pembangunan.....	VI-4
6.2.3. Kerangka Pengendalian → Termasuk Manajemen Risiko.....	VI-5
6.3. Pembiayaan Pembangunan	VI-9
6.4. Kesimpulan.....	VI-10

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2.	Penggunaan Lahan Kota Singkawang	II-5
Tabel 2.3.	Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, Rasio Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2024	II-6
Tabel 2.4.	Banyaknya RT dan RW Menurut Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2024	II-6
Tabel 2.5.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-24
Tabel 2.6.	Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-41
Tabel 2.7.	Kota dengan Skor Tertinggi Indeks Kota Toleran Tahun 2023	II-45
Tabel 2.8.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-49
Tabel 2.9.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.10.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023	II-62
Tabel 2.11.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023	II-66
Tabel 2.12.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-68
Tabel 2.13.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-70
Tabel 2.14.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota Singkawang Tahun 2017-2019	II-71
Tabel 2.15.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-72
Tabel 2.16.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-74
Tabel 2.17.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-74
Tabel 2.18.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-75
Tabel 2.19.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-76
Tabel 2.20.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-78

Tabel 2.21.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-78
Tabel 2.22.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-79
Tabel 2.23.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2.24.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Singkawang Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.25.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2.26.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-84
Tabel 2.27.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-84
Tabel 2.28.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-85
Tabel 2.29.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.30.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.31.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	II-87
Tabel 2.32.	Produksi Perikanan laut, Perairan Umum dan Budaya Kota Singkawang (ton) Tahun 2019-2023	II-87
Tabel 2.33.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.34.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-89
Tabel 2.35.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2.36.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-91
Tabel 2.37.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-91
Tabel 2.38.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-92
Tabel 2.39.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2.40.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-94

Tabel 2.41.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.42.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.43.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sekretariat Dewan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.44.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.45.	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.46.	Indeks Pelayanan Publik Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.47.	Indeks Inovasi Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.48.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.49.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-104
Tabel 2.50.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-104
Tabel 2.51.	Survei Penilaian Integritas Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-105
Tabel 2.52.	Tabel Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025	II-105
Tabel 2.53.	Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2008-2023	II-126
Tabel 2.54.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-138
Tabel 2.55.	Proyek Fasilitas Persampahan Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-141
Tabel 2.56.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-143
Tabel 2.57.	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Tempat Ibadah Kota Singkawang 2023	II-146
Tabel 2.58.	Program Rencana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042	II-148
Tabel 4.1.	Perumusan Visi	IV-3
Tabel 4.2.	Penyelarasan Visi	IV-4
Tabel 4.3	Sasaran Visi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 4.4	Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kab/Kota	IV-10

Tabel 5.1.	Arah Kebijakan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045	V-4
Tabel 5.2.	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045	V-15
Tabel 5.3.	Sasaran Pokok	V-29
Tabel 5.4	Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPD 2025-2045	V-38

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Singkawang	II-2
Gambar 6.1 Keterkaitan RPJPD	VI-4
Gambar 6.2 Kerangka Kerja Logis RPJP Nasional	VI-5
Gambar 6.3 Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045	VI-7

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1.	Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Km ²)	II-2
Grafik 2.2.	Luas (Ha) Menurut Jenis Tanah Tahun 2024	II-4
Grafik 2.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang, Tahun 2019-2023 (%)	II-7
Grafik 2.4.	Indeks Gini Kota Singkawang, Tahun 2019-2023	II-8
Grafik 2.5.	Persentase Penduduk Miskin Kota Singkawang, tahun 2019-2023	II-9
Grafik 2.6.	Jumlah Penduduk Miskin Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-10
Grafik 2.7.	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-10
Grafik 2.8.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	II-11
Grafik 2.9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-12
Grafik 2.10.	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2023	II-13
Grafik 2.11.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022	II-15
Grafik 2.12.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2022	II-16
Grafik 2.13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-17
Grafik 2.14.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-18
Grafik 2.15.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-19
Grafik 2.16.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-20
Grafik 2.17.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2022	II-21
Grafik 2.18.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-27

Grafik 2.19.	PDRB Perkapita Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	II-29
Grafik 2.20.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Singkawang Tahun 2011-2021	II-31
Grafik 2.21.	Nilai Pilar Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Singkawang Tahun 2021	II-31
Grafik 2.22.	Indeks Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2010-2023	II-32
Grafik 2.23.	Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-33
Grafik 2.24.	Angka Literasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023	II-34
Grafik 2.25.	Angka Numerasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023	II-35
Grafik 2.26.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kalimantan Barat Tahun 2022-2023	II-36
Grafik 2.27.	Indeks Literasi Digital Nasional dan Kalimantan Barat Tahun 2021-2023	II-36
Grafik 2.28.	Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital Kota Singkawang Tahun 2023	II-38
Grafik 2.29.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang (%) Tahun 2019-2023	II-39
Grafik 2.30.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-39
Grafik 2.31.	Rasio Ketergantungan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-40
Grafik 2.32.	Rasio Ketergantungan se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-41
Grafik 2.33.	Indeks Demokrasi Provinsi Terhadap Nasional Tahun 2021-2022	II-44
Grafik 2.34.	Indeks Toleransi Kota Singkawang Tahun 2015-2023	II-45
Grafik 2.35.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional Tahun 2019-2023	II-46
Grafik 2.36.	10 Provinsi Terbaik dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021	II-47
Grafik 2.37.	Indeks Daya Saing Daerah Kota Singkawang Tahun 2022	II-48
Grafik 2.38.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang tahun 2019-2023	II-127
Grafik 2.39.	Angka Kemiskinan Kota Singkawang Tahun 2012-2023	II-128
Grafik 2.40.	Tingkat Pengguran Terbuka Kota Singkawang Tahun 2023	II-129
Grafik 2.41.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Periode 2019-2023	II-130

Grafik 2.42.	PDRB Per Kapita ADHB Kota Singkawang Periode 2012-2023(juta rupiah)	II-131
Grafik 2.43.	Gini Rasio Kota Singkawang Periode 2019-2023	II-132
Grafik 2.44.	Pengeluaran Perkapita Kota Singkawang Periode 2019-2023 (juta rupiah)	II-134
Grafik 2.45.	Laju Inflasi Kota Singkawang Periode 2019-2023	II-135
Grafik 2.46.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-138
Grafik 2.47.	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-139
Grafik 2.48.	Proyeksi Kebutuhan Produksi sampah Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-140
Grafik 2.49.	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-142
Grafik 2.50.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-143
Grafik 2.51.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-144
Grafik 2.52.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pasar Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-145
Grafik 2.53.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-145
Grafik 2.54.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Ibadah Kota Singkawang Tahun 2025-2045	II-146
Grafik 3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023	III-1
Grafik 3.2.	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2023	III-2
Grafik 3.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012-2023	III-2
Grafik 3.4.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2023	III-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah dalam hal ini wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Setiap Pemerintah Daerah termasuk Kota Singkawang diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tersebut. Dokumen perencanaan ini menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dokumen RPJPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunannya, RPJPD harus mengacu RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat. Begitu pula RPJMD, disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJPD Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), sebelum RPJPN ditetapkan, penyusunan RPJPD tetap mengikuti ketentuan dengan mengesampingkan RPJPN sebagai pedoman,

kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam periode dua puluh tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045. Proses penyusunan dokumen ini terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan rancangan RPJPD yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing perangkat daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJPD yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dan menyelaraskan rancangan RPJPD yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang biasa disingkat musrenbang. Dan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa Musyawarah RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan. Kota Singkawang menjadi daerah yang periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerahnya akan berakhir pada tahun 2025. Maka Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2023 sudah memulai menyusun teknokratik RPJPD Tahun 2025-2045, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan dokumen rancangan perencanaan Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80).

1.3 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.3.1 Hubungan Antara RPJPD dan RPJPN

Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Selain itu, sesuai dengan pasal 263 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN. Hal ini menekankan keselarasan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah:

1. pendekatan teknokratik;
2. pendekatan partisipatif;
3. pendekatan politis;
4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. pendekatan holistik-tematik;
6. pendekatan integratif; dan
7. pendekatan spasial.

1.3.2 Hubungan Antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kota Singkawang setiap periodenya berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I, II, III dan IV RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045.

Sementara itu, RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang

menjadi kewenangan provinsi. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3 Hubungan Antara RPJPD Kota Singkawang dan RTRW Kota Singkawang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022-2042 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041, beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang antara lain:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu:
 - 1) Kawasan Pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah sebagai pusat kegiatan perekonomian yang didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan;
 - 2) Kawasan Muara Sungai Sedau sebagai kawasan pelabuhan penyeberangan dan industri pengolahan perikanan di Kecamatan Singkawang Selatan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi karena menjadi pusat pergerakan orang dan barang serta pengolahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan investasi daerah;
 - 3) Kawasan Peternakan dan Pertanian Terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan dengan potensi utama yang dapat diolah menjadi industri manufaktur di Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya, antara lain potensi perkebunan karet, perkebunan sawit, pengelolaan hasil

peternakan ayam, dan pengelolaan hasil peternakan babi.

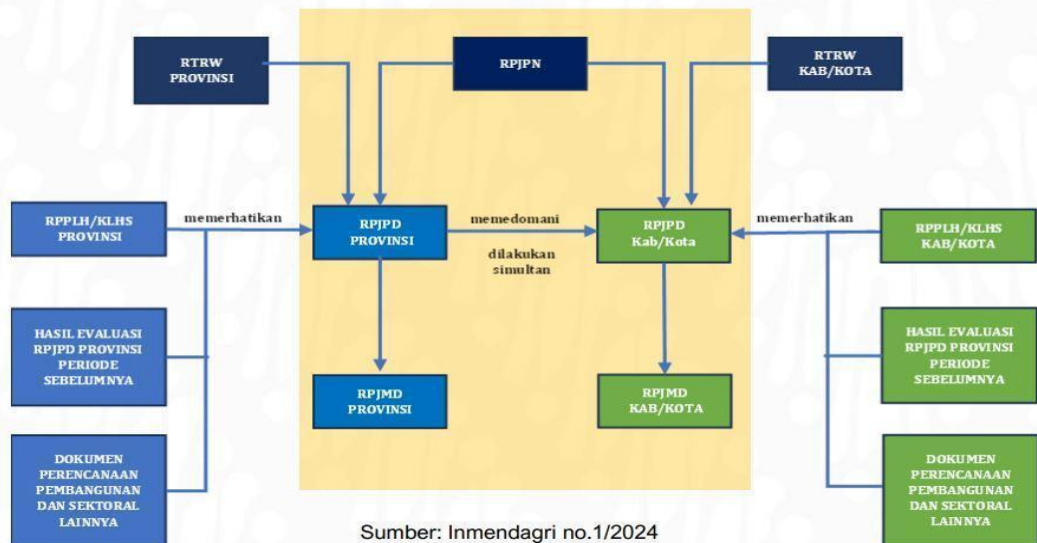
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu:
 - 1) Kawasan Kota Pusaka di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat;
 - 2) Kawasan Wisata Budaya Nyarumkop-Bagak, di Kecamatan Singkawang Timur, sebagai bagian wilayah kota yang penetapannya ditujukan untuk mendukung pengembangan bagian wilayah kota lainnya yang tertinggal; dan
 - 3) Kawasan Desa Wisata Budaya Pajantan di Kelurahan Pajantan, Kecamatan Singkawang Timur.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, berada di Kawasan Bandar Udara Singkawang di Kecamatan Singkawang Selatan (Aerocity).
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berada di Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan.

1.3.4 Hubungan Antara RPJPD Kota Singkawang dan KLHS RPJPD Kota Singkawang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS RPJPD ini merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap kelestarian perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Secara horizontal, dokumen RPJPD sebagai gambaran umum atau abstraksi pembangunan harus terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan secara sektoral seperti dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri, atau pertanian yang umumnya berbentuk rencana induk atau *masterplan* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perencanaan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Singkawang adalah:

1. Sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kota Singkawang pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kota Singkawang sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Adapun tujuan penyusunan perencanaan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Singkawang adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.5 Sistematika Dokumen RPJPD

RPJPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait, termasuk pedoman keuangan daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Berisi tentang hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat, dan RTRW Kota Singkawang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJPD bagi Kota Singkawang.

1.5. Sistematika Dokumen RPJPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab di dalamnya.

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menguraikan kondisi eksisting pembangunan daerah dengan pendekatan beberapa aspek yang terdiri dari:

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

a. Aspek Geografis

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan keberencanaan termasuk

ancaman perubahan iklim.

b. Aspek Demografis

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3 Aspek Daya Saing daerah

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggul daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pergerakan perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas / infrastruktur di daerah.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan primer (Posyandu, Puskesmas)

b. Rumah Sakit Umum

c. Pelayanan Konsultasi Dokter dan Spesialis

d. Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan

2. Pelayanan Sosial
 - a. Bantuan Sosial (BS) untuk masyarakat yang membutuhkan
 - b. Pembantu masyarakat sosial (PSM) untuk masyarakat tua, anak-anak dan orang dengan disabilitas
 - c. Pengurusan lansia dan penghentiannya
3. Pelayanan Pembangunan
 - a. Pembangunan jalan, jembatan dan sarana infrastruktur
 - b. Pembangunan wilayah dan pemukiman
 - c. Pembangunan sarana pendidikan (Sekolah dan Taman Kanak-kanak)
4. Pelayanan Lingkungan Hidup
 - a. Pengelolaan sampah dan limbah
 - b. Pengelolaan Air bersih dan sanitasi
 - c. Pengelolaan kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup
5. Pelayanan Pertanian
 - a. Pengembangan pertanian dan peternakan
 - b. penyuluhan teknis dan pemberdayaan petani
 - c. Pengelolaan irigasi dan pengairan
6. Pelayanan Kehutanan
 - a. Pengelolaan Hutan dan lingkungan hidup
 - b. Pengembangan perkebunan dan agroindustri
7. Pelayanan Keuangan
 - a. Pelayanan Pajak dan Pengumpulan Retribusi
 - b. Pengawasan Keuangan Daerah pengelolaan dana daerah
8. Pelayanan Kependudukan
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil
9. Pelayanan Perumahan
 - a. Jaringan Air minum
 - b. Jaringan Listrik
 - c. Jaringan Telepon dan internet

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi pada bidang/sektor antara lain :

1. Perekonomian
 - a. Tahap Pertama
 - b. Tahap Kedua
 - c. Tahap Ketiga
 - d. Tahap Keempat
2. Pembangunan Pendidikan
 - a. Tahap Pertama
 - b. Tahap Kedua
 - c. Tahap Ketiga
 - d. Tahap Keempat
3. Pembangunan Kesehatan
 - a. Tahap Pertama
 - b. Tahap Kedua
 - c. Tahap Ketiga
 - d. Tahap Keempat
4. Pembangunan Fertilitas dan Keluarga Berencana
 - a. Tahap Pertama
 - b. Tahap Kedua
 - c. Tahap Ketiga
 - d. Tahap Keempat

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan pemukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

III. Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat penjelasan mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis khususnya yang menyangkut permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan sebagai dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu terdiri dari subbab sebagai berikut:

3.1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2. Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

IV. Visi dan Misi Daerah

Berisi tentang perumusan visi dan misi yang akan diwujudkan oleh Kota Singkawang dalam kurun waktu 20 (dua Puluh) tahun ke depan yang disajikan dalam sub bab sebagai berikut:

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Mengemukakan secara eksplisit sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi setiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, disampaikan juga mengenai prioritas masing-masing tahapan pembangunan tersebut. Oleh karena itu disajikan dalam subbab:

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 memusatkan Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

VI. Penutup

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

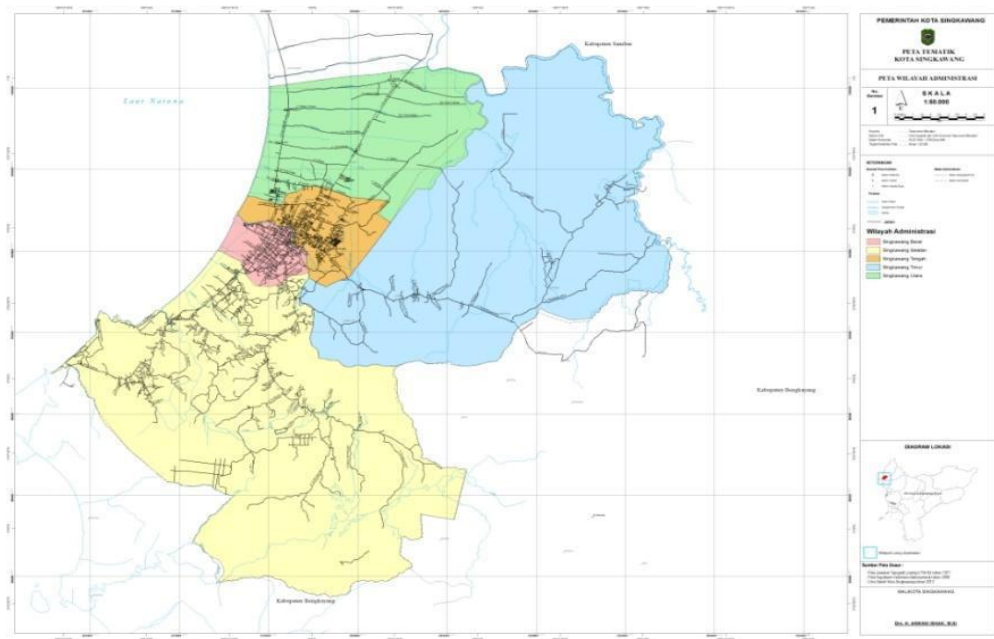
Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan Ibu Kota Singkawang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang. Secara umum Kota Singkawang merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kota Singkawang terletak pada $0^{\circ}44'55,85''$ - $01^{\circ}01'21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ}51'47,6''$ - $109^{\circ}10'19''$ Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kota Singkawang 504 Km² (50.400 Ha) atau sekitar 0,34 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah:

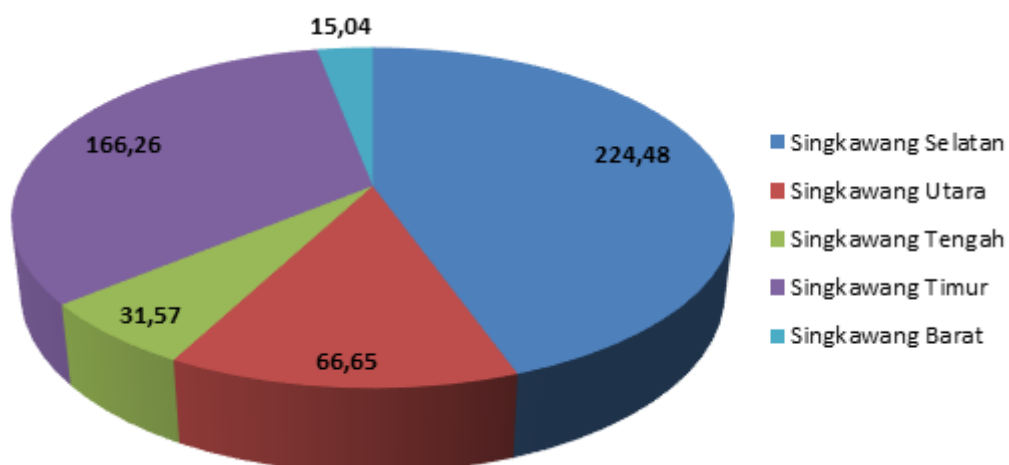
- Utara : Kabupaten Sambas
- Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Singkawang



Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 224,48 km² atau 44,54 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Singkawang Barat dengan luas sebesar 15,04 km² atau 2,98 persen dari luas wilayah Kota Singkawang.

Grafik 2.1.
Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam KM²)



2.1.1.1. Geologi

Dari Lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang terkecil adalah tanah Latosol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- ✓ **Organosol** yaitu tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman. Umumnya, tanah ini banyak ditemukan di daerah rawa-rawa ataupun tempat yang selalu tergenang air. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau. Terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Latasol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

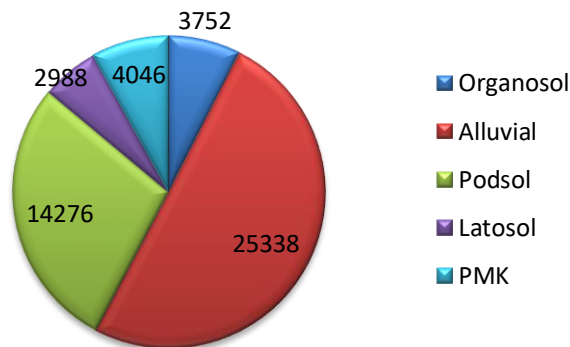
Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah 2024

No.	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah				
		(Ha)	(%)	Organosol	Alluvial	Podsol	Latasol	PMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Singkawang Selatan	22.448	44,54	1.052	11.784	2.880	2.988	3.744
2.	Singkawang Timur	16.626	32,99	2.200	3.926	10.500	-	-
3.	Singkawang Utara	6.665	13,22	500	6.165	-	-	-

No.	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah				
		(Ha)	(%)	Organosol	Alluvial	Podsol	Latasol	PMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Singkawang Barat	1.504	2,98	-	904	600	-	-
5.	Singkawang Tengah	3.157	6,27	-	2.559	296	-	302
Jumlah		50.400	100,00	3.752	25.338	14.276	2.988	4.046
Persentase (%)		100,00		7,44	50,27	28,33	5,93	8,03

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2024

Grafik 2.2
Luas (Ha) Menurut Jenis Tanah Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Singkawang, 2024

2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar di seluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis porous dan sisanya 91,68 persen bukan porous.

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang

terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 (0,60 persen). Jika berdasarkan kelas lereng, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen). Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen).

2.1.1.3. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan dari tahun 2019-2023, lahan sawah mengalami penurunan. Untuk lahan pertanian bukan sawah mengalami peningkatan. Sama halnya lahan bukan pertanian juga mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan Kota Singkawang

No.	Tahun	Lahan Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
1.	2019	2.702	30.691	17.007
2.	2020	4.494	30.869	17.037
3.	2021	2.362	30.981	17.057
4.	2022	2.333	30.971	17.096
5.	2023	2.322	30.936	17.142

Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

2.1.2. Aspek Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Data demografi Kota Singkawang tahun 2024 berdasarkan BPS Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah, Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Rasio Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Singkawang Selatan	4	224,48	58.294	259,68	109	2,20
2	Singkawang Timur	5	166,26	24.177	145,42	111	1,25
3	Singkawang Utara	7	66,65	33.503	502,67	103	2,87
4	Singkawang Barat	4	15,04	56.987	3.789,03	102	0,98
5	Singkawang Tengah	6	31,57	73.151	2.317,10	102	1,45
Jumlah/ Total		26	504,00	246.112	488,32	105	1,68

Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

Tabel 2.4.
Banyaknya RT dan RW Menurut Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1	Singkawang Selatan	4	124	25
2	Singkawang Timur	5	62	20
3	Singkawang Utara	7	89	38
4	Singkawang Barat	4	140	36
5	Singkawang Tengah	6	174	42
Jumlah/ Total		26	587	161

Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

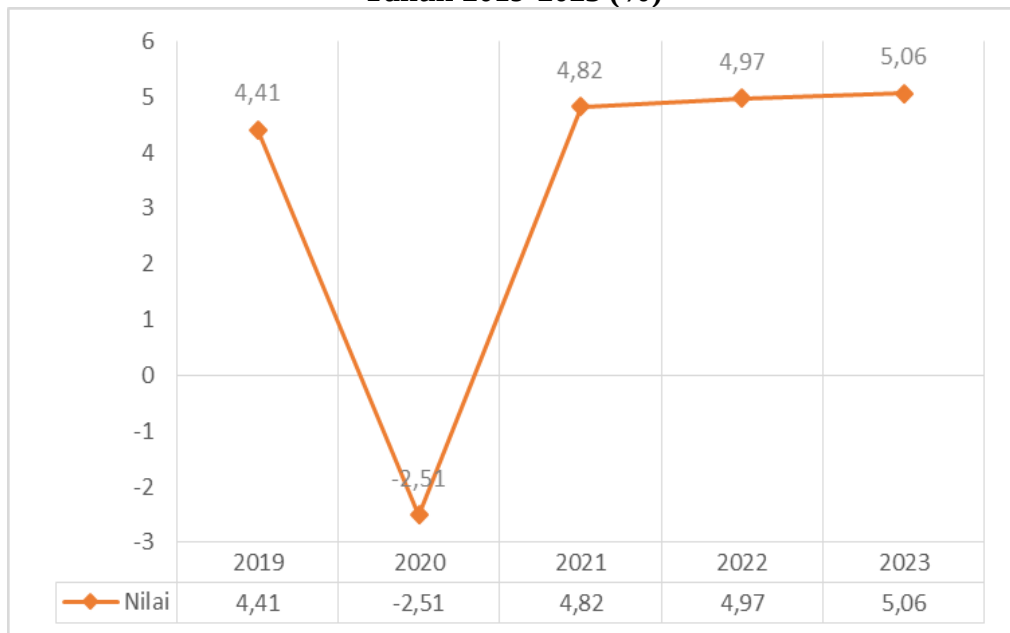
Tren umum menunjukkan adanya pola pemulihan yang jelas setelah kontraksi ekonomi yang tajam pada tahun 2020. Setelah penurunan tersebut, laju pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur pulih dan stabil, dengan pertumbuhan positif dari tahun 2021 hingga 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat setelah tahun 2020 menunjukkan ketahanan ekonomi

Kota Singkawang serta efektivitas langkah-langkah pemulihan yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta. Prospek masa depan, pertumbuhan yang stabil dan peningkatan yang konsisten dari 2021 hingga 2023 memberikan prospek positif untuk ekonomi Kota Singkawang di masa mendatang, dengan harapan pertumbuhan

yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan besar pada tahun 2020, ekonomi Kota Singkawang menunjukkan pemulihan yang mengesankan dan stabilitas yang berkelanjutan, menandakan pondasi ekonomi yang kuat dan potensi pertumbuhan di masa depan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2019-2023 berdasarkan data BPS dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2. Indeks Gini

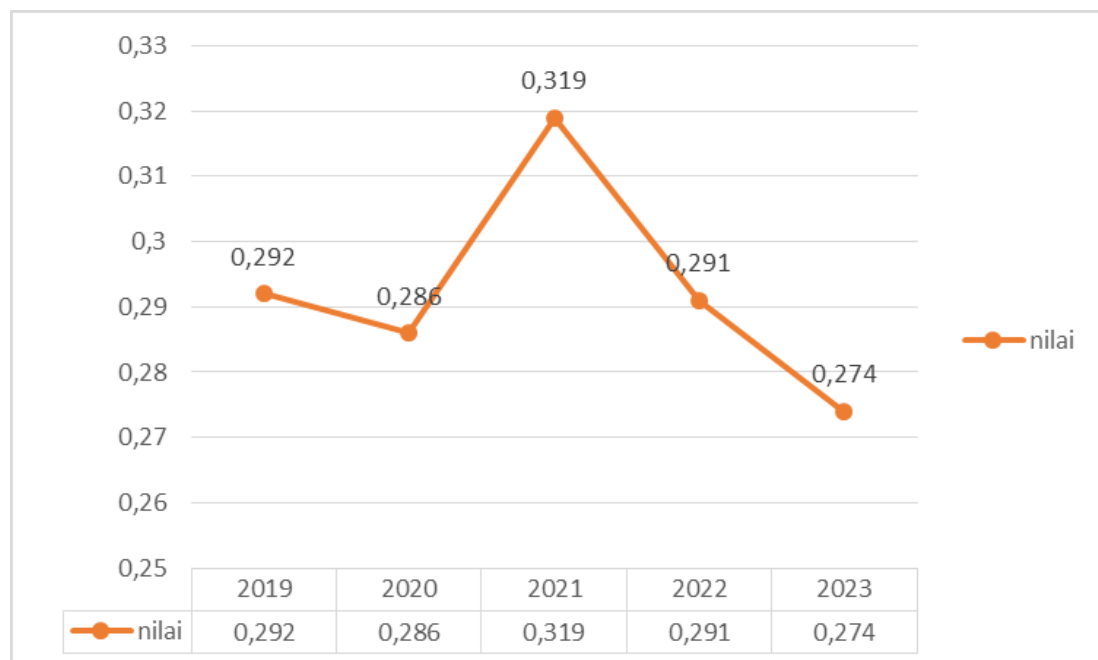
Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk adalah rasio gini atau indeks gini. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$) dan tinggi ($\text{Indeks Gini} > 0,4$).

Data menunjukkan adanya fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan selama periode 2019-2023, dengan peningkatan ketimpangan pada 2021 dan perbaikan signifikan setelahnya. Peningkatan dan penurunan ketimpangan, Lonjakan

ketimpangan pada 2021 kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pemulihan ekonomi yang tidak merata setelah pandemi. Namun, langkah-langkah kebijakan yang efektif telah berhasil menurunkan ketimpangan secara signifikan pada 2022 dan 2023. Kesenjangan pendapatan, Penurunan Indeks Gini pada 2022 dan 2023 mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kesetaraan pendapatan di Kota Singkawang. Ini bisa disebabkan oleh program-program yang mendukung inklusivitas ekonomi, seperti peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang ditargetkan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam bentuk peningkatan ketimpangan pada 2021, data menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dalam distribusi pendapatan di Kota Singkawang, yang mencerminkan peningkatan kesetaraan dan keadilan ekonomi di wilayah tersebut.

Data Indeks Gini Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 berdasarkan data BPS ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 2.4.
Indeks Gini Kota Singkawang
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

3. Tingkat Kemiskinan

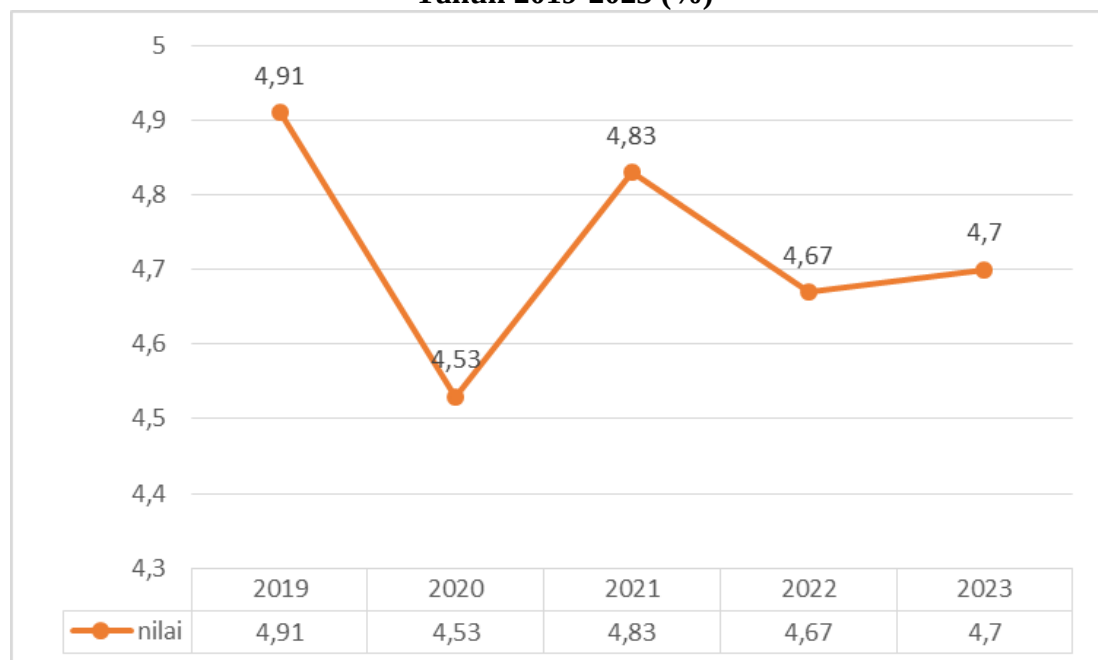
Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin di Kota Singkawang dalam kurun 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan yakni 4,91% di tahun 2019 menjadi 4,70 % pada tahun 2023.

Data persentase penduduk miskin Kota Singkawang dari tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

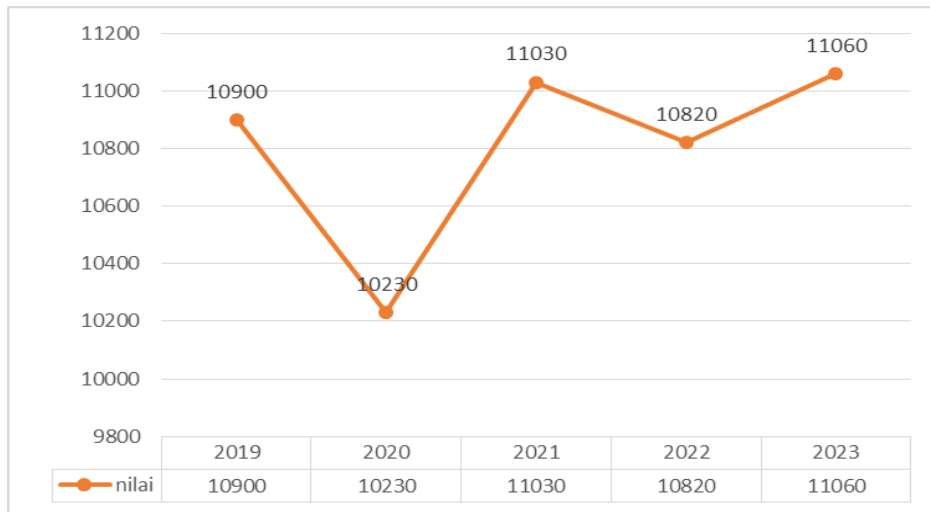
Grafik 2.5.
Persentase Penduduk Miskin Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sedangkan data jumlah penduduk miskin Kota Singkawang dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dari 10.900 jiwa di tahun 2019 menjadi 11.060 jiwa di tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

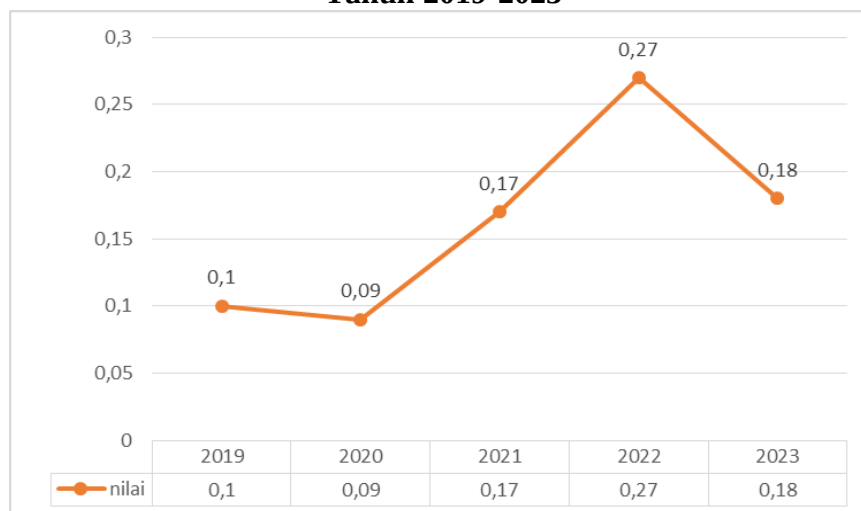
Grafik 2.6.
Jumlah Penduduk Miskin Kota Singkawang
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Data Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Singkawang dari tahun 2019-2023 menunjukkan kenaikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yaitu 0,10 pada tahun 2019 menjadi 0,18 pada tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.7.
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Singkawang
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

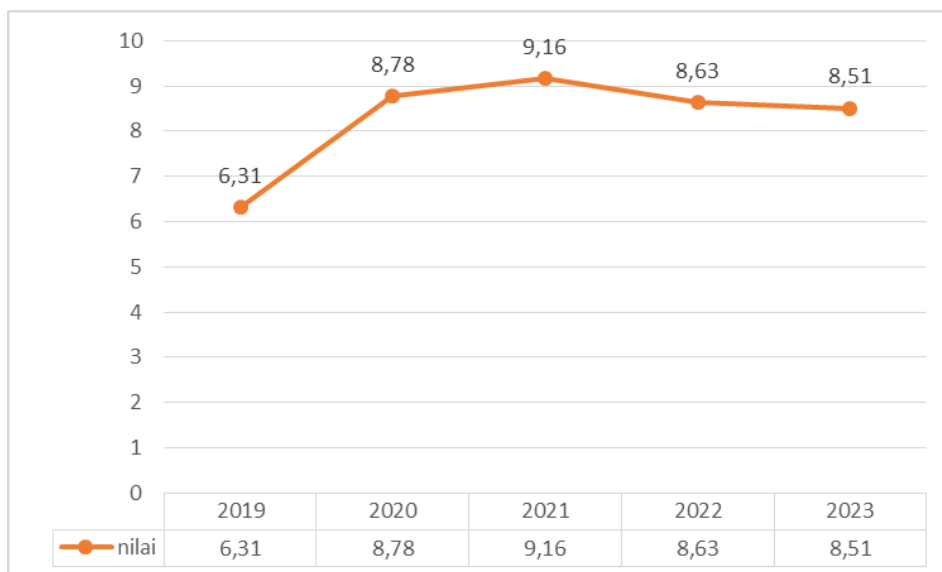
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah

persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas). Menurut BPS, pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Dari 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 lebih besar dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,16%. Hal ini disebabkan tahun 2021 adanya pandemi Covid-19 dan banyak karyawan perusahaan yang dirumahkan atau diberhentikan. Tetapi berangsur membaik pada tahap pemulihan ekonomi tahun 2022 dan 2023.

Persentase Tingkat Pengangguran (TPT) Kota Singkawang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.8.
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/ keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup. Dimensi

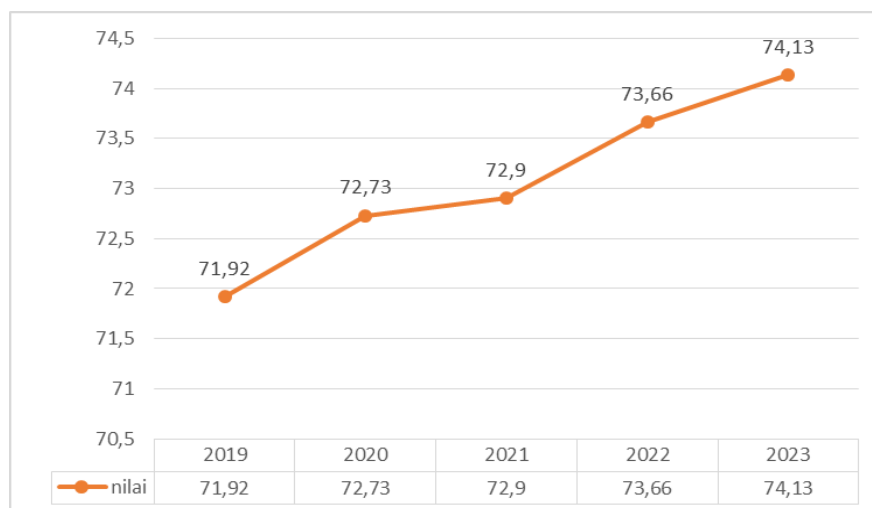
pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Serta dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengetahuan per kapita. BPS mengelompokkan capaian IPM menjadi empat kategori yaitu Rendah ($IPM < 60$); Sedang ($60 \leq IPM \leq 70$); Tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Singkawang terus meningkat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilai IPM Kota Singkawang sebesar 71,92, mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,81 menjadi 72,73. Selanjutnya terjadi peningkatan lagi sebesar 0,17 pada tahun 2021 menjadi 72,90. Mengalami peningkatan sebesar 0,76 di tahun 2022 menjadi 73,66. Dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,47 menjadi 74,13.

Tiga komponen utama pembentuk IPM adalah panjang harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data, kita dapat melihat bahwa komponen IPM tersebut mengalami peningkatan 71,92 menjadi 73,39 sekitar 1,47.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.9.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Keluarga Sehat

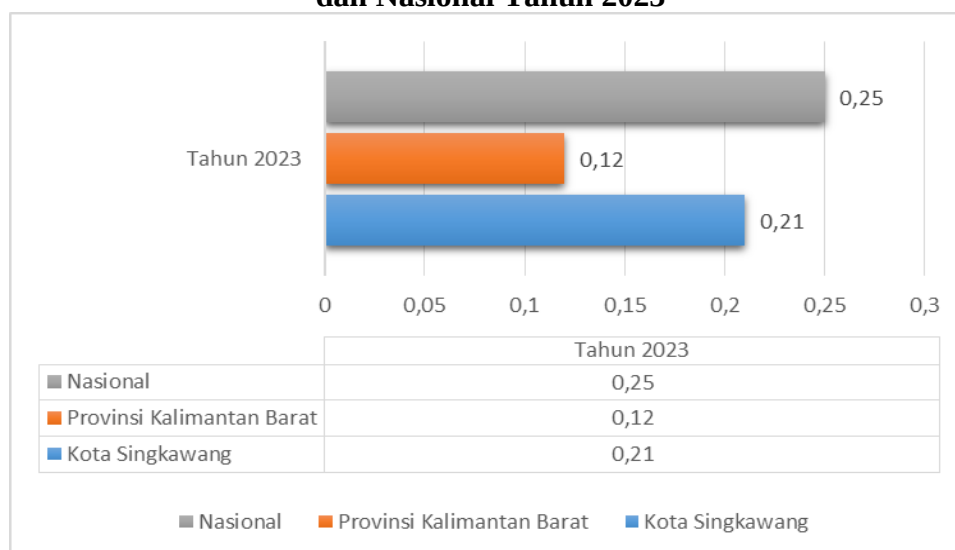
Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga

kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. IKS merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, pra sehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat $> 0,80$, IKS Prasehat $0,50-0,80$, dan IKS Tidak Sehat $< 0,5$.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menerapkan 12 indikator keluarga sehat. 12 Indikator yang menyusun IKS, yaitu: Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; Bayi mendapat ASI eksklusif; Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; Anggota keluarga tidak ada yang merokok; Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih.

Data Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Singkawang yang tersedia hanya pada tahun 2023 sebesar 0,21. Sedangkan nilai IKS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 sebesar 0,12, dan Nasional sebesar 0,25. Data IKS Kota Singkawang lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Barat, namun lebih rendah dibanding Nasional. Secara keseluruhan IKS Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2023 masuk dalam IKS Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10.
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2023



Sumber : Kemenkes RI, 2023

2. Indeks Kualitas keluarga

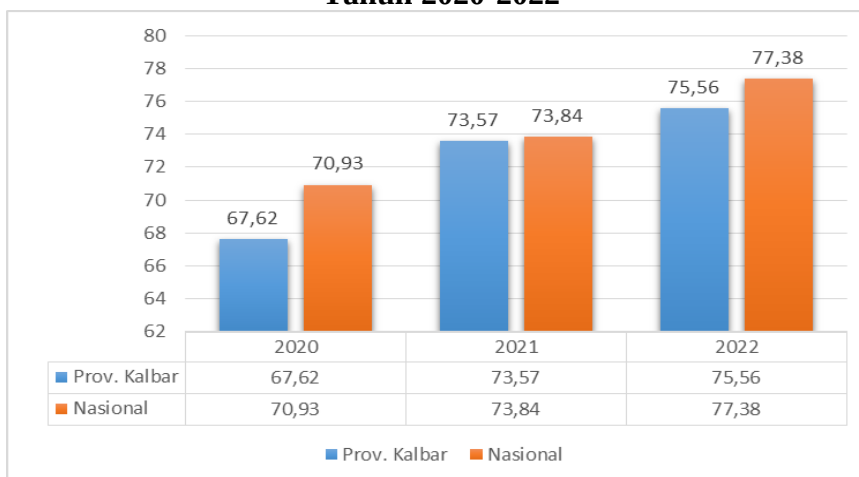
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga. IKK diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50-75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak).

Terdapat 25 indikator dan 5 (lima) dimensi pembentukan IKK, antara lain: (1) Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) terdiri dari 2 indikator yaitu akta kelahiran anak dan keluarga tinggal bersama; (2) Dimensi Kualitas Keluarga Fisik (KKF) terdiri atas 6 indikator yaitu makan makanan sehat bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, tempat tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu; (3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas 6 indikator yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak putus sekolah, dan perempuan bekerja; (4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas 5 indikator yaitu kekerasan terhadap anak, menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orang tua (indikator dobel); dan (5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) terdiri atas 6 indikator yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, tinggal bersama lansia, melakukan kegiatan keagamaan, dan adanya akses internet.

Data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kota Singkawang tidak tersedia. Hanya IKK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional yang tersedia. Untuk IKK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai IKK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,62 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen menjadi 73,57. Dan meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,99 persen menjadi 75,56. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 2,91 dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,84 pada tahun 2021. Dan meningkat lagi pada tahun 2020

sebesar 3,54 persen menjadi 77,38. Untuk tahun 2023 IKK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dikeluarkan pada Desember 2023, yang mana perhitungan untuk tahun 2022. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11.
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
Tahun 2020-2022



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024 (Diolah)
(<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAyMQ==>)

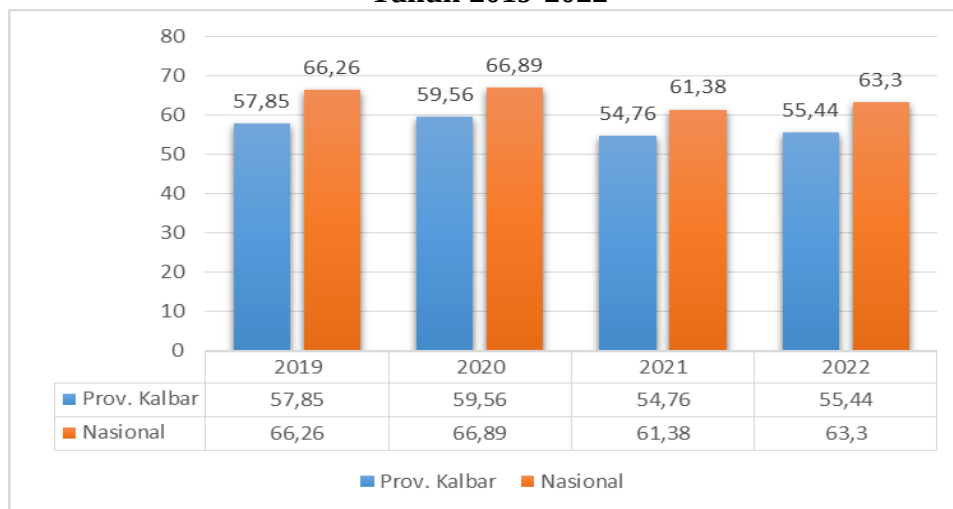
3. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Selanjutnya IPKA merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar.

Pada tahun 2019-2022 nilai IPA Provinsi Kalimantan Barat mengalami perkembangan positif. Nilai IPA tertinggi Provinsi Kalimantan Barat terjadi pada tahun 2020 sebesar 59,56, yang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 54,76, kemudian naik lagi di tahun 2022 menjadi 55,44. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai

IPA Nasional. Nilai IPA Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2020 sebesar 66,89, dan turun pada tahun 2021 menjadi 61,38, dan kemudian naik lagi di tahun 2022 menjadi 63,30. Namun secara keseluruhan IPA Provinsi Kalimantan Barat dibawah nilai IPA Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12.
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019-2022
(<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mzg=>)

4. Indeks Gender

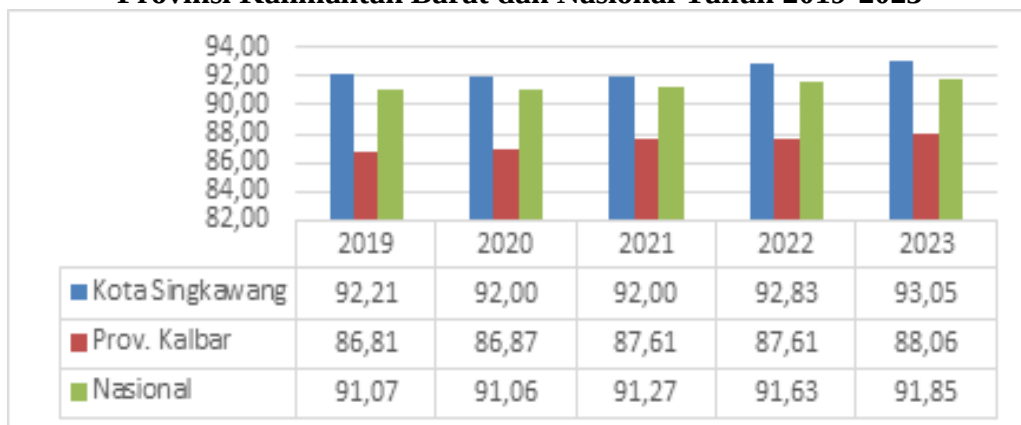
Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

a. Indeks Pembangunan Manusia-Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia-Gender biasa disingkat IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender yaitu perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah ($IPG < 90,00$) dan tinggi ($IPG > 90,00$).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 menunjukkan kenaikan dan masuk dalam kategori tinggi. Begitu juga dengan IPG Nasional menunjukkan kenaikan namun di tahun 2020 mengalami penurunan, namun masih masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan IPG Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (Diolah) (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>)

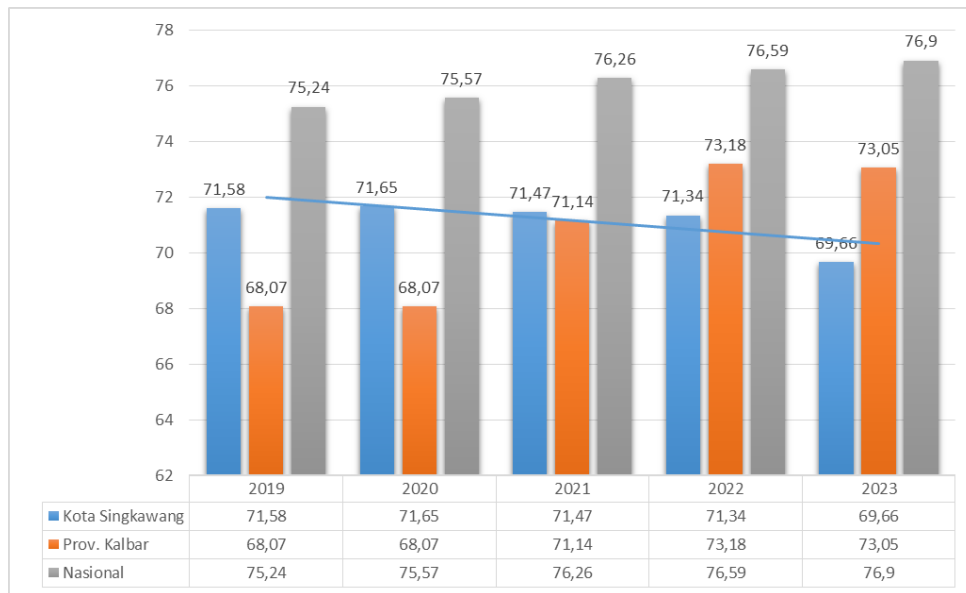
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung melalui rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Badan Pusat Statistik merumuskan hasil analisis ke dalam skor 0-100 poin, dengan kategori pilihan Rendah ($IDG < 50$); Sedang ($50 \leq IDG < 60$); Tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$); dan Sangat Tinggi ($IDG > 80$).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang cenderung menurun dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2019-2023 yang selalu naik. Tahun 2019-2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang mengalami kenaikan dari 71,58 menjadi 71,65. Kemudian di

tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari 71,47 menjadi 69,66. Sedangkan IDG Provinsi dan Nasional pada tahun 2019-2022 cenderung naik setiap tahunnya dan menurun di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

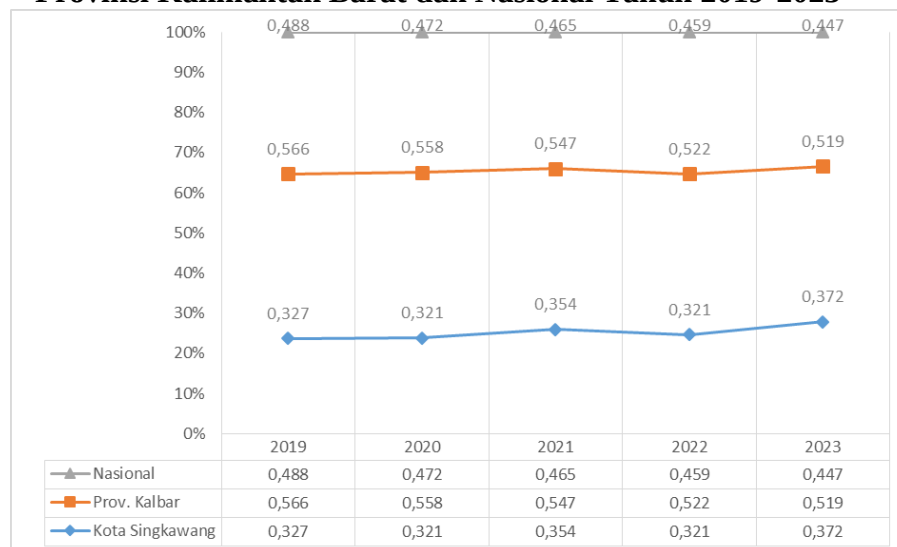
c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender, dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kota Singkawang tahun 2019 sebesar 0,327, tahun 2020 turun menjadi 0,321, tahun 2021 naik menjadi 0,354, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,321, dan tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,372. Dan Nilai IKG Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional cenderung menurun dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilai IKG Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,566, sempat naik di tahun 2020 menjadi 0,558

dan turun kembali di tahun 2021-2023 menjadi 0,519. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin membaik. Nilai IKG Kota Singkawang lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKG Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

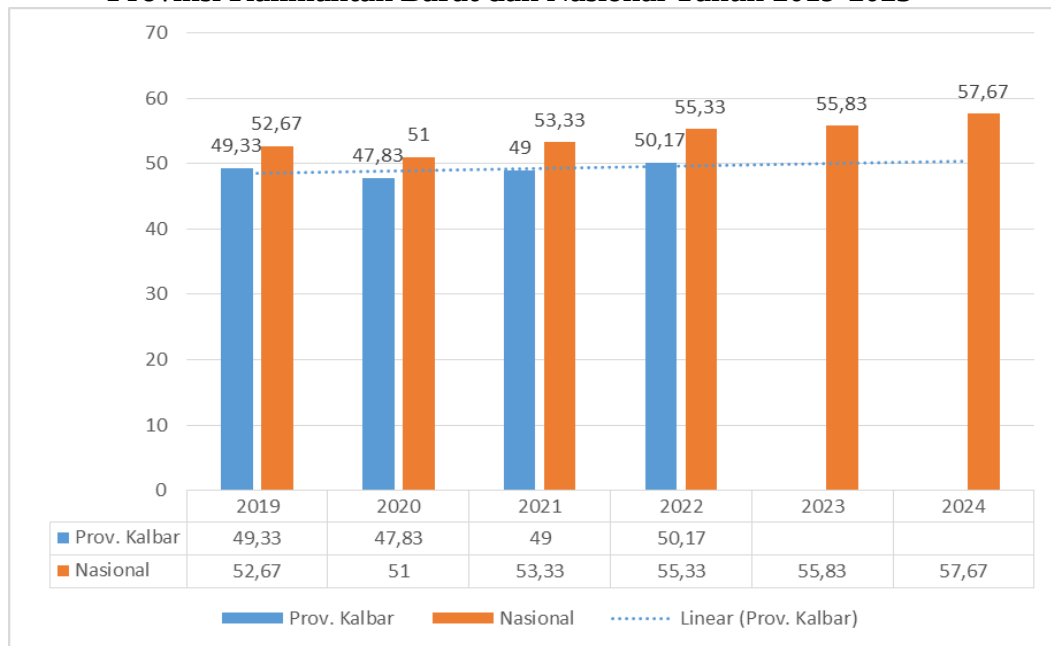
5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunan. 5 (lima) domain tersebut antara lain: Pendidikan (dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah; APK Sekolah Menengah; APK Perguruan Tinggi), Kesehatan dan Kesejahteraan (dengan indikator Angka Kesakitan Pemuda; Persentase Korban Kejahatan; Persentase Pemuda yang Merokok; Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil); Lapangan dan Kesempatan Kerja (dengan indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih; Tingkat Pengangguran Terbuka), Partisipasi dan Kepemimpinan (dengan indikator Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan; Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi; Persentase pemuda yang

memberikan saran / pendapat dalam rapat), Gender dan Diskriminasi (dengan indikator Angka perkawinan usia anak; Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan Tingkat SMA ke atas; dan Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Kondisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPP Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, hanya di tahun 2020 yang mengalami penurunan. Namun Nilai IPP Provinsi Kalimantan Barat masih dibawah nilai nasional, dan nilai IPP Kalimantan Barat tahun 2023 belum dapat diketahui. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.16.
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga,

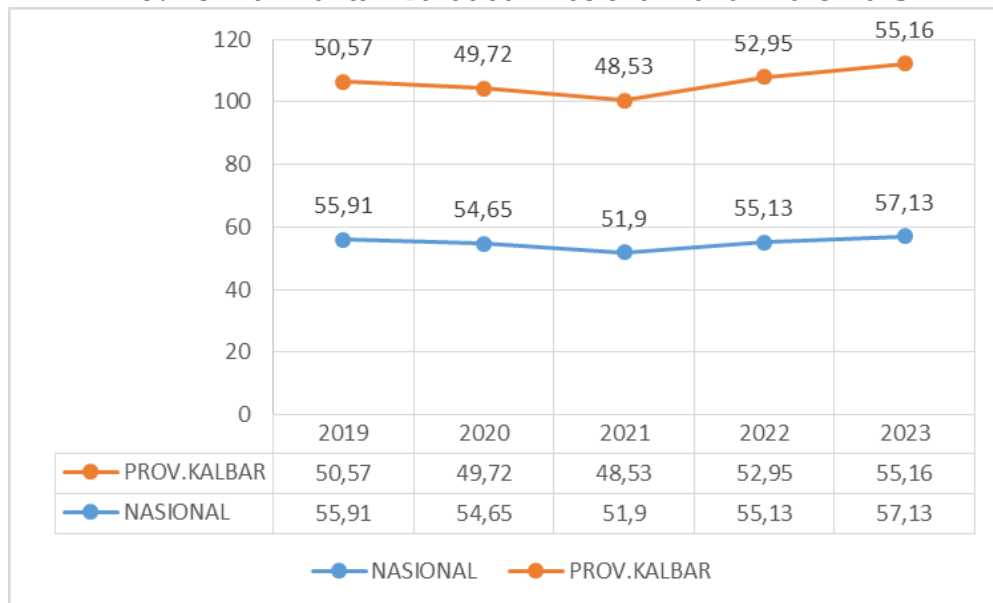
6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh

dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Kriteria capaian IPK adalah $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik).

Data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020-2021, dan meningkat kembali di tahun 2022 dan 2023 seiring dengan berakhirnya pandemi covid-19. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional masuk kategori Cukup ($40 < IPK \leq 60$). Dan Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Barat masih di bawah Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.17.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Kementerian Pendidikan, Kementerian PPN/ Bappenas, Badan Pusat Statistik, 2024 (<https://ipk.kemdikbud.go.id/>)

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu

periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau PDRB nominal disusun menggunakan harga pada tahun berjalan sehingga mampu menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada periode tersebut. Pada umumnya PDRB ADHB digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB ADHB merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun berjalan. Persentase distribusi PDRB ADHB menunjukkan struktur perekonomian di suatu wilayah.

Metode perhitungan PDRB yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:

- 1) Pendekatan Produksi

Komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi lapangan usaha. Pendekatan ini sering dikenal dengan PDRB menurut lapangan usaha;

- 2) Pendekatan Pengeluaran

Komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut komponen penggunaannya. Pendekatan ini sering dikenal dengan PDRB menurut pengeluaran.

Metode pendekatan perhitungan PDRB, antara lain:

- 1) Pendekatan produksi;
- 2) Pendekatan pendapatan;
- 3) Pendekatan pengeluaran.

Struktur perekonomian Kota Singkawang dapat ditinjau dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada PDRB ADHB. Nilai distribusi tersebut dapat menunjukkan besaran kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kota Singkawang. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui

seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor lapangan usaha dalam suatu wilayah. Sektor lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Selama tahun 2010-2023, distribusi PDRB Kota Singkawang terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri; Pengolahan; Pertanian Kehutanan dan Perikanan.

Pada tahun 2023, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Singkawang didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan persentase sebesar 20,30%. Sumbangan terbesar berikutnya pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 17,11%; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 13,25%; dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,32%. Sedangkan lapangan usaha dengan nilai kontribusi paling kecil terhadap PDRB tahun 2023 adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dengan nilai kontribusi sebesar 0,17%.

Nilai kontribusi di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Singkawang sudah tidak bergantung pada sektor primer, melainkan sudah bergeser pada sektor sekunder. Selama tahun 2020-2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor utama yang membentuk struktur perekonomian dan menjadi sektor unggulan di Kota Singkawang.

Tabel 2.5.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Uraian	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rupiah)								
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.159.865	1.200.547	0,03	1.293.669	0,08	1.409.290	0,09	1.460.190	0,04
Pertambangan dan Penggalian	492.844	500.475	0,02	542.770	0,08	584.875	0,08	615.155	0,05
Industri Pengolahan	1.460.878	1.470.463	0,01	1.603.079	0,09	1.720.961	0,07	1.709.021	(0,01)
Pengadaan Listrik dan Gas	14.628	15.161	0,04	16.004	0,06	17.237	0,08	21.334	0,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.924	37.418	0,07	40.540	0,08	43.904	0,08	47.080	0,07
Konstruksi	1.636.951	1.598.444	(0,02)	1.790.450	0,12	1.960.282	0,09	2.206.568	0,13

Uraian	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rupiah)								
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.126.459	1.987.493	(0,07)	2.065.371	0,04	2.363.421	0,14	2.618.451	0,11
Transportasi dan Pergudangan	251.451	251.681	0,00	255.857	0,02	311.048	0,22	375.116	0,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	360.452	332.468	(0,08)	367.437	0,11	435.397	0,18	505.798	0,16
Informasi dan Komunikasi	306.194	328.370	0,07	338.926	0,03	355.371	0,05	381.396	0,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	437.774	427.601	(0,02)	460.015	0,08	503.837	0,10	519.167	0,03
Real Estate	291.103	294.404	0,01	304.428	0,03	305.494	0,00	345.803	0,13
Jasa Perusahaan	67.206	66.445	(0,01)	66.390	(0,00)	75.655	0,14	80.446	0,06

Uraian	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rupiah)								
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	673.749	715.336	0,06	749.777	0,05	786.146	0,05	859.725	0,09
Jasa Pendidikan	597.260	546.498	(0,09)	572.757	0,05	595.768	0,04	620.492	0,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154.299	208.929	0,26	269.580	0,29	299.624	0,11	351.462	0,17
Jasa lainnya	162.354	144.492	(0,12)	140.797	(0,03)	153.808	0,09	182.066	0,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.228.391	10.126.225	(0,01)	10.877.847	0,07	11.922.119	0,10	12.899.269	0,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2024

Grafik 2.18.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2024

Ekonomi Kota Singkawang tahun 2023 tumbuh sebesar 5,06 persen, lebih cepat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,90 persen; diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,04 persen; Jasa lainnya sebesar 14,87 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,90 persen; dan Real Estate sebesar 10,24 persen. Lapangan Usaha Pengadaan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,51 persen. Sementara itu, kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sedalam 2,19 persen dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sedalam 1,53 persen.

2. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

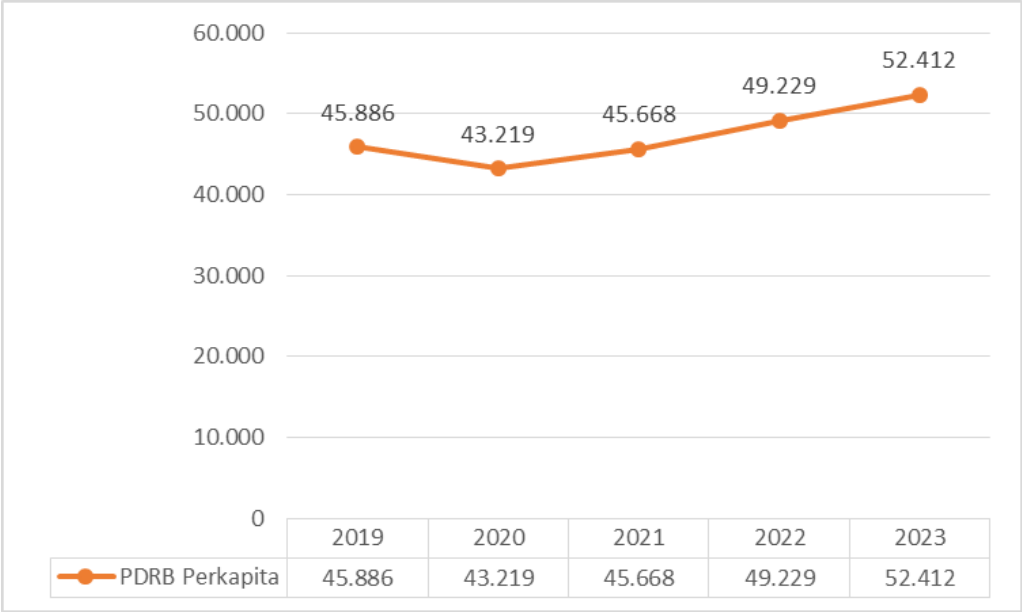
Indikator lain berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB perkapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Dengan demikian PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi. Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak.

Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha

mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Grafik 2.19.
PDRB Perkapita Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2024

PDRB perkapita Kota Singkawang dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan, di tahun 2019 mencapai Rp 45.886 kemudian di tahun 2020 sempat mengalami penurunan mencapai 0,94% dan meningkat hingga mencapai Rp52.412 di tahun 2023.

Menurut tipologi klassen, wilayah dibagi menjadi empat klasifikasi yang pertama (Kuadran I) wilayah cepat maju dan cepat tumbuh yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Kedua (Kuadran II) wilayah maju tapi tertekan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Ketiga (Kuadran III) wilayah berkembang cepat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Keempat (Kuadran VI) wilayah relatif

tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di provinsi.

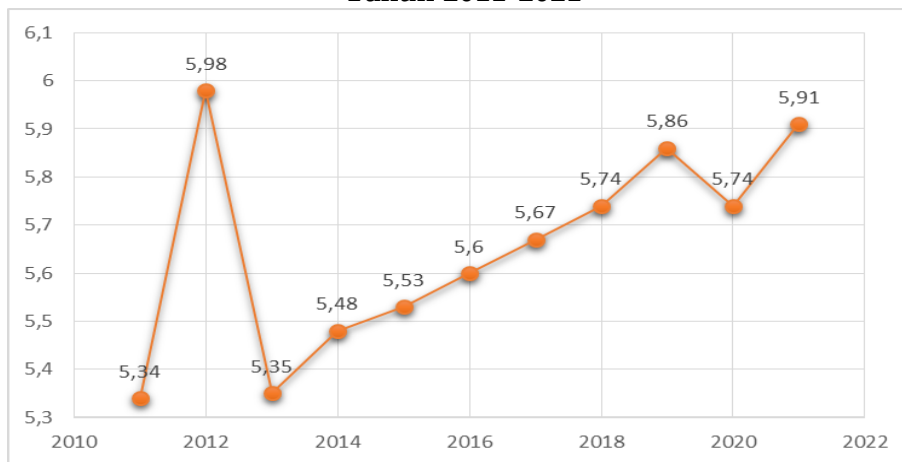
Tipologi Klassen digunakan untuk mengukur pola dan struktur pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang. Berdasarkan klasifikasi tipologi klassen pada tahun 2022 terdapat enam kategori yang masuk ke dalam kriteria maju dan tumbuh cepat yaitu Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Kategori Real Estate; Kategori Konstruksi; dan Kategori Jasa Keuangan. Sementara itu, kategori yang masuk ke dalam kriteria berkembang cepat yaitu Kategori Pertambangan dan Penggalan serta Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Adapun kategori yang masuk sebagai kategori maju tapi tertekan yaitu Kategori Jasa Pendidikan; Kategori Jasa Lainnya; Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kategori Jasa Perusahaan; Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Kategori Pengadaan Listrik, Gas. Namun demikian, masih ada kategori yang masuk sebagai kategori yang relatif tertinggal yaitu Kategori Transportasi dan Pergudangan; Kategori Informasi dan Komunikasi; dan Kategori Industri Pengolahan

3. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif atau Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan tujuan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

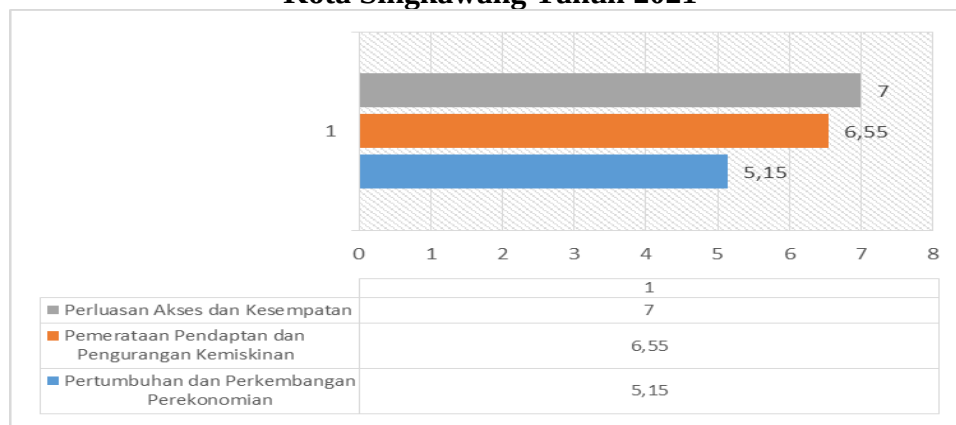
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan dengan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Kriteria capaian IPEI adalah IPEI 1-3 (tidak memuaskan), IPEI 4-7 (memuaskan), IPEI 10 (sangat memuaskan).

Grafik 2.20.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Singkawang
Tahun 2011-2021



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Grafik 2.21.
Nilai Pilar Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kota Singkawang Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Singkawang pada tahun 2018 sebesar 5,74 meningkat di tahun 2019 sebesar 5,86 dan turun di tahun 2020 yang disebabkan covid-19.

2.3.2. Daya Saing SDM

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan

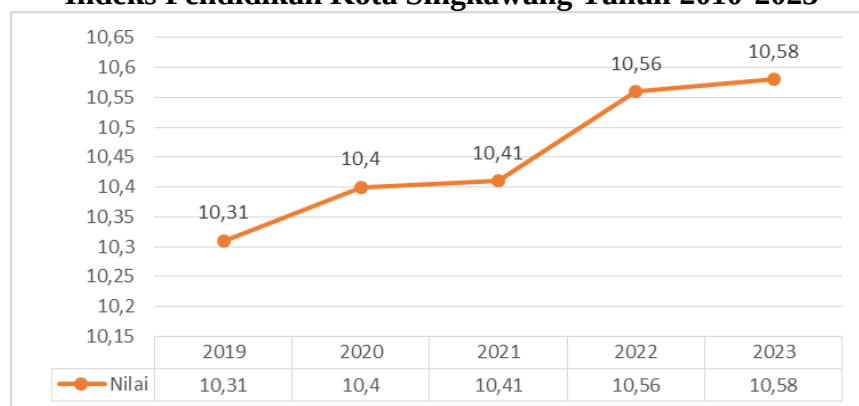
sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan ini merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Indeks Pendidikan Kota Singkawang dihitung menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Singkawang pada tahun 2010-2023 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indeks Pendidikan Kota Singkawang sebesar 8,95. Dalam kurun waktu 13 tahun nilainya meningkat poin dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kota Singkawang semakin membaik dan terjadi peningkatan kualitas.

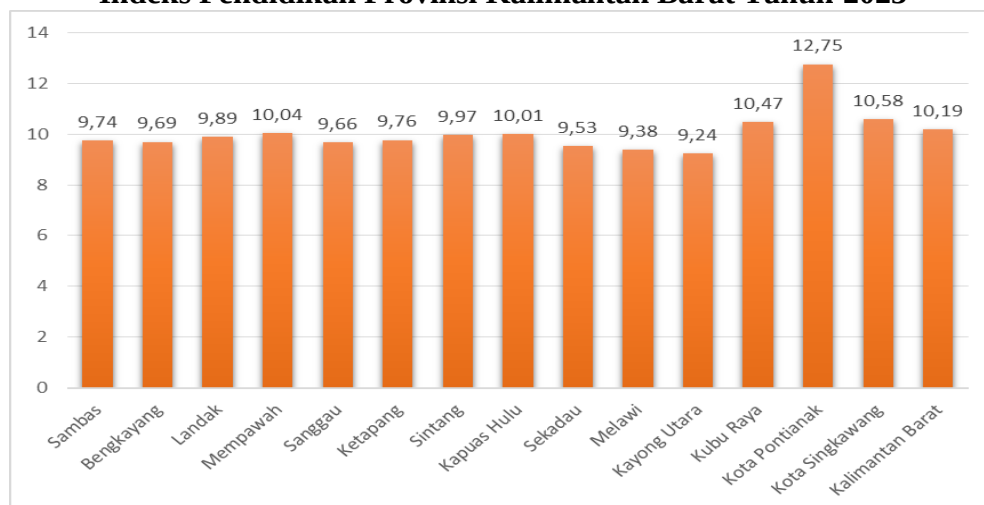
Grafik 2.22.
Indeks Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2010-2023

Apabila dibandingkan dengan indeks pendidikan kota di Provinsi Kalimantan Barat, indeks pendidikan Kota Singkawang cenderung tinggi. Pada tahun 2023 indeks pendidikan Kota Singkawang adalah 10,58 dan berada di peringkat ketiga. Pada peringkat kedua ada Kabupaten Kubu Raya dengan nilai indeks pendidikan sebesar 10,47 dan peringkat pertama Kota Pontianak dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 12,75.

Grafik 2.23.
Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2023

2. Angka Literasi / Numerasi

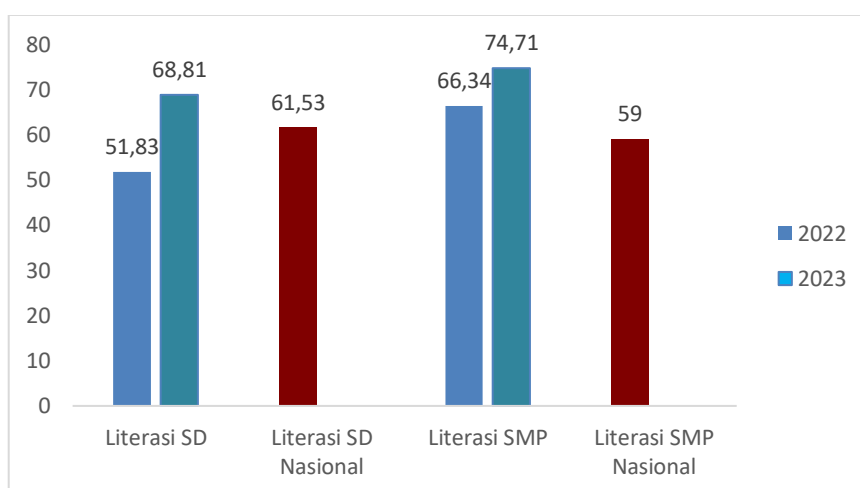
Literasi Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Menggunakan informasi yang ditampilkan dalam berbagai grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.

Kemampuan Literasi direfleksi dengan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.

Kemampuan Numerasi ialah Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan Ketidakpastian.

Angka literasi numerasi Kota Singkawang mengalami peningkatan cukup baik dari tahun 2022 penerapan pertama perhitungan literasi numerasi pada sistem pendidikan Kota Singkawang. Literasi Sekolah Dasar (SD) Umum dengan predikat sedang tahun 2023 mencapai 68,81, naik 16,98 dari 2022 (skor 51,83), sedangkan untuk literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Singkawang tahun 2023 memperoleh predikat baik dengan skor mencapai 74,71, naik 8,37 dari 2022 (skor 66,34).

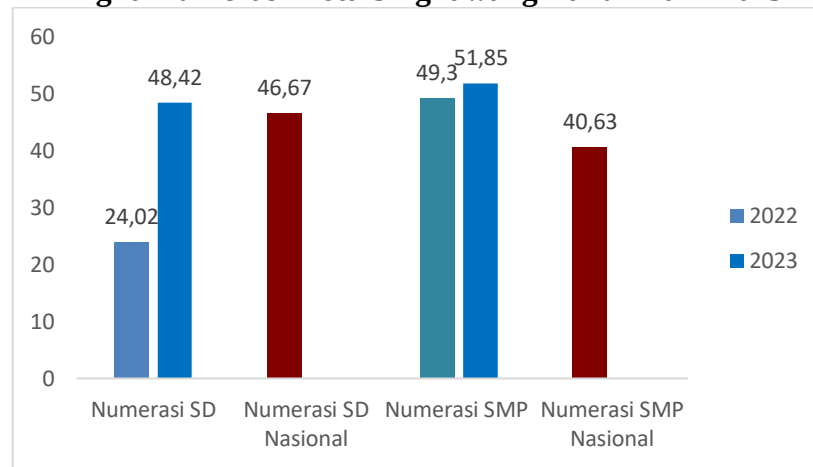
Grafik 2.24.
Angka Literasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023



Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

Pada numerasi SD Kota Singkawang tahun 2023 memperoleh predikat Sedang dengan skor 48,42, naik 24,4 dari 2022 (skor 24,02) , sedangkan untuk SMP tahun 2023 dengan predikat Sedang dengan skor 51,85, naik 2,55 dari 2022 (skor 49,3). Dibandingkan daerah lain, Kota Singkawang termasuk Peringkat menengah atas (21 - 40%) secara Nasional.

Grafik 2.25.
Angka Numerasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023



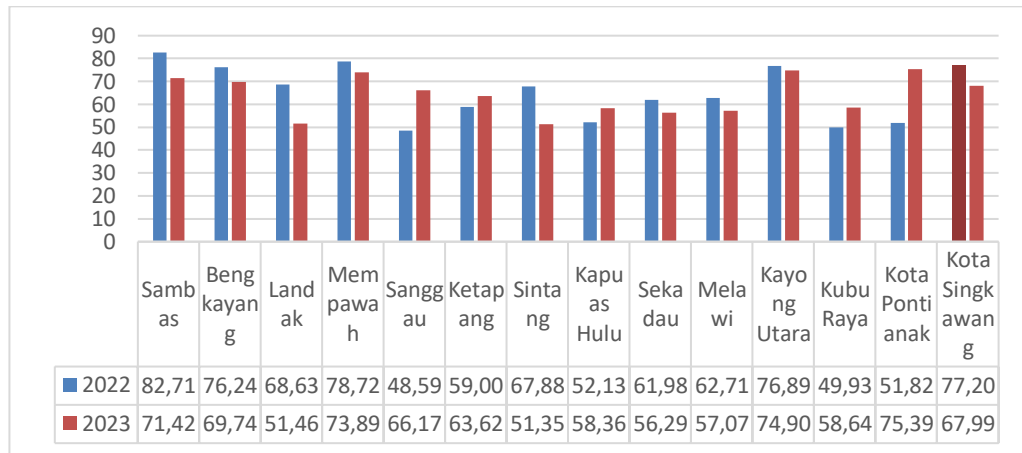
Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur dengan 7 unsur yang mencakup : Pemerataan Layanan Perpustakaan; Ketercukupan Koleksi Perpustakaan; Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari; Perpustakaan ber-SNP; Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi; dan Anggota Perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Singkawang tahun 2022 mencapai 77,2% berada di urutan ke-3 setelah Kabupaten Mempawah sebesar 78,72% dan Kabupaten Sambas sebesar 82,71%. Dan di tahun 2023 mengalami penurunan, dan berada pada urutan ke-6 dengan nilai 67,99%.

Grafik 2.26.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kalimantan Barat
Tahun 2022-2023



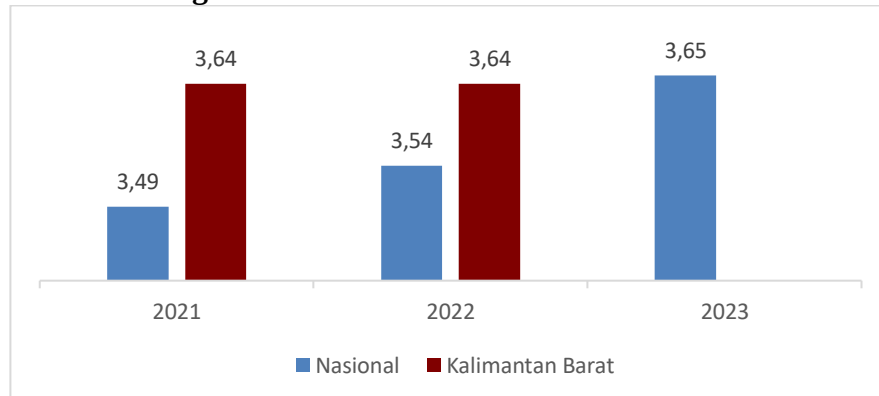
Sumber : Satu Data Indonesia, 2024
(https://katalog.data.go.id/dataset/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-2021/resource/9c4784c7-f410-4a3e-a627-886f65ac2999?inner_span=True)

4. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah pengukuran untuk pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture.

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54, dan tahun 2023 sebesar 3,65. Dan Indeks Literasi Digital Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebesar 3,64 dan tahun 2023 belum dapat diketahui datanya.

Grafik 2.27.
Indeks Literasi Digital Nasional dan Kalimantan Barat Tahun 2021-2023



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024

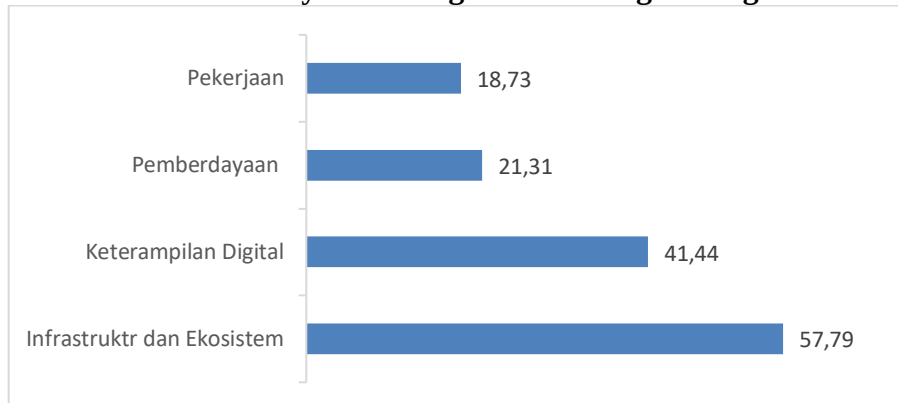
5. Indeks Masyarakat Digital

Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 35,47 yang berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem (57,80), pilar keterampilan digital (41,45), pilar pemberdayaan (21,31) dan pilar pekerjaan (18,739). Secara lebih rinci, pilar infrastruktur dan ekosistem memiliki poin paling tinggi yang merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital yang artinya sebagian besar dari masyarakat Kota Singkawang telah memiliki akses infrastruktur yang baik namun adopsi teknologi digital di sektor pendidikan dan bisnis masih belum merata. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kota Singkawang memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.

Grafik 2.28.
Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital Kota Singkawang Tahun 2023



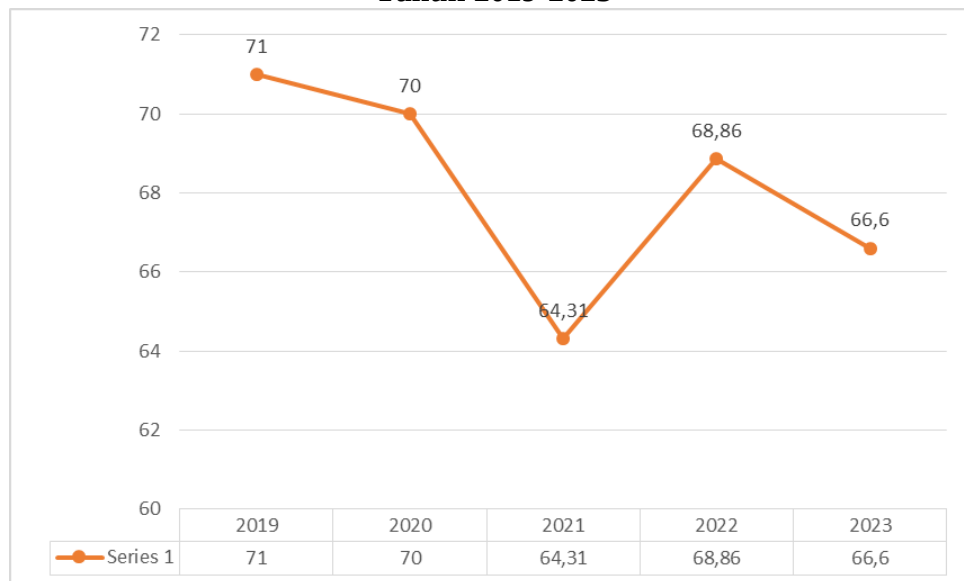
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nilai TPAK menjadi 3 yaitu tinggi ($TPAK \geq 70$), sedang ($50 < TPAK < 70$), rendah ($TPAK \leq 50$) yang mana Kota Singkawang tergolong pada klasifikasi sedang ($50 < TPAK < 70$).

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Singkawang tahun 2019-2023 mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung turun. Penurunan cukup drastis terjadi pada tahun 2021 yang menyentuh angka 64,31% dan naik turun hingga 2023 mencapai angka 66,60%. dimana tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kemiskinan, Keterbatasan peluang kerja, perubahan struktur industri dan perubahan pola hidup hal ini dapat menyebabkan orang lebih memilih bekerja secara freelance atau berbisnis daripada bekerja secara penuh waktu.

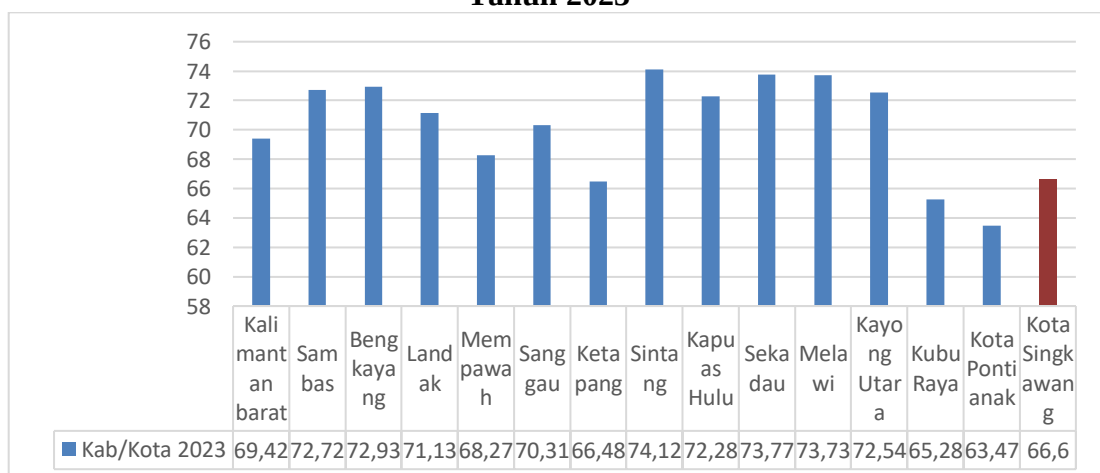
Grafik 2.29.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang (%)
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

Apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, TPAK Kota Singkawang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2023, nilai TPAK Kota Singkawang sebesar 66,6 berada pada urutan ke 11 dari total 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Grafik 2.30.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023



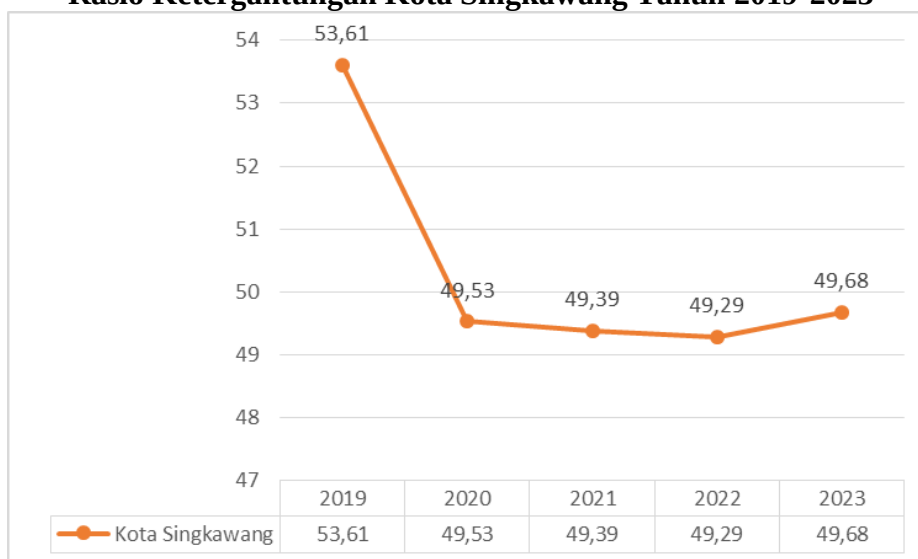
Sumber : SAKERNAS, 2024

7. Rasio Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 menunjukkan penurunan terus menerus. Pada periode tahun 2019-2023, angka ketergantungan Kota Singkawang menurun dari tahun 2019 sebesar 53,61 menjadi 49,29 pada tahun 2022. Dan naik kembali di tahun 2023 sebesar 49,68.

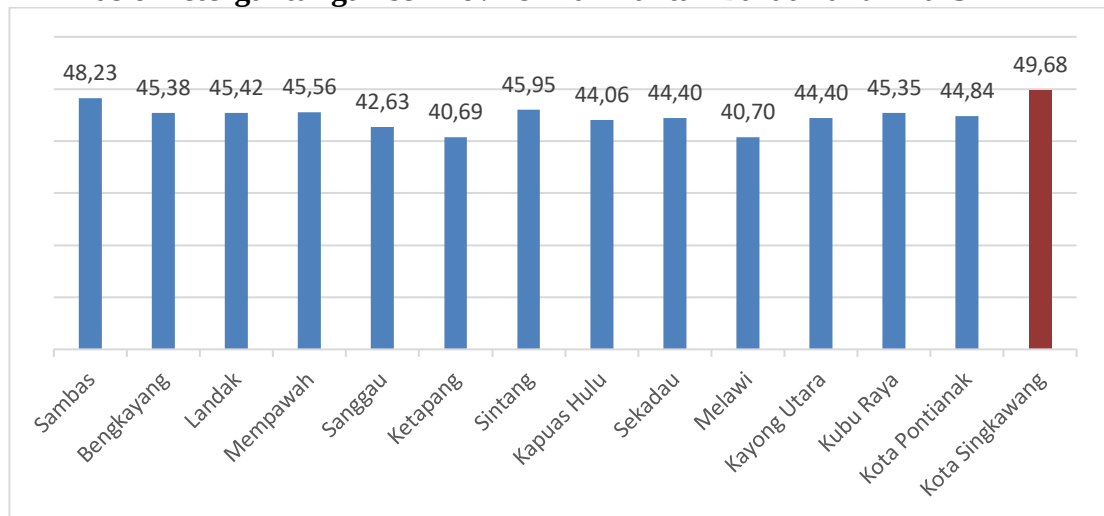
Grafik 2.31.
Rasio Ketergantungan Kota Singkawang Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2023 angka ketergantungan Kota Singkawang berada di peringkat pertama, dengan angka ketergantungan sebesar 49,68. Pada peringkat kedua ada Kabupaten Sambas dengan angka ketergantungan sebesar 48,23 dan peringkat ketiga adalah kabupaten Sintang sebesar 45,95.

Grafik 2.32.
Rasio Ketergantungan se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

1. Indeks Infrastruktur Daerah (IID)

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau City Development Index (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur Daerah adalah akses air bersih, jalan mantap, drainase dan akses sanitasi.

Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan di suatu kota semakin baik. Secara lebih lengkap data capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Indikator IID	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk berakses air minum	39,74	39,17	40,9	49,08	50,25
Persentase Jalan Mantap	51,36	53,54	58,67	60,257	53,02
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	40,85	60,18	66,26	73,52	78,98
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,78	94,11	94,02	94,22	94,33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2024

Persentase penduduk berakses air minum, Persentase drainase dalam kondisi baik; dan Persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023, walaupun ada sempat terjadi penurunan di beberapa tahun, namun di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi dikarenakan meningkatnya minat masyarakat umum memasang sambungan rumah sebagai pelanggan PDAM; adanya penambahan kapasitas instalasi pengelolaan air; adanya perluasan jaringan distribusi utama pipa; adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap hidup sehat; adanya peningkatan ketersediaan sanitasi individual dan sanitasi komunal; dan adanya pelaksanaan rehabilitasi sanitasi di rumah warga.

Persentase drainase dalam kondisi baik setiap tahun selalu mengalami peningkatan, namun kenyataannya luas genangan di kota singkawang semakin meluas. Hal ini dikarenakan capaian drainase yang selama ini hanya menggunakan panjang drainase dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang seluruh drainase tanpa memperhitungkan faktor pengurang keberfungsian saluran drainase seperti: Alih Fungsi Lahan, Pasang-Surut Air Laut, Sedimentasi yang sangat tinggi, Pembangunan yang tidak mematuhi aturan PBG, Kapasitas Tampungan Drainase yang ada tidak sesuai dengan debit air.

Persentase Jalan Mantap dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2023 yang mengalami penurunan dikarenakan SK Wali Kota yang baru Nomor 600.1.7.2/113/PUPR.BMJK Tahun 2023 dimana ada ruas jalan baru yaitu Jalan Akses Bandara dan Jalan Lingkar Barat yang kondisinya masih jalan tanah dan masuk dalam kategori rusak berat sehingga mengakibatkan perubahan jalan ruas dan perubahan kondisi jalan yang cukup signifikan menurunkan kondisi mantap secara keseluruhan.

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur yang tersedia. IKLI merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap

pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Indeks ini disusun berdasarkan indeks kepuasan layanan infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur IKLI, antara lain: ketersediaan fisik (*availability*); kualitas fisik (*quality*); kesesuaian (*appropriateness*); efektifitas pemanfaatan (*utility*); penyerapan tenaga kerja (*job creation*); dan kontribusi pada perekonomian. Secara lebih lengkap data indeks kualitas layanan infrastruktur untuk Kota Singkawang belum tersedia.

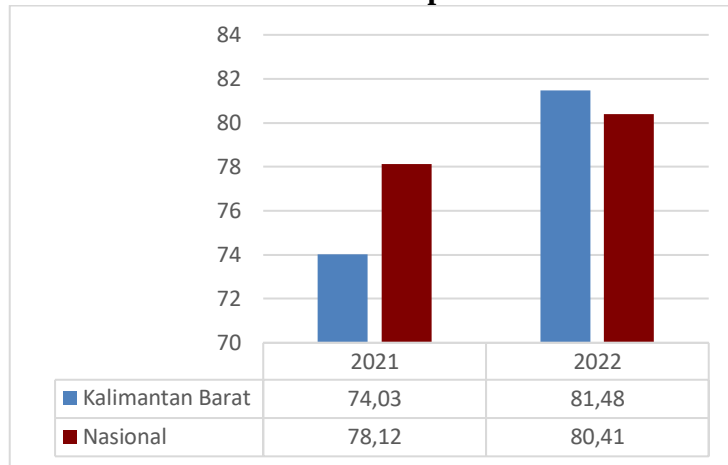
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Pusat maupun di Daerah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Untuk saat ini pengukuran IDI baru dilaksanakan pada tingkat Nasional dan Provinsi, sehingga data IDI untuk Kota Singkawang belum tersedia. Analisis yang dilakukan akan menggunakan data IDI Nasional dan Kalimantan Barat.

Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021-2022 meningkat cukup signifikan. Dimana pada tahun 2021, IDI Provinsi Kalimantan Barat sebesar 74,03 kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,45 poin menjadi 80,48 pada tahun 2022. Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI Nasional sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022.

Grafik 2.33.
Indeks Demokrasi Provinsi Terhadap Nasional Tahun 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021-2022

2. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran) adalah indeks yang memperlihatkan bagaimana praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan serta disandingkan dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan. Toleransi adalah pikiran, perasaan dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, menghormati yang berbeda, bijaksana dalam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu.

IKT ditujukan untuk memberikan *baseline* dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

Tabel 2.7.
Kota dengan Skor Tertinggi Indeks Kota Toleran Tahun 2023

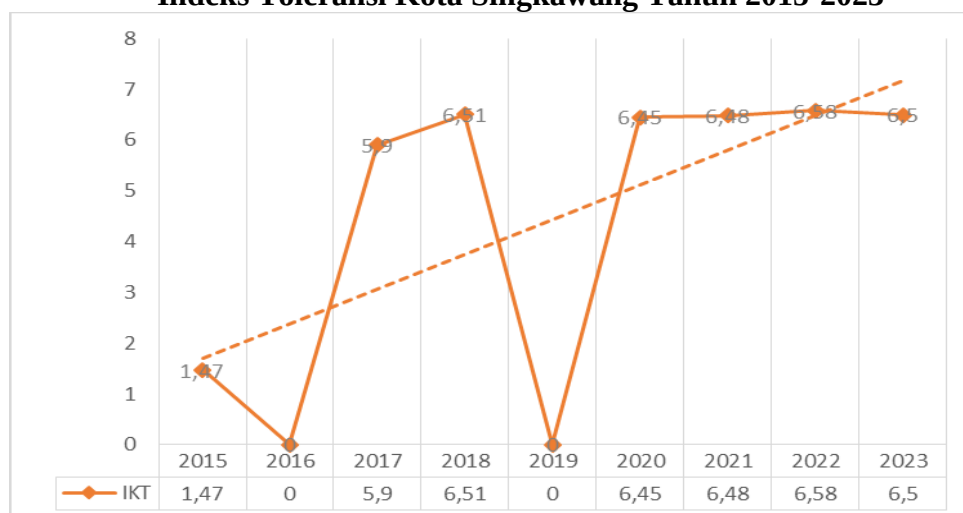
Rang- king	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
1	Singkawang	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,500
2	Bekasi	6,00	6,55	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,460
3	Salatiga	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,450
4	Manado	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,400
5	Semarang	6,00	6,90	6,50	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,230
6	Magelang	6,00	6,85	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,220
7	Kediri	5,83	6,70	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,073
8	Sukabumi	5,17	6,65	6,50	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	5,997
9	Kupang	5,33	6,85	7,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,953
10	Surakarta	5,50	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,800

Sumber : Siaran Pers SETARA Institute, 2024

Kota Singkawang menempati posisi pertama Indeks Toleransi tahun 2023 dengan skor 6,500 diikuti Kota Bekasi pada peringkat kedua dengan skor 6,460 dan Kota Salatiga pada peringkat ke tiga dengan skor 6,450.

Indeks Toleransi Kota Singkawang pada tahun 2015-2023 menunjukkan kenaikan yang baik. Secara bertahap, kenaikan indeks toleransi tersebut mengantarkan Kota Singkawang sebagai kota tertoleran 4 tahun berturut- turut oleh Setara Institute sejak tahun 2020–2023 dengan skor akhir pada tahun 2023 mencapai 6,500. Dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.34.
Indeks Toleransi Kota Singkawang Tahun 2015-2023



Sumber : SETARA Institute, 2015-2023

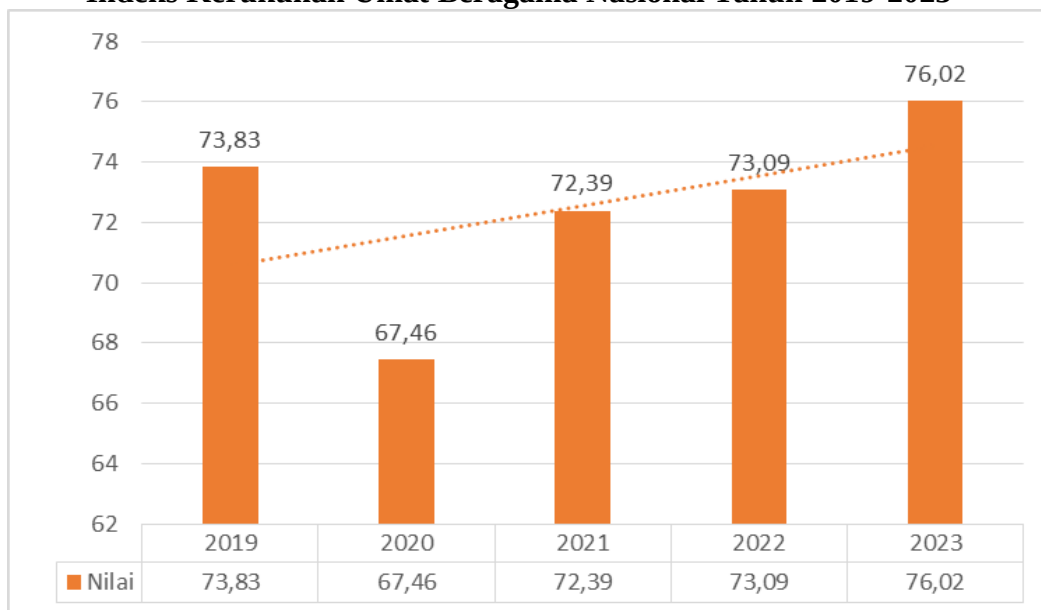
3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan suatu daerah. Dimana stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketentraman masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. Secara lebih lengkap Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Singkawang belum tersedia.

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100). Data IKUB Kota Singkawang tidak tersedia. Sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

Grafik 2.35.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional Tahun 2019-2023



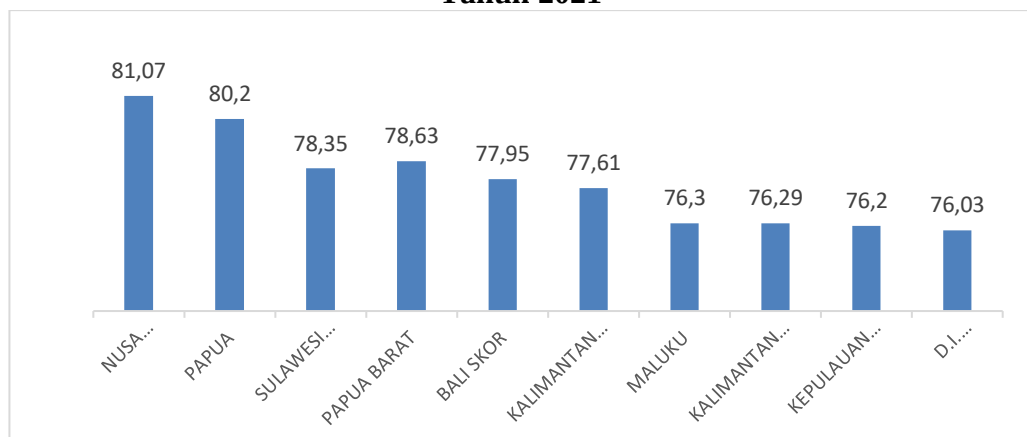
Sumber : Kementerian Agama, 2019-2023

Penurunan indeks kerukunan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh kumpulan faktor, termasuk ketegangan sosial yang bisa muncul akibat berbagai peristiwa besar (antara lain, pemilu, demonstrasi, dan lain-lain) serta dampak dari pandemi COVID-19 yang memisahkan orang secara fisik dan mengurangi interaksi sosial.

Setelah tahun yang penuh tantangan, masyarakat mulai menemukan kembali cara untuk berinteraksi dan membangun kembali jembatan antar agama. Program-program pemerintah dan inisiatif masyarakat yang mendukung kerukunan beragama mulai menunjukkan hasil yang ditunjukkan pada grafik diatas pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 72,39 dan 73,09.

Peningkatan yang signifikan di tahun 2023 yaitu sebesar 76,02 dimana kebijakan yang lebih baik dalam menangani isu-isu kerukunan beragama, lebih banyak dialog antar agama, dan kesadaran kolektif yang mengedepankan toleransi lebih besar di masyarakat.

Grafik 2.36.
10 Provinsi Terbaik dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama
Tahun 2021



Sumber : Kementerian Agama, 2021

5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

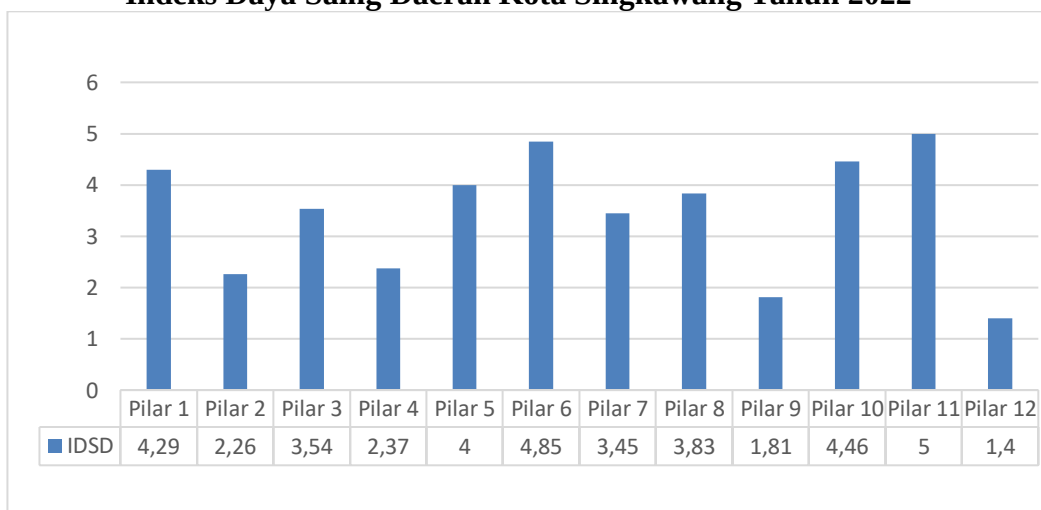
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung,

sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing.

Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Singkawang sebesar 2,94 sama dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kalimantan Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional yang berada pada 3,26 maka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Singkawang masih berada di bawah nasional.

Grafik 2.37.
Indeks Daya Saing Daerah Kota Singkawang Tahun 2022



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2022

Keterangan:

Pilar 1 : Instansi

Pilar 2 : Infrastruktur

Pilar 3 : Adopsi TIK

Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar 5 : Kesehatan

Pilar 6 : Keterampilan

Pilar 7 : Pasar Produk

Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja

Pilar 9 : Sistem Keuangan

Pilar 10 : Ukuran Pasar

Pilar 11 : Dinamisme Bisnis

Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan dan penunjang urusan. Masing-masing layanan urusan tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek pelayanan umum dalam bidang pendidikan Kota Singkawang secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)					
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	13,20	11,75	11,65	11,22	36,31
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) :					
	a. APK SD/MI/Paket A	102,51	104,80	102,25	100,05	101,43
	b. APK SMP/MTs/Paket B	94,52	104,37	105,33	105,55	102,21
3.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) (%) :					
	a. APT SD/MI/Paket A	58,82	57,15	56,37	55,87	55,25
	b. APT SMP/MTs/Paket B	33,24	32,69	33,85	33,05	33,39
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%) :					
	a. APM SD/MI/Paket A	87,38	90,98	89,24	89,69	91,52
	b. APM SMP/MTs/Paket B	67,50	74,32	76,98	82,25	80,55
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :					
	a. APS SD/MI/Paket A	94,91	97,84	96,42	95,94	98,27
	b. APS SMP/MTs/Paket B	96,90	95,50	87,05	91,11	97,85
6.	Angka Putus Sekolah (%) :					
	a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,34	0,44	0,14	0,04	0,00

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1,06	0,64	0,16	0,17	0,01
7.	Angka Kelulusan (AL) (%) :					
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
8.	Angka Melanjutkan (AM) (%) :					
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	107,8	110,92	106,4	112,15	101,3
9.	Fasilitas Pendidikan (%) :					
	a. Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik	89,21	96,64	97,95	98,48	96,35
	b. Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik	84,13	96,47	95,38	98,19	96,46
10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 10.000):					
	a. Rasio Ketersediaan SD/MI/ Penduduk Usia 7-12 thn	39	39	39	39,35	39,67
	b. Rasio Ketersediaan SMP/MTs/ Penduduk Usia 13-15 thn	33	36	37	36,73	36,55
11.	Rasio Guru/Murid (per 10.000):					
	a. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI	465	438	483	510	634,3
	b. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs	589	583	622	584	695,8
	e. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI/ Kelas	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
	f. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs /Kelas	0,13	0,14	0,14	0,13	0,15
12.	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S.1/D.IV (%)					
	a. SD/MI	82,64	86,49	85,07	88,51	90,11
	b. SMP/MTs	96,15	95,91	93,66	91,51	90,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK PAUD (Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK)) memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023, cenderung turun dan mencapai angka terendah di tahun 2022 dengan angka 11,22%. Akan tetapi, di tahun 2023 APK PAUD naik signifikan menjadi 36,31%. Melonjaknya angka ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, di mana yang sebelumnya untuk batas usia APK PAUD 4-6 Tahun menjadi 5-6 Tahun. APK SD dalam periode 2019-2023 cenderung turun mendekati angka 100% dan mencapai angka terendah di tahun

2022 dengan angka 100,05%. Di tahun 2023 APK SD kembali mengalami kenaikan, meski tidak signifikan, menjadi 101,43%. Peningkatan APK SD dapat disebabkan karena masuknya penduduk usia 7-12 tahun dari luar Kota Singkawang untuk bersekolah dan juga masih terdapat penduduk di luar usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A. APK SMP dalam periode 2020-2022 terus meningkat menjauhi angka 100% dan mencapai angka tertinggi di tahun 2022 dengan angka 105,55%. Di tahun 2023 APK SMP kembali turun menjadi 102,21%. Kondisi ini dapat dikatakan memiliki tren positif karena target dari APK adalah 100%, yang artinya semakin berkurangnya penduduk usia 13-15 dari luar Kota Singkawang yang bersekolah SMP di Kota Singkawang, serta semakin mengecilnya jumlah penduduk Kota Singkawang berusia di luar 13-15 tahun bersekolah pada jenjang SMP/Mts/Paket B.

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) adalah angka yang menunjukkan status pendidikan terakhir yang telah ditamatkan penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu, yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT merupakan persentase jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, terhadap total jumlah penduduk dalam tahun tertentu. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT SD terus menurun dalam periode 2019-2023, dari 58,82% di tahun 2019 menjadi 55,25% di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor antara lain penduduk pindah ke luar kota dan penambahan penduduk yang berusia 0-6 Tahun. APT SD dapat dianggap memiliki tren positif jika APT jenjang pendidikan di atasnya mengalami kenaikan. APT SMP bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, turun dan naik dalam rentang 1,16%, mencapai angka tertinggi di tahun 2021 (33,85%) dan terendah di tahun 2020 (32,69%). Di tahun 2023, APT SMP sebesar 33,39%, naik 0,34% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa telah bertambahnya penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM SD memiliki tren positif dalam periode 2019-2023, cenderung naik mendekati 100%, dari 87,38% di tahun 2019, menjadi 91,52% di tahun 2023. Ini berarti, semakin banyak pelajar SD/ sederajat yang bersekolah sesuai dengan usianya. APM SMP memiliki tren positif dalam periode 2019-2023, terus meningkat dari 67,50% di tahun 2019 menjadi 82,25% di tahun 2022. Akan tetapi, di tahun 2023 APM SMP sedikit mengalami penurunan menjadi 80,55%.

Dalam periode 2019-2023, Angka Putus Sekolah baik SD maupun SMP memiliki tren positif, cenderung turun. Bahkan di tahun 2023, Angka Putus Sekolah SD adalah 0% dan SMP adalah SMP 0,01%, merupakan yang terendah dalam periode tersebut. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan tahun 2023, siswa SMP yang putus sekolah sebanyak 2 orang. Tren positif ini menunjukkan bahwa hampir semua anak usia 7-12 dan 3-15 tahun di Kota Singkawang mendapatkan pelayanan pendidikan sehingga dapat terus melanjutkan pendidikan.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang selanjutnya dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah, yaitu jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio Ketersediaan Sekolah baik SD maupun SMP dalam periode 2018-2023 memiliki tren positif, cenderung naik. Akan tetapi, di tahun 2023 rasio SMP mengalami sedikit penurunan, dari 36,73% di tahun 2022 menjadi 36,55% di tahun 2023. Sedangkan untuk SD sebesar 39,35% di tahun 2022, naik menjadi 39,67% di tahun 2023.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang juga dilihat dari ketersediaan tenaga pengajar dan ukuran jumlah ideal murid untuk satu guru untuk mencapai mutu pengajaran yang digambarkan melalui rasio guru terhadap murid, yaitu jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah murid jenjang pendidikan tersebut. Rasio Guru Per Murid dalam periode 2019-2023 baik SD maupun SMP memiliki tren positif, cenderung naik, meski dalam rentang 0,02 poin. Di tahun 2023, Rasio Guru SD sebesar 0,06 dan SMP sebesar

0,15. Kenaikan yang kecil ini perlu diperhatikan untuk mengantisipasi tenaga pendidik yang pensiun dan bertambahnya jumlah murid di masa mendatang. Sedangkan, Kualifikasi Guru (S1/DIV) untuk jenjang SD memiliki tren positif, cenderung meningkat. Di tahun 2023 adalah sebesar 90,11%, naik dibandingkan 88,51% (2022). Peningkatan ini disebabkan banyaknya guru yang sudah pensiun namun belum memenuhi kualifikasi S1/DIV disertai dengan bertambahnya guru dengan status PPPK yang memiliki kualifikasi S1/DIV. Sedangkan jenjang SMP memiliki tren negatif, terus turun dan mencapai angka terendah dalam periode 2019-2023. Di tahun 2023 adalah sebesar 90,65%, turun dibandingkan 91,51% (2022) dan 96,15% (2019). Penurunan ini disebabkan berkurangnya guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV dikarenakan pensiun yang tidak diimbangi dengan penambahan guru baru dengan kualifikasi S1/DIV.

APK PAUD memiliki tren negatif dalam periode 2019-2022, cenderung turun dan mencapai angka terendah di tahun 2022 dengan angka 11,22%. Akan tetapi, di tahun 2023 APK PAUD naik dengan signifikan menjadi 36,31%. Melonjaknya angka ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, di mana yang sebelumnya untuk batas usia APK PAUD 4-6 Tahun menjadi 5-6 Tahun.

APK SD dalam periode 2019-2022 cenderung turun mendekati angka 100% dan mencapai angka terendah di tahun 2022 dengan angka 100,05%. Di tahun 2023 APK SD kembali mengalami kenaikan, meski tidak signifikan, menjadi 101,43%. Peningkatan APK SD dapat disebabkan karena masuknya penduduk usia 7-12 tahun dari luar Kota Singkawang untuk bersekolah dan juga masih terdapat penduduk di luar usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A.

APK SMP dalam periode 2020-2022 terus meningkat menjauhi angka 100% dan mencapai angka tertinggi di tahun 2022 dengan angka 105,55%. Di tahun 2023 APK SMP kembali turun menjadi 102,21%. Kondisi ini dapat dikatakan memiliki tren positif karena target dari APK adalah 100%, yang artinya semakin berkurangnya penduduk usia 13-15 dari luar Kota Singkawang yang bersekolah SMP di Kota Singkawang, serta semakin mengecilnya jumlah

penduduk Kota Singkawang berusia di luar 13-15 tahun bersekolah pada jenjang SMP/Mts/Paket B.

APT SD terus menurun dalam periode 2019-2023, dari 58,82% di tahun 2019 menjadi 55,25% di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor antara lain penduduk pindah ke luar kota dan penambahan penduduk yang berusia 0-6 Tahun. APT SD dapat dianggap memiliki tren positif jika APT jenjang pendidikan di atasnya mengalami kenaikan.

APT SMP bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, turun dan naik dalam rentang 1,16%, mencapai angka tertinggi di tahun 2021 (33,85%) dan terendah di tahun 2020 (32,69%). Di tahun 2023, APT SMP sebesar 33,39%, naik 0,34% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa telah bertambahnya penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP.

APM SD memiliki tren positif dalam periode 2019-2023, cenderung naik mendekati 100%, dari 87,38% di tahun 2019, menjadi 91,52% di tahun 2023. Ini berarti, semakin banyak pelajar SD/ sederajat yang bersekolah sesuai dengan usianya.

APM SMP memiliki tren positif dalam periode 2019-2023, terus meningkat dari 67,50% di tahun 2019 menjadi 82,25% di tahun 2022. Akan tetapi, di tahun 2023 APM SMP sedikit mengalami penurunan menjadi 80,55%.

APS SD (7-12 tahun) memiliki tren positif dalam periode 2019-2023, cenderung naik, meski sempat turun di tahun 2021 dan 2022. APS SD di tahun 2023 sebesar 98,27%, naik dari angka 95,61% di tahun 2018.

APS SMP (13-15 tahun) memiliki tren negatif dalam periode 2019-2022, cenderung turun. Akan tetapi, di tahun 2023 APS SMP kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari angka 91,11% di tahun 2022, menjadi 97,85% di tahun 2023.

Dalam periode 2019-2023, Angka Putus Sekolah baik SD maupun SMP memiliki tren positif, cenderung turun. Bahkan di tahun 2023, Angka Putus Sekolah SD adalah 0% dan SMP adalah 0,01%, merupakan yang terendah dalam periode tersebut. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan tahun 2023, siswa SMP yang putus sekolah sebanyak 2 orang. Tren positif ini menunjukkan bahwa

hampir semua anak usia 7-12 dan 3-15 tahun di Kota Singkawang mendapatkan pelayanan pendidikan sehingga dapat terus melanjutkan pendidikan. Dalam periode 2018-2023, Angka Kelulusan baik SD maupun SMP selalu 100%.

Angka Melanjutkan dari SD ke SMP dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, cenderung naik. Akan tetapi, meskipun masih di atas angka 100%, di tahun 2023 angkanya mengalami penurunan yang signifikan, dari 112,15% di tahun 2022 menjadi 101,27% di tahun 2023. Penurunan ini sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan, karena target adalah 100%. Angka Melanjutkan bisa menjadi lebih dari 100 disebabkan terdapat banyak penduduk dari luar Kota Singkawang yang melanjutkan pendidikan jenjang SMP/MTs di Kota Singkawang.

Keadaan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik untuk SD maupun SMP dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, cenderung naik. Akan tetapi, meskipun tidak signifikan, di tahun 2023 angka keduanya mengalami penurunan, dari 98,48% (2022) menjadi 96,35% (2023) untuk SD dan 98,19% (2022) menjadi 96,46% (2023) untuk SMP. Penurunan ini terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah bangunan ruang kelas SD yang dalam kondisi rusak ringan yang disebabkan faktor usia dari bangunan tersebut.

Rasio Ketersediaan Sekolah baik SD maupun SMP dalam periode 2019-2023 memiliki tren positif, cenderung naik. Akan tetapi, di tahun 2023 rasio SMP mengalami sedikit penurunan, dari 36,73% di tahun 2022 menjadi 36,55% di tahun 2023. Sedangkan untuk SD sebesar 39,35% di tahun 2022, naik menjadi 39,67% di tahun 2023.

Rasio Guru Per Murid dalam periode 2019-2023 baik SD maupun SMP memiliki tren positif, cenderung naik, meski dalam rentang 0,02 poin. Di tahun 2023, Rasio Guru SD sebesar 0,06 dan SMP sebesar 0,15. Kenaikan yang kecil ini perlu diperhatikan untuk mengantisipasi tenaga pendidik yang pensiun dan bertambahnya jumlah murid di masa mendatang.

Kualifikasi Guru (S1/DIV) untuk jenjang SD memiliki tren positif, cenderung meningkat. Di tahun 2023 adalah sebesar 90,11%, naik dibandingkan 88,51% (2022) dan 82,64% (2019). Peningkatan ini disebabkan banyaknya guru yang sudah pensiun namun belum memenuhi kualifikasi S1/DIV disertai dengan

bertambahnya guru dengan status PPPK yang memiliki kualifikasi S1/DIV. Sedangkan jenjang SMP memiliki tren negatif, terus turun dan mencapai angka terendah dalam periode 2019-2023. Di tahun 2023 adalah sebesar 90,65%, turun dibandingkan 91,51% (2022) dan 96,15% (2019). Penurunan ini disebabkan berkurangnya guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV dikarenakan pensiun yang tidak diimbangi dengan penambahan guru baru dengan kualifikasi S1/DIV.

2.4.1.2. Kesehatan

Data aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Singkawang tahun 2019-2023 yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah di Kota Singkawang dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	5,37	7,67	7,70	8,37	10,45
2.	Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup	993,02	992,23	992,03	991,63	989,55
3.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	7,2	7,91	7,96	9,48	11,58
4.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	5,8	6,43	6,90	5,30	6,78
5.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	96,34	98,93	159,36	111,60	56,51
6.	Rasio Posyandu per 100 Balita	0,70	0,79	0,79	0,67	0,79
7.	Rasio Puskesmas, poliklinik, puskesmas per 100.000 penduduk	0,25	0,25	0,25	0,29	0,29
8.	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,031	0,025	0,025	0,025	0,029
9.	Rasio Dokter persatuan penduduk	0,56	0,64	0,94	0,84	0,59
10.	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk	n/a	n/a	n/a	1,21	1,23
11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	78,00	60,56	71,22	52,95	57,54
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	88,60	85,88	88,04	72,45	81,90
13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	60,80	80	82,5	35,50	50,00
15.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0	40,21	44,17
16.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	41,65	29,79	13,64	24,6	30,3
17.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	70,00	88,00	63,00	65,50	91,4
18.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Penderita diare yang ditangani (%)	62,60	35,89	23,26	32,7	58,9

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
20.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	61,48	47,46	50,05	48,28	53,36
21.	Cakupan Puskesmas (%)	200	200	200	200	200
22.	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
23.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	96,30	90,68	89,97	75,74	80,38
24.	Cakupan pelayanan nifas (%)	85,20	82,23	86,03	70,62	79,73
25.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	51,20	43,27	52,04	40,40	47,79
26.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	42,80	37,58	24,80	22,26	27,76
27.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	75,29	97,33	100	99,60	100
28.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	98,60	3,88	22,65	41,00	89,4
29.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
30.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
31.	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2024

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarananya. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan dokter, tenaga medis/paramedis, puskesmas dan sarana/prasarana pada pusat pelayanan kesehatan.

Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Lokasi posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai karena idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita yang berguna untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Dokter dan Tenaga Medis di Kota Singkawang merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis menunjukkan

tingkat pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Singkawang.

Beberapa permasalahan di bidang kesehatan adalah meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). AKB memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023, terus meningkat dari 5,37% di tahun 2019 menjadi 10,45% di tahun 2023. Begitu pula AKBa, terus meningkat dari 7,20 di tahun 2019 menjadi 11,58 di tahun 2023. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) sendiri memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023, terus turun dari 993,02 di tahun 2019 menjadi 989,55 di tahun 2023.

Permasalahan selanjutnya adalah Angka Kematian Neonatal (AKN). AKN bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023. Sempat mencapai angka terendah di tahun 2022 (5,30), kembali naik menjadi 6,78 di tahun 2023.

Rasio Rumah Sakit perlu juga menjadi perhatian. Dalam periode 2019-2023, Rasio Rumah Sakit memiliki tren negatif, cenderung turun dari 0,031 di tahun 2019 menjadi 0,025 di tahun 2022, meskipun di tahun 2023 kembali naik menjadi 0,029. Rasio Rumah Sakit bergerak fluktuatif akibat pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah rumah sakit. Demikian pula Rasio Tenaga Kesehatan. Rasio Dokter dalam periode 2019-2021 memiliki tren positif, terus meningkat dari 0,56 menjadi 0,94. Namun, dalam periode 2021-2023 memiliki tren negatif, terus menurun (0,59 di tahun 2023). Rasio Tenaga Medis di tahun 2023 sebesar 1,23 naik sedikit dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,21. Sedangkan untuk periode 2019-2021, tidak tersedia data.

Indikator selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani. Indikator ini bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, mencapai angka terendah di tahun 2022 (52,95%), namun kembali naik menjadi 57,54% di tahun 2023. Begitu pula Cakupan Pertolongan Persalinan bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, mencapai angka terendah di tahun 2022 (72,45%), namun kembali naik di tahun 2023 (81,90%). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas yang juga merupakan dampak keterbatasan anggaran dalam pemenuhan dokter dan tenaga medis.

Permasalahan selanjutnya adalah Cakupan Imunisasi Campak Balita Di Bawah 1 Tahun yang memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023. Sempat mencapai angka tertinggi di tahun 2021 (82,50%), turun signifikan di tahun 2022 (35,50%), meski kembali naik di tahun 2023 (50%). Begitu pula Cakupan Balita Pneumonia dalam periode 2019-2023 memiliki tren negatif. Sempat mencapai angka terendah di tahun 2021 (13,64%), kembali naik di tahun 2022 (24,60%) dan 2023 (30,30%).

Cakupan Kunjungan Bayi sendiri bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, cenderung turun, dari 61,48% di tahun 2019 menjadi 53,36% di tahun 2023 (naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,28%). Cakupan Pelayanan Anak Balita dalam periode 2019-2022 memiliki tren negatif, terus turun dari tahun 2019 (42,80%) dan mencapai angka terendah di tahun 2022 (22,26%), meski kembali naik di tahun 2023 (27,76%).

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil dalam periode 2019-2022 memiliki tren negatif, terus turun dari 96,30% di tahun 2019 mencapai angka terendah di tahun 2022 (75,74%), meski kembali naik di tahun 2023 (80,38%). Untuk Cakupan Pelayanan Nifas dalam periode 2019-2022 memiliki tren negatif, cenderung turun dan mencapai angka terendah di tahun 2022 (70,62%) dibandingkan 96,30% di tahun 2019. Akan tetapi, angkanya kembali naik di tahun 2023 (79,73%). Sedangkan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi dalam periode 2019-2022 bergerak fluktuatif, cenderung turun dari tahun 2019 (51,20%) dan mencapai angka terendah di tahun 2022 (40,40%), meski kembali naik di tahun 2023 (47,79%).

AKB memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023, terus meningkat dari 5,37% di tahun 2019 menjadi 10,45% di tahun 2023. AKHB memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023, terus turun dari 993,02 di tahun 2019 menjadi 989,55 di tahun 2023.

AKBa memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023, terus meningkat dari 7,20 di tahun 2019 menjadi 11,58 di tahun 2023. AKN bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023. Sempat mencapai angka terendah di tahun 2022 (5,30), kembali naik menjadi 6,78 di tahun 2023.

AKI memiliki tren positif, cenderung turun dalam periode 2019-2023.

Meskipun sempat melonjak di tahun 2021 (159,36), kembali turun di tahun 2022 (111,60) dan 2023 (56,51). Rasio Posyandu bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, namun cenderung naik. Sempat mencapai angka terendah di tahun 2022 (0,67), kembali naik di tahun 2023 (0,79).

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu memiliki tren positif, cenderung naik, yakni 0,24 di tahun 2019 menjadi 0,29 di tahun 2023. Rasio Rumah Sakit dalam periode 2019-2022 memiliki tren negatif, cenderung turun. Dari 0,032 di tahun 2019 menjadi 0,025 di tahun 2022. Di tahun 2023 kembali naik menjadi 0,029.

Rasio Dokter dalam periode 2019-2021 memiliki tren positif, terus meningkat dari 0,55 menjadi 0,94. Namun, dalam periode 2021-2023 memiliki tren negatif, terus menurun, 0,59 di tahun 2023. Rasio Tenaga Medis di tahun 2023 sebesar 1,23 naik sedikit dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,21. Sedangkan untuk periode 2019-2021, tidak tersedia data.

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, mencapai angka terendah di tahun 2022 (52,95%), namun kembali naik menjadi 57,54% di tahun 2023. Cakupan Pertolongan Persalinan bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, mencapai angka terendah di tahun 2022 (72,45%), namun kembali naik di tahun 2023 (81,90%).

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan selalu 100% dalam periode 2019-2023. Hanya saja jumlah pelaporan Balita Gizi Buruk perlu diperhatikan. Cakupan Imunisasi Campak Balita Di Bawah 1 Tahun memiliki tren negatif dalam periode 2019-2023, sempat mencapai angka tertinggi di tahun 2021 (82,50%), turun signifikan di tahun 2022 (35,50%), meski kembali naik di tahun 2023 (50%).

Non-Polio AFP Rate di tahun 2023 (44,17) naik dibandingkan tahun 2022 (40,21). Sedangkan untuk periode 2019-2021 tidak tersedia data. Cakupan Balita Pneumonia dalam periode 2019-2023 memiliki tren negatif. Sempat mencapai angka terendah di tahun 2021 (13,64%), kembali naik di tahun 2022 (24,60%) dan 2023 (30,30%). Angka ini cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2018 (50,32%).

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC-BTA bergerak fluktuatif. Di tahun 2023 adalah sebesar 91,40%, naik signifikan

dibandingkan 2022 (65,50%). Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD dalam periode 2019-2023 selalu 100%.

Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani dalam periode 2019-2021 memiliki tren negatif, terus turun dari 62,60% di tahun 2019 menjadi 23,26% di tahun 2021. Akan tetapi, kembali naik di tahun 2022 (32,70%) dan 2023 (58,90%). Cakupan Kunjungan Bayi bergerak fluktuatif dalam periode 2019-2023, cenderung turun, dari 61,48% di tahun 2019 menjadi 53,36% di tahun 2023 (naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,28%).

Cakupan Puskesmas selalu 200% dalam periode 2019-2023. Cakupan Pustu selalu 69% dalam periode 2019-2023. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil dalam periode 2019-2022 memiliki tren negatif, terus turun dari 96,30% di tahun 2019 mencapai angka terendah di tahun 2022 (75,74%), meski kembali naik di tahun 2023 (80,38%).

Cakupan Pelayanan Nifas dalam periode 2019-2022 memiliki tren negatif, cenderung turun dan mencapai angka terendah di tahun 2022 (70,62%) dibandingkan 85,20% di tahun 2019. Akan tetapi, angkanya kembali naik di tahun 2023 (79,73%). Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi dalam periode 2019-2022 bergerak fluktuatif, cenderung turun dari tahun 2019 (51,20%) dan mencapai angka terendah di tahun 2022 (40,40%), meski kembali naik di tahun 2023 (47,79%).

Cakupan Pelayanan Anak Balita dalam periode 2019-2022 memiliki tren negatif, terus turun dari tahun 2019 (42,80%) dan mencapai angka terendah di tahun 2022 (22,26%), meski kembali naik di tahun 2023 (27,76%). Cakupan ASI Masyarakat Miskin memiliki tren positif, mencapai 100% di tahun 2023.

Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Tren dalam periode 2019-2023 bergerak fluktuatif. Turun signifikan di tahun 2020 (3,88%) akibat pandemi covid-19, kembali naik signifikan di tahun 2023 (89,40%). Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin selalu 100% dalam periode 2019-2023.

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 (RS) selalu 100% dalam periode 2019-2023. Cakupan Kelurahan KLB selalu 100% dalam periode 2019-2023.

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator pelayanan umum bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
A. Pekerjaan Umum						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	16,12	36	38,5	40,967	38,297
2.	Persentase jalan mantap	51,36	53,54	58,67	60,257	53,02
3.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk (km/jiwa)	0,20	0,20	0,18	3,592	0,18
4.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	16,12	36	38,5	40,967	38,30
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5m) (%)	1,82			1,95	1,65
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	5,17			9,87	0,80
7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	93,78	94,11	94,02	94,22	94,33
8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	8,98			4,622	4,08
9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	61,18	66,26	71,53	73,52	78,98
10.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	6,09	6,67	8,42	8,51	8,67
11.	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	45	50,29	50,29	64,27	65,06
12.	Rasio Jaringan Irigasi	0,02			0,54	0,79
13.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	39,74	39,17	40,9	49,08	50,25
14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan			73,17	49,08	50,24
15.	Luas kawasan genangan banjir	2.198 Ha	2.198 Ha	2047,0 1 Ha	2064,7 4 Ha	2046,6 7 Ha
B. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	62,29	59,30	58,29	42,47	42,47
2.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	4,8	1,7	0,7	99,64	99,64
3.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,80	0,75	0,75	0,42	0,42
4.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	57,55	57,65	57,68	57,71	57,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2024

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu. Luas wilayah Kota Singkawang yang sempit menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong proses

penataan lahan cukup efektif.

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dalam periode 2019-2023 bergerak fluktuatif. Sempat turun signifikan di tahun 2019 (16,12%), kembali naik di periode 2020-2022 (40,97% di tahun 2022), dan kembali turun di tahun 2023 (38,30%) meski tidak signifikan.

Persentase Jalan Mantap sebenarnya memiliki tren positif dalam periode 2019-2022, selalu naik (dari 51,36% di tahun 2019 menjadi 60,26% di tahun 2022). Akan tetapi, persentasenya kembali turun di tahun 2023 (53,02%).

Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Min. 1,5m) sempat mencapai angka tertinggi di tahun 2022 (1,95), namun, kemudian turun mencapai angka terendah di tahun 2023 (1,65). Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data.

Begitu pula Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai, sempat mencapai angka tertinggi di tahun 2022 (9,87), namun kemudian turun signifikan mencapai angka terendah di tahun 2023 (0,80). Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data.

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum tidak memiliki data dalam periode 2019-2020. Sedangkan untuk periode 2021-2023, proporsinya bergerak fluktuatif, turun signifikan di tahun 2022 (49,08%) dari tahun 2021 (73,17%), kembali naik di tahun 2023 (50,24%).

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik memiliki tren negatif, selalu turun, dari 62,29% di tahun 2019 menjadi 42,47% di tahun 2023.

Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya mengalami kenaikan hingga 98,94% di tahun 2022 yang diakibatkan adanya perubahan formula perhitungan berdasarkan RTRW Nomor 1 Tahun 2022.

Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan memiliki tren negatif, cenderung turun, dari 0,70 di tahun 2018 menjadi 0,42 di tahun 2023. Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data.

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dalam periode 2019-2023 bergerak fluktuatif. Sempat turun signifikan di tahun 2019 (16,12%), kembali naik di periode 2020-2022 (40,97% di tahun 2022), dan kembali turun di tahun 2023 (38,30%) meski tidak signifikan.

Persentase Jalan Mantap memiliki tren positif dalam periode 2019-2022, selalu naik (dari 51,36% di tahun 2019 menjadi 60,26% di tahun 2022). Akan tetapi, persentasenya kembali turun di tahun 2023 (53,02%). Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk sempat naik signifikan di tahun 2022 (3,59) dibanding tahun 2021 (0,18), namun kembali turun signifikan di tahun 2023 (0,18).

Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) dalam periode 2019-2023 bergerak fluktuatif. Sempat turun signifikan di tahun 2019 (16,12%), kembali naik di periode 2020-2022 (40,97% di tahun 2022), dan kembali turun di tahun 2023 (38,30%) meski tidak signifikan. Angka-angka pada indikator ini sama dengan angka-angka pada indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.

Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Min. 1,5m) sempat mencapai angka tertinggi di tahun 2022 (1,95), namun, kemudian turun mencapai angka terendah di tahun 2023 (1,65). Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data.

Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai sempat mencapai angka tertinggi di tahun 2022 (9,87), namun kemudian turun signifikan mencapai angka terendah di tahun 2023 (0,80). Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi memiliki tren positif, terus meningkat (kecuali pada tahun 2020), dari 93,78% di tahun 2019 menjadi 94,33% di tahun 2023. Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai memiliki tren positif, cenderung turun, dari 5,17 di tahun 2019 menjadi 4,08 di tahun 2023. Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data.

Persentase Drainase Baik memiliki tren positif, selalu naik, dari 61,18% di tahun 2019 menjadi 78,98% di tahun 2023. Persentase Pembangunan Turap memiliki tren positif, selalu naik, dari 6,09 di tahun 2019 menjadi 8,76 di tahun 2023. Persentase Irigasi Kota memiliki tren positif, cenderung naik, dari 45% di tahun 2019 menjadi 65,06 di tahun 2023. Rasio Jaringan Irigasi di tahun 2023 (0,79) naik dibandingkan 2022 (0,54). Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum memiliki tren positif, terus naik

(kecuali pada tahun 2019), dari 38,11% di tahun 2018 menjadi 50,25% di tahun 2023. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum tidak memiliki data dalam periode 2019-2020. Sedangkan untuk periode 2021-2023, proporsinya bergerak fluktuatif, turun signifikan di tahun 2022 (49,08%) dari tahun 2021 (73,17%), kembali naik di tahun 2023 (50,24%).

Luas Kawasan Genangan Banjir memiliki tren positif, cenderung turun, dari 2198 Ha di tahun 2019 menjadi 2046,67 di tahun 2023. Luasan RTH Publik memiliki tren negatif, selalu turun, dari 65,50% di tahun 2018 menjadi 42,47% di tahun 2023.

Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya mengalami kenaikan hingga 98,94% di tahun 2022 yang diakibatkan adanya perubahan formula perhitungan berdasarkan RTRW Nomor 1 Tahun 2022. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan memiliki tren negatif, cenderung turun, dari 0,80 di tahun 2019 menjadi 0,42 di tahun 2023. Di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia data. Ketaatan Terhadap RTRW memiliki tren positif, selalu naik dalam periode 2019-2023, dari 57,55% di tahun 2019 menjadi 57,78% di tahun 2023.

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi upaya penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Singkawang masih perlu untuk ditingkatkan. Berikut ini merupakan indikator pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio rumah layak huni	0,2060	0,2070	0,2072	0,2432	0,2138
2.	Rasio permukiman layak huni	0,9986	0,9987	0,9725	0,9757	0,9777
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	90,51	91,17	91,42	97,91	99,20
4.	Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%)	98,69	99,53	99,60	99,63	96,25
5.	Persentase permukiman yang tertata (%)	69,56	69,80	69,96	70,29	70,49
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,0225	0,0165	0,109	0,0957	0,08874
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%)	84,68	88,73	6,03	17,64	24,82
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	76,50	77,35	78,27	79,31	79,71
9.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	-	17,62	17,62	35,02	50,08

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2023

Rasio Rumah Layak Huni dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, selalu naik, dari 0,2060 di tahun 2019 menjadi 0,2138 di tahun 2023, meski kembali turun menjadi 0,2138 di tahun 2023. Cakupan Ketersediaan/Persentase Rumah Layak Huni sendiri memiliki tren positif, selalu naik, dari 90,51% di tahun 2019 menjadi 99,20% di tahun 2023. Untuk Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, selalu naik, dari 98,69% di tahun 2019 menjadi 99,63% di tahun 2022, meski kembali turun menjadi 96,25% di tahun 2023 akibat peningkatan jumlah penduduk miskin.

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh sempat naik signifikan di tahun 2021 (0,1090) dibandingkan tahun 2019 (0,0225). Akan tetapi, persentasenya kembali turun di tahun 2022 (0,0957) dan 2023 (0,0883). Persentase Luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Yang Ditangani turun signifikan di tahun 2021 (6,03%) dibandingkan tahun 2020 (88,73%). Hal ini merupakan dampak berubahnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Untuk periode 2021-2023 sendiri memiliki tren positif, selalu naik, menjadi 24,02% di tahun 2023.

Beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum adanya penyusunan dokumen database jumlah rumah,

Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan, perencanaan, pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni.

Rasio Rumah Layak Huni dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, selalu naik, dari 0,2060 di tahun 2019 menjadi 0,2138 di tahun 2023, meski kembali turun menjadi 0,2138 di tahun 2023. Rasio Permukiman Layak Huni dalam periode 2019-2023 bergerak fluktuatif, sempat turun signifikan dan mencapai angka terendah di tahun 2021 (0,9725), kembali naik di tahun 2022 (0,9757) dan 2023 (0,9775).

Cakupan Ketersediaan/Persentase Rumah Layak Huni memiliki tren positif, selalu naik, dari 90,51% di tahun 2019 menjadi 99,20% di tahun 2023. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, selalu naik, dari 98,69% di tahun 2019 menjadi 99,63% di tahun 2022, meski kembali turun menjadi 96,25% di tahun 2023 akibat peningkatan jumlah penduduk miskin.

Persentase Permukiman Yang Tertata memiliki tren positif, selalu naik, dari 69,56% di tahun 2019 menjadi 70,47% di tahun 2023. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh sempat naik signifikan di tahun 2021 (0,1090). Akan tetapi, persentasenya kembali turun di tahun 2022 (0,0957) dan 2023 (0,0883).

Persentase Luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Yang Ditangani turun signifikan di tahun 2021 (6,03%) dibandingkan tahun 2020 (88,73%). Hal ini merupakan dampak berubahnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Untuk periode 2021-2023 sendiri memiliki tren positif, selalu naik, menjadi 24,02% di tahun 2023.

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Dengan PSU memiliki tren positif, selalu naik, dari 76,50% di tahun 2019 menjadi 79,71% di tahun 2023. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha di Kab./Kota Yang Ditangani memiliki tren positif, cenderung naik, dari 17,62% di tahun 2020 menjadi 46,54% di tahun 2023.

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode 2019-2023 rata-rata mengalami peningkatan pada cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dan tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 100%. Gambaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	100	100	100	100	100
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	90	90	100	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	90	100	100	100	100
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	70,50	75	100	90,48	69,23
5.	Persentase penegakan Perda	100	90	90	100	100
6.	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	85	90	90	100	100
7.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani (%)	100	95	95	100	100
8.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk	3,2	3,3	3,3	3,5	2,64
9.	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,9	0,9	0,9	0,9	2,4

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, 2024

Tingkat Waktu Tanggap Daerah WMK sempat mencapai 100% di tahun 2021. Akan tetapi, turun menjadi 90,48% di tahun 2022 dan kembali turun signifikan menjadi 69,23% di tahun 2023. Hal ini dikarenakan untuk Tingkat Waktu Tanggap maksimal 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi tergantung faktor jarak, kepastian laporan dan kesiapan anggota.

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Singkawang sudah cukup baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Kota Singkawang cukup kondusif antara lain penurunan jumlah pelanggaran perda, penegakan perda, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) serta beberapa indikator lainnya.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 telah mencapai 100% di tahun 2022 dan 2023. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran telah mencapai 100% di periode 2020-2023.

Tingkat Waktu Tanggap Daerah WMK sempat mencapai 100% di tahun 2021. Akan tetapi, turun menjadi 90,48% di tahun 2022 dan kembali turun signifikan menjadi 69,23% di tahun 2023. Hal ini dikarenakan untuk Tingkat Waktu Tanggap maksimal 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi tergantung faktor jarak, kepastian laporan dan kesiapan anggota.

Persentase Penegakan Perda telah 100% di tahun 2022 dan 2023. Persentase Pelanggaran Perda Yang Ditindak telah 100% di tahun 2022 dan 2023. Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Yang Ditindak telah 100% di tahun 2022 dan 2023.

Rasio Personil Satpol PP dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, cenderung naik, dari 2019 (3,2) sampai tahun 2022 (3,5). Namun di tahun 2023 turun menjadi 2,64. Perbedaan ini disebabkan adanya personil yang dimutasi dan pensiun serta perubahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat selalu 0,9 dalam periode 2019-2022. Di tahun 2023, mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 2,40 dikarenakan adanya pengukuhan anggota Satlinmas yang baru pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Pj. Wali Kota Singkawang serta perubahan jumlah anggota Satlinmas yang semula berjumlah 651 orang menjadi 1408 orang.

2.4.1.6. Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode 2019-2023 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tertangani (%)	67,95	69,94	70,19	96,17	88,98
2.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
3.	Persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)	12,60	22,89	22,95	8,20	18,53
4.	Persentase rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)	24,10	34,72	34,74	3,25	19,01
5.	Persentase rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	36,94	40	40,08	21,51	31,46
6.	Persentase rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	66,67	100	100	100	100
7.	Persentase perlindungan dan jaminan sosial melampaui pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100
8.	Persentase penanganan kemiskinan dalam sesuai pemenuhan kebutuhan dasar (%)	77,57	79,65	81,15	70,87	96,81
9.	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial malampaui (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2024

Persentase PPKS Yang Tertangani dalam periode 2019-2022 memiliki tren positif, selalu naik, dari 67,95% di tahun 2019 menjadi 96,17% di tahun 2022, meski kembali turun menjadi 88,98% di tahun 2023.

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar, dan Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam periode 2019-2023 memiliki tren fluktuatif.

Persentase Penanganan Kemiskinan dalam periode 2019-2022 bergerak fluktuatif, cenderung turun dan mencapai angka terendah di tahun 2022 sebesar 70,87% (sesuai dengan persentase kemiskinan yang meningkat). Persentasenya kembali naik di tahun 2023 menjadi 96,81%.

Secara umum, aspek pelayanan umum dalam bidang sosial selama periode 2019-2023 cenderung fluktuatif. Terkait permasalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2017-2019 dapat disampaikan pada berikut ini.

Tabel 2.14
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (per 1.000)	43,00	20,00	13,00
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	25,58	55,00	23,08
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	36,10	8,14	19,68
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	29,96	n/a	0,10
5.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0,77	0,00	9,09
6.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	18,97	0,00	37,70
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100,00	0,00	100,00
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100,00	0,00	100,00
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0,00	0,00	100,00
10.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	283,17	306,82	321,40

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2020

Terjadi penurunan angka sengketa pengusaha-pekerja hingga 69,78% sd tahun 2019. Sementara itu jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama sempat mengalami kenaikan di tahun 2018 hingga 55% namun akhirnya menurun di tahun 2019 menjadi 23,08%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar ditempatkan mengalami penurunan signifikan dari tahun 2017 ke 2018 dan mengalami kenaikan hampir 100% dari tahun 2018 ke 2019, sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan kenaikan secara perlahan. Perubahan mencolok terlihat dari adanya kenaikan signifikan hampir 9 kali lipat terhadap pelaksanaan pemeriksaan di perusahaan dari tahun 2017 ke 2019.

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek serius dalam pembangunan manusia. Permasalahan

pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks karena dianggap sebagai salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Gambaran kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang selama periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	6,12	10,98	10,81	12,55	15,62
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	11,88	n/a	13,76	10,30	6,78
4.	Rasio KDRT (%)	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	10,96	19,42	19,04	52,72	48,41
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	96,96
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	97,67	-
8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	-
9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	62,96	100	89,66	76,09	-
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	67,50	100,00	89,66	76,09	-
11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100	-
12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	65,52	100,00	100,00	100	-

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Pada tabel di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023. Secara keseluruhan, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat sebesar 52,86% sd tahun 2022, berbanding terbalik dengan partisipasi perempuan di lembaga swasta yang menurun hingga 37,76%. Partisipasi angkatan kerja perempuan dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan tingkat fluktuasi yang hampir sama, mengalami penurunan di tahun 2019 dan

2021 namun meningkat kembali di tahun 2022. Selanjutnya terjadi peningkatan sebesar 77,32% terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2022. Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,33% dari tahun sebelumnya atau meningkat dan selanjutnya cenderung tetap sd tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kapasitas dan kesadaran perempuan dalam kegiatan politik. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 13,76%.

Pencapaian 100% terjadi pada Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dan Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Berdasarkan data diatas, persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Singkawang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi, advokasi dan edukasi dalam membangun rumah tangga yang sehat, sehingga pemerintah mampu menekan angka kekerasan.

2.4.2.3. Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pangan salah satunya ditunjukkan dengan angka ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh penduduk (per kapita) pada suatu daerah dalam satu tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, ketersediaan pangan utama Kota Singkawang mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 yakni 457,25 dan mengalami penurunan mulai tahun 2022 hingga pada tahun 2023 menjadi 381,74 kg/kapita/tahun. Untuk ketersediaan energi didapatkan bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan mulai tahun 2019 yakni sebesar 1.438 menjadi 2.148 di tahun 2023. Sedangkan untuk ketersediaan protein, terjadi penurunan mulai tahun 2022 yakni sebesar 84,56 dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 77,7 dimana pada tahun 2021 Ketersediaan protein mencapai 95,52.

Tabel 2.16
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	375,63	435,48	457,25	396,05	381,74
2.	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	1.438	1.747	1.834,35	2.234	2.148
3.	Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	63,70	90,89	95,52	84,56	77,7

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2024

2.4.2.4. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.17
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	59,58	61,26	51,10	62,92	64
2.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100,00	100,00	n/a	n/a	-

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2024

Persentase luas lahan/tanah bersertifikat cenderung meningkat. Hanya di tahun 2021 yang sempat terjadi penurunan. Perhitungan Persentase Luas Lahan/Tanah Bersertifikat dari Total Luasan Tanah yang sudah bersertifikat sebesar 320.327.374 (M²) dibanding dengan Total Luas Kota Singkawang sebesar 504.000.000 (M²) x 100%.

Persentase penyelesaian kasus tanah negara sudah 100% baik. Hanya di tahun 2018 yang tidak diketahui datanya. Kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar/diteruskan dari instansi pemerintah/perangkat daerah lainnya ke Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan khususnya pada Bidang Pertanahan, pada tahun 2023 terdapat kasus sejumlah 1 kasus yang terdaftar ataupun diteruskan dari instansi pemerintah daerah lainnya/lintas OPD untuk berkoordinasi bersama pada bidang pertanahan agar kasus tersebut ditindaklanjuti untuk ditangani/diselesaikan dengan upaya fasilitasi mediasi. Berkaitan dengan hal ini dalam perhitungan penanganan Kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan dilihat dari Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/fasilitasi dibanding dengan Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%.

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

Gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana ditampilkan tabel berikut :

Tabel 2.18
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	ada	ada	tidak ada	tidak ada	ada
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air:	83,33	80,00	58,00	61,67	58,33
	a. Sungai Hangmoy	21,67	20			
	b. Sungai Singkawang	20	20			
	d. Sungai Sedau	20	20			
5.	Indeks kualitas udara (%)	88,89	85,85	87,77	87,22	89,65
6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota (%)	101,62	52,63	103	126,27	9,85
7.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh	71,00	100,00	100,00	100,00	100

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota					
9.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	20.043,28	25.373,44	17.965,26	25.882,88	27.061,10
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	49,27	37,20	41,88	75,46	77,73
11.	Indeks tutupan lahan (%)	26,62	30,21	33,80	34,42	38,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2024

Berdasarkan data di atas, keempat sungai yang dipantau kualitasnya menunjukkan kecenderungan peningkatan kualitas. Kualitas udara di Kota Singkawang dalam 5 tahun terakhir cenderung stabil, sementara tutupan lahan menunjukkan peningkatan hingga 4,25% di tahun 2023.

Upaya penanganan sampah relatif stabil namun lebih mengarah pada penurunan. Persentase penanganan sampah maupun TPS per satuan penduduk cenderung tetap. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga dan sarana pengelola kebersihan di Kota Singkawang relatif tetap, sementara jumlah penduduk dan produksi sampah terus meningkat. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan armada pengangkutan sampah mengingat jumlah penduduk terus meningkat.

Dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan maka dilakukan penataan kawasan permukiman dan pengawasan pencemaran. Dalam hal ini diupayakan semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum lingkungan.

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil selama 2019-2023 dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,91	0,98	0,98	0,98	0,97
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,92	0,96	0,98	0,85	0,98
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,36	0,43	0,49	0,53	0,56

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	91,00	98,03	98,58	98,78	97,15
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	92,00	88,69	89,16	93,21	95,75

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2024

Dari tabel di atas, semua indikator menunjukkan tren yang semakin meningkat secara perlahan setiap tahunnya, kecuali Rasio bayi berakte kelahiran yang menurun dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 13,26% dan naik kembali di tahun 2023 menjadi 0,98%. Sd tahun 2022, hampir semua penduduk ber KTP, terlihat bahwa rasio penduduk ber-KTP terus meningkat mencapai angka 0,98 dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2020-2022, namun turun pada tahun 2023 menjadi 0,97%. Selanjutnya, meskipun menunjukkan kecenderungan nilai yang meningkat, namun rasio pasangan berakte nikah sd tahun 2022 masih di bawah 0,5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan progres yang semakin meningkat dalam 5 th terakhir, dengan cakupan sebesar 98,78% sd tahun 2023. Sementara itu cakupan penerbitan akta kelahiran menunjukkan fluktuatif dari tahun 2019-2023. Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi penduduk yang melanggar administrasi kependudukan.

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak 2019 semua kelompok PKK didorong terus sehingga semuanya aktif kembali dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi balita juga aktif semuanya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di Kota Singkawang selama periode 2019-2023 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelurahan Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	81,25	100	100	100	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	96,88	100	100	100	100
3.	Persentase LSM aktif (%)	50,00	100	100	100	100
4.	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2024

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama periode 2019-2023 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,03	1,95	1,61	1,55	1,60
2.	Rasio akseptor KB (%)	56,39	n/a	n/a	67,58	53,65
3.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	43,47	n/a	n/a	17,56	20,13
4.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0	0	0	60	60
5.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	6,3	7,2	8,3	8,34	100
6.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	n/a	100	100	53,85	100
7.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan (%)	100	100	100	100	100
8.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	n/a	n/a	58,76	59,07
9.	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	n/a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2024

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) mengalami penurunan sejak tahun 2020 dari 1,95% menjadi 1,67% di tahun 2023. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB cenderung stabil.

Data Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mulai ada sejak tahun 2022 dan menurun di tahun 2023 dengan persentase 16,5%. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan sejak tahun 2019 hingga saat ini belum tersedia.

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa setiap tahun mengalami peningkatan dari 6,3% di tahun 2019 hingga di tahun 2023 mencapai 8,34%. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk sudah baik dengan persentase mencapai 100% setiap tahun.

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan sudah baik dengan rasio 100% setiap tahunnya. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sudah baik dengan persentase mencapai 100% setiap tahun.

Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan sudah baik dengan persentase mencapai 100% setiap tahun.

2.4.2.9. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Singkawang tahun 2019-2023 dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.22
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	36.159	5.986	12.559	15.113	21.244
2.	Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum	231	285	277	330	265
4.	Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2
5.	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2
6.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,060	0,084	0,040	0,060	0,17
7.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	94%	100%	100%	79%	82%
8.	Pemasangan rambu-rambu (%)	90%	70%	0%	25%	0%
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,08	0,0058	0,0058	0,0061	n/a
10.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	36.159	5.986	12.559	15.113	21.244
11.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (ton)	36.159	5.986	12.559	15.113	n/a
12.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	36.159	5.986	12.559	15.113	21.244
13.	Jumlah Bandar Udara	n/a	1	1	1	1
14.	Rasio panjang kota yang mendapatkan penerangan	n/a	41,50	41,90	42,7	50,6

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Singkawang, 2024

Berdasarkan hasil realisasi capaian aspek pelayanan umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang tahun 2019-2023 beberapa diantaranya mengalami kenaikan dan penurunan capaian. Adapun untuk realisasi pada poin 9 (Sembilan) dan 11 (sebelas) masih nihil karena belum memperoleh data yang dibutuhkan.

Jumlah arus penumpang angkutan umum di tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Rasio izin trayek sejak tahun 2018 hingga 2022 belum tersedia.

Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak signifikan. Jumlah Pelabuhan Laut sejak 2019 hingga 2022 tidak ada penambahan. Jumlah Terminal Bis sejak 2019 hingga 2022 tidak ada penambahan.

Persentase layanan angkutan darat mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2023 dari tahun-tahun sebelumnya. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan.

Pemasangan rambu-rambu mengalami penurunan dari 90% di tahun 2019 menjadi 0% di tahun 2023. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak signifikan. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan pada

tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga di tahun 2023 mencapai 21.244.

Jumlah barang melalui dermaga per tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak signifikan. Jumlah orang melalui terminal per tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak signifikan. Jumlah Bandar Udara sejak tahun 2020 tidak ada penambahan. Rasio panjang kota yang mendapatkan penerangan cenderung meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023.

2.4.2.10. Komunikasi dan Informasi

Gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komunikasi Publik (%)	84,09	85,47	86,33	87,05	87,17
2	Persentase penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam pelayanan publik (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase terpenuhinya infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) penunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Singkawang (%)	89	100	100	100	100
4	Persentase terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang (%)	75	75	100	100	100
5	Persentase jumlah <i>upload</i> berita dan informasi melalui <i>website</i> , media cetak, media elektronik dan sosial (%)	50	60	70	80	90
6	Persentase penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan (%)	20	35	50	65	70
7	Cakupan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui PPID Kota Singkawang (%)	20	35	50	65	75
8	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	35	55	20	0	0
9	Persentase peningkatan SDM persandian (%)	0	10	10	20	20
10	Cakupan tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah (%)	0	10	31,25	51,25	70,31

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komunikasi Publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam pelayanan publik sudah baik dengan persentase

100% sejak tahun 2019 hingga 2023. Persentase terpenuhinya infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) penunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Singkawang semakin membaik sejak tahun 2020 hingga 2023 yaitu mencapai 100%.

Persentase terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang semakin membaik sejak tahun 2021 hingga 2023 yaitu mencapai 100%. Persentase jumlah upload berita dan informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Persentase penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Cakupan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui PPID Kota Singkawang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan cenderung menurun sejak tahun 2021. Persentase peningkatan SDM persandian mengalami peningkatan secara. Cakupan tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah cenderung meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023.

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase koperasi aktif (%)	64	65,38	74,29	75,23	79,04
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	98,72	99,74	99,76	99,77	99,78
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	97,21	97,04	99,96	99,96	99,96

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2024

Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 64% menjadi 79,04% di tahun 2023. Persentase UKM non BPR/LKM aktif mengalami peningkatan dari 98,72% pada tahun 2019 menjadi 99,78% di tahun

2023. Begitu juga untuk Persentase Usaha Mikro dan Kecil mengalami peningkatan pada tahun dari 97,21 di tahun 2019 menjadi 99,96% di tahun 2023.

2.4.2.12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2019-2023 pada setiap indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.25
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	366	255	2.720	2.474	170
2	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Miliar Rp.)	505,7	830,28	610,36	651,89	140,57
3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	3,4	6,39	3,11	2,48	4,42
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	395,13	324,58	219,92	41,53	78,9

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2024

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 2.720 namun mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2023 dengan jumlah 170.

Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 830,28 milyar rupiah kemudian menurun hingga 140,57 miliar rupiah pada tahun 2023.

Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 830,28 milyar rupiah kemudian menurun hingga 140,57 miliar rupiah pada tahun 2023. Nilai realisasi PMDN masih mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2023.

2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2019-2023 dapat disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.26
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75,00	70,00	75,00	79,4	41
2.	Persentase wirausaha muda (%)	n/a	n/a	0,59	98,06	99,29
3.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	58	0	10	76	28
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	53,68	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	80	n/a	n/a	89,4	71,43
6.	Jumlah atlet berprestasi	11	0	3	140	37
7.	Jumlah prestasi olahraga	5	0	3	38	9

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2024

Secara umum terjadi penurunan dalam urusan kepemudaan dan olahraga dari tahun 2020-2021, hal ini terjadi karena adanya wabah pandemi Covid-19, yang membuat kegiatan kepemudaan dan olahraga dibatalkan atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.

2.4.2.14. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2019-2023 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2024

Dari tabel urusan statistik di atas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik tersedia dari tahun 2019-2023. Data-data tersebut di update sesuai perkembangan dan kebutuhan. Namun untuk sistem data dan statistik yang terintegrasi pada tahun 2019 masih belum terbangun.

2.4.2.15. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Singkawang dalam lima tahun terakhir (2019-2023) cenderung fluktuatif. Sementara untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi menunjukkan kenaikan yang sangat pesat. Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2019-2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali/tahun)	5	2	1	3	3
2.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	73.2	80.33	81.3	74.23	91.28
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	14	64	64	136	145
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2024

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam rentang waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 s/d 2021 kemudian naik kembali di angka yang sama pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan jumlah karya budaya yang direvitalisasikan dan diinventarisasikan, yang setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2023, sedangkan untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dalam rentang lima tahun terakhir masih tetap di angka 1.

2.4.2.16. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2019-2023 melalui beberapa indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	17,932	9,016	9,196	15,998	17,386
2.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	36,440	36,440	37,050	37,310	44,563
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0.83	1.09	1.08	1.2	1.45
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	1,494	751	766	1,333	17,388
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9,738	9,738	10,460	10,282	22,281
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	5	5	5	6	8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dalam rentang waktu enam tahun terakhir, jumlah pengunjung paling sedikit terjadi di tahun 2020 dan 2021, dikarenakan terjadi pandemi covid-19. Namun dengan kebijakan Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menambah jumlah koleksi buku, koleksi judul buku dan jumlah perpustakaan, serta pustakawan, tenaga teknis, dan penilai untuk menunjang sarana dan prasarana di perpustakaan menghasilkan peningkatan jumlah pengunjung di tahun 2022 dan semakin meningkat di tahun 2023.

2.4.2.17. Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode 2019-2023 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.30
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	72.41	62.07	79.31	60.51	75.86
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	58	0	58	58	59

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah persentase Perangkat Daerah

yang mengelola arsip secara baku dalam rentang waktu enam tahun terakhir cenderung fluktuatif, jumlah terendah terjadi di tahun 2022 sedangkan jumlah tertinggi di tahun 2021. Sedangkan SDM pengelola kearsipan tidak mengalami kenaikan yang signifikan bahkan di tahun 2020 jumlah pengelola kearsipan per kegiatan nihil.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nilai Produksi Perikanan	153.233	130.447	152.184	146.780	155.205
2.	Nilai Produksi Perikanan Laut	102.282	77.158	93 430	91 148	99.561
3.	Nilai Produksi Perikanan Umum	3.974	4.095	3 990	3 061	2.694
4.	Nilai Produksi Perikanan budidaya	46.976	49.193	54 763	52 570	52.949

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2024

Secara total, nilai produksi perikanan Kota Singkawang Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari tahun 2019, nilai produksi perikanan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 nilai produksi perikanan sebesar 153.233 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 155.205 miliar rupiah.

Tabel 2.32
Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya
di Kota Singkawang (ton) Tahun 2019-2023

No	Nilai Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Laut	4.213	3.283	3.605	3.065	3.169
2	Perikanan Umum	72,60	79,91	70,92	68,48	48,96
3	Perikanan Budidaya	1.910	1.713	1.973	1.908	1.927
Jumlah		6.196	5.076	5.650	5.042	5.146

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2024

Secara umum, jumlah produksi perikanan laut mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2019 produksi perikanan laut sebesar 4.213 ton, dan pada tahun 2023 hanya mencapai 3.169 ton.

Untuk jumlah produksi perikanan umum, pada tahun 2019 mencapai 72,60 ton, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2023 yang hanya mencapai 48,96 ton.

Sedangkan Pada perikanan budidaya, produksinya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 produksinya sebesar 1.910 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 yakni menjadi 1.927 ton.

Disimpulkan bahwa jumlah produksi perikanan mengalami penurunan yang cukup besar hingga mencapai 1.050 ton dari 6.196 ton pada tahun 2019 menjadi 5.146 ton di tahun 2023

2.4.3.2. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2019-2023 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	722.853	529.647	642.114	1.008.607	1.661.739
2.	Lama kunjungan wisata	2,2	0,33	2	2,09	2,73
3.	PAD sektor pariwisata (%)	10,36	7,84	7,62	9,77	9,89
4.	Cakupan Ekonomi Kreatif (%)	75	100	100	100	22,46

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2024

Kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2022, dikarenakan berakhirnya kondisi Pandemi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kontribusi PAD sektor pariwisata didekati dengan PAD yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Kontribusi PAD sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang masih relatif kecil terhadap total PAD.

Terjadi kenaikan dan penurunan jumlah pengunjung wisata pada 5 tahun terakhir. Jumlah tertinggi kunjungan wisata terjadi di tahun 2023 dengan jumlah 1.661.739, sedangkan kunjungan terendah terjadi pada 2020 dengan angka

529.627. Lama kunjungan wisata terjadi kenaikan di tahun 2023 yaitu yang semula pada data 2020 sejumlah 0.33, menjadi 2,73.

Jumlah kunjungan wisata dan lama kunjungan wisata sangat berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang pada tahun 2019 Sebesar 10,36%, mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 sebesar 2,74% menjadi 7,62%. Dan kembali meningkat di tahun 2022-2023 menjadi 9,89%.

Cakupan ekonomi kreatif dapat dilihat bahwa di tahun 2019 jumlah kelompok ekonomi kreatif di Kota Singkawang berada di angka 75 % lalu berangsur naik di tahun 2020-2022 sebesar 100% dan turun kembali di tahun 2023 menjadi 22,46%.

Disimpulkan bahwa jumlah tertinggi kunjungan wisata dan lama kunjungan wisata terjadi di tahun 2022 dikarenakan berakhirnya kondisi Pandemi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berpengaruh pada meningkatnya PAD daerah.

2.4.3.3. Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2019-2023 secara ringkas tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	11,34	11,86	11,89	11,82	11,32
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	33,76	38,72	38,05	37,69	36,22
3.	Cakupan bina kelompok petani (%)	13	13	13,4	20	20

Dinas PKPP Kota Singkawang, Tahun 2022 dan KDA Kota Singkawang 2024

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%) pada 5 tahun terakhir terjadi penurunan terlebih lagi pada tahun 2023. Di Angka terendah yaitu 11.89 % di tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11.32%. Pada skala Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas yakni 33,76 pada tahun 2019 menjadi 36,22 pada tahun 2023. Pada Cakupan

bina kelompok petani, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2023 yaitu sebanyak 20%.

2.4.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral periode 2019-2023 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase RT yang menggunakan listrik (%)	97,86	99,51	98,76	99,45	99,21
2.	Jumlah Pelanggan PDAM	17.404	18.681	19.774	23.248	23.822

Sumber: BPS Kota Singkawang 2024

Secara umum, rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya dan hampir mendekati capaian 100% pada tahun 2023. Untuk sektor air minum, jumlah pelanggan PDAM setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 jumlah pelanggannya berjumlah 17.404 dan menjadi 23.822 di tahun 2023.

2.4.3.5. Perdagangan

Jumlah kelompok pedagang / usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemda mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Hanya di tahun 2020-2021 yang tetap. Untuk jumlah kelompok pedagang / usaha informal juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 yang lebih tinggi bertambah menjadi 20 kelompok dikarenakan semakin bertambahnya jumlah PKL di Kota Singkawang. Fenomena meningkatnya jumlah PKL di Kota Singkawang dilatarbelakangi dari banyaknya perusahaan swasta yang memutuskan hubungan kerja.

Untuk cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022. Sedangkan 2023 mengalami penurunan menjadi 85% dari tahun sebelumnya, dikarenakan bertambahnya kelompok

pedagang / usaha yang dibina dan beragam usaha yang dibina, sehingga tidak optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	8	12	12	13	14
2.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	13	13	13	14	20
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	65,54	92,3	92,3	92,8	85

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2024

2.4.3.6. Perindustrian

Peningkatan pengrajin yang mendapat bantuan binaan Pemda dikarenakan sasaran salah satu kegiatan adalah pembinaan yang difokuskan khusus IKM kerajinan. Terjadi penambahan kelompok pengrajin Kota Singkawang sebanyak 4 kelompok IKM Tahun 2023. Kelompok dibentuk dikarenakan persyaratan untuk menerima bantuan berupa sarana dan prasarana bagi IKM harus berupa kelompok.

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2023 sebesar 41,67% dapat ditingkatkan lagi tahun depan (walaupun telah ada kenaikan dari tahun 2022 sebesar 1,67%) hingga diatas 80% karena memanfaatkan momen open setelah pandemi covid-19, kegiatan usaha IKM kerajinan ini yang paling berdampak besar akibat keluar masuk wisatawan yang ditutup. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	5	4	4	8	10
2.	Jumlah kelompok pengrajin	6	20	20	20	24
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	83,33	20	20	40	41,67

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2024

2.4.4. Penunjang Urusan

2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Singkawang secara rutin melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk penyusunan RKPD Kota Singkawang tahun 2023 mengacu pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang dikomparasikan dengan usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat Kota Singkawang dan pokok-pokok pikiran DPRD. Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota setiap tahun. Gambaran pelayanan umum dalam bidang perencanaan pembangunan dapat disampaikan berikut ini.

Tabel 2.38
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, 2023

Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dari Tahun 2019 s.d Tahun 2023 mencapai 100%. Persentase Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD dari Tahun 2019 s.d Tahun 2023 sudah mencapai 100%.

2.4.4.2. Keuangan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan keuangan periode 2019-2023 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD (Penerimaan Daerah) (%)	4,49	9,30	4,99	13,87	
3.	Persentase belanja pendidikan (%)	24,90	20,79	22,84	23,46	
4.	Persentase belanja kesehatan (%)	30,37	47,07	12,35	27,69	
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	59,34:40,65	n/a	n/a	n/a	
6.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, 2024

Persentase SILPA terhadap APBD (penerimaan Daerah) di tahun 2019 mencapai 4,49%, di tahun 2020 naik menjadi 9,30% dan terus naik di tahun 2022 menjadi 13,87% di tahun 2022.

Persentase belanja kesehatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, persentase naik dari 24,6% sampai 47,07%, di tahun 2021 persentase belanja kesehatan menurun menjadi 12,35% dan pada tahun 2022 persentase belanja kesehatan naik menjadi 27,69%.

Persentase belanja pendidikan di tahun 2019 mencapai 24,9%, di tahun 2020 persentase belanja kesehatan persentase menurun menjadi 20,79%, pada tahun 2021 persentase belanja pendidikan naik menjadi 22,84%, sampai tahun 2022 persentase terus naik sampai 23,46%.

2.4.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan periode 2019-2023 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	4.69	25.5	39.7	42.23	40.7
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	5.55	2.58	4.28	3.54	5.93
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	49.54	89.22	36.6	58.38	39.43
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	21	24	28	27	23
5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	1,345	1,475	1,411	1,063	1,133
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	1,997	1,997	1,877	2,069	1,898

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, 2024

Rata-rata pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan rasio kenaikan dari tahun 2019-2022 mencapai 42,23%, dan mengalami penurunan rasio di tahun 2023 menjadi 40,7%. Presentasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami penurunan dari tahun 2019 s.d 2022, 5,55% di tahun 2019 menurun menjadi 3,54% di tahun 2022, rasio persentase naik di tahun 2023 mencapai 5,93%.

Banyaknya ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 mencapai 49,54%, dan persentase menurun di tahun 2023 menjadi 39,43%. Rasio jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah meningkat dari tahun 2019 mencapai 21 orang, di tahun 2021 persentase meningkat mencapai 28 orang, dan berkurang menjadi 27 orang di tahun 2022, di tahun 2023 angka menurun menjadi 23 orang.

Di tahun 2019 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah ada 1.345 orang, sampai dengan tahun 2022 jumlah jabatan di instansi pemerintah menurun menjadi 1.063 orang, di tahun 2023 jumlah naik menjadi 1.133 orang. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2019 terdapat 1.997 orang sampai di tahun 2020 jumlah menetap, dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 1.877 orang, jumlah orang naik

sampai 2.069 di tahun 2022. jumlah menurun di tahun 2023 menjadi 1.898 orang.

2.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan penelitian dan pengembangan periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	0
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50,00	12,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	3,45	24,14	0	13,79	6,89
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	0	0	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, 2023

Persentase implementasi rencana kelitbangan di tahun 2018, mencapai 100%, angka persentase menetap 100% sampai tahun 2021. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah rasio tidak stabil sampai tahun 2022 mengalami penurunan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2018 mencapai 50%, angka menurun menjadi 12% di tahun 2019, di Tahun 2020 angka persentase naik menjadi 100% dan angka tetap bertahan di 100% sampai tahun 2022. Pada tahun 2018 sampai tahun 2022 angka persentase kebijakan inovasi yang diterapkan masih 0%, sampai di tahun 2021 angka persentase naik menjadi 100% dan angka tetap 100% di tahun 2022.

2.4.4.5. Pengawasan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan pengawasan periode 2018-2023 terjadi peningkatan pada masing-masing indikator. Gambaran pengawasan di Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK	292	307	324	337	350
2.	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	716	756	799	835	875
3.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	88.12	89.68	90.99	92.22	89.37
4.	Maturasi SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Singkawang, 2024

Pada tahun 2019 jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK mencapai angka 292, angka tersebut terus naik sampai sampai di tahun 2023 mencapai 350. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2019 mencapai angka 716, dan angka terus naik sampai tahun 2023 menjadi 875. Pada tahun 2019, angka persentase tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK mencapai 88,12% sampai dengan tahun 2022 mencapai 92,22%, di tahun 2023 angka menjadi 89,37%. Maturasi SPIP dari tahun 2019-2023 pada level 3.

2.4.4.6. Sekretariat Dewan

Setiap tahun Sekretariat DPRD secara rutin melakukan rencana kerja tahunan baik pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Singkawang maupun pada program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga kegiatan anggota DPRD, Rapat Kerja antara Eksekutif dan Legislatif dapat terlaksana. Gambaran ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sekretariat Dewan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Singkawang, 2024

2.4.5. Indeks Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Indeks Reformasi Birokrasi
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	54,22	55,65	60,16	63,37	76,49

Sumber: KemenPan RB, 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Pada tahun 2019 dan 2020, Indeks RB Pemerintah Kota Singkawang masuk dalam kategori “Cukup (CC)” dengan perolehan nilai sebesar 54,22 dan 55,65. Pada tahun 2021 dan 2022, Indeks RB Pemerintah Kota Singkawang meningkat dan masuk dalam kategori “Cukup Baik (B)” dengan perolehan nilai sebesar 60,16 dan 63,37. Di tahun 2023, Kota Singkawang berhasil memperoleh nilai sebesar 76,49 dengan kategori “Baik (BB)”.

Tabel 2.45
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai SAKIP	60,02	60,63	61,86	62,88	62,29
2.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Sumber: KemenPan RB, 2024

Nilai SAKIP dari tahun 2019-2023 cenderung naik. Hanya pada tahun 2023 yang sedikit mengalami penurunan sebesar 0,59%. Namun masih masuk kategori “B” dalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja. Nilai SAKIP pada tahun 2019-2021

berfokus pada perbaikan manajemen kinerja dalam suatu instansi pemerintah. Mulai dari Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%), dan Capaian Kinerja (20%). Sedangkan pada tahun 2022-2023 mulai dari Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%).

Nilai Evaluasi SAKIP Kota Singkawang pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Kualitas RPD yang disusun mengalami penurunan dibandingkan dengan RPJMD periode terakhir. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan rumusan kinerja yang belum berorientasi pada hasil yang sesuai dengan jenjang levelnya;
- Terdapat ketidakselarasannya kinerja yang dituang antar dokumen RPD dengan Perjanjian Kinerja Wali Kota. Kinerja sasaran strategis belum dikawal dalam dokumen perencanaan tahunan sedangkan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota merupakan kinerja tujuan pada RPD. Hal ini menjadi tidak tepat, karena perjanjian kinerja seharusnya berisi kinerja sasaran strategis tahun berjalan yang diturunkan dari RPD;
- Pada beberapa Perangkat Daerah masih ditemukan rumusan kinerja yang belum menggambarkan kecukupan dan korelasi hubungan yang relevan dengan tugas fungsi Perangkat Daerah tersebut;
- Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- Identifikasi *crosscutting* guna saling mendukung pencapaian kinerja sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendukung setiap kinerja yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai kinerja yang bersifat

makro maupun yang menjadi isu strategis.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pengumpulan dan pengukuran kinerja organisasi masih dilakukan secara manual sehingga data kinerja yang diinformasikan belum dapat diyakini keakuratannya;
- Pengukuran kinerja individu yang dilakukan masih sekedar melaporkan aktivitas kerja pegawai dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sehingga belum terlihat bagaimana keterkaitan hasil pelaporan aktivitas tersebut dalam mengawal capaian kinerja outcome atasnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mengukur capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
- Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, penentuan mutasi dan rotasi pegawai, serta menjadi komponen penilaian untuk *talent pool*.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Penuangan informasi *benchmark* capaian kinerja dengan membandingkan realisasi nasional maupun se Kalimantan Barat belum dilakukan di semua indikator yang bersifat makro. Selain itu, informasi akan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi) belum disampaikan dalam LPPD;
- Informasi terkait hasil analisis efisiensi sumber daya dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja kedepan bagi Perangkat Daerah belum diinformasikan pada LAKIP beberapa Perangkat Daerah;
- Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LPPD maupun LAKIP Perangkat Daerah belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses

penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi internal sudah dilakukan dan telah disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah melalui laporan hasil evaluasi internal. Namun hasil evaluasi internal tersebut belum diimplementasikan secara utuh dikarenakan pemantauan atas tindak lanjut Perangkat Daerah atas hasil evaluasi internal belum dilakukan berkala;
- Evaluasi internal belum memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari proses mempercepat pelaksanaan evaluasi internal dan komunikasi dua arah antara APIP dan Perangkat Daerah dalam melakukan konsultasi atas hasil evaluasi yang diterima;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, maka ada beberapa hal menjadi rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen RPD guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan telah berorientasi outcome dan sesuai dengan jenjang levelnya;
2. Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja di tingkat Pemda dengan memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan ke perjanjian kinerja sesuai dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPD sehingga perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah lebih berkualitas;
3. Memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/ *logical framework* dan mengutamakan CSF sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja;

4. Menyempurnakan *crosscutting* kinerja lintas Perangkat Daerah yang sudah disusun dengan berfokus pada identifikasi setiap keterlibatan Perangkat Daerah yang ada untuk mengawal kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang menjadi isu strategis;
5. Melakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara triwulanan ke seluruh Perangkat Daerah. Proses maupun hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja tersebut juga agar dituangkan dalam bentuk teknologi informasi yang memudahkan pimpinan tertinggi untuk memantau secara *real time*;
6. Mendorong pelaksanaan pengukuran kinerja individu yang dilakukan tidak hanya sekedar melaporkan aktivitas saja, namun mengaitkan apakah setiap aktivitas yang dilaporkan tersebut mendukung pencapaian kinerja outcome yang mana, sehingga setiap kontribusi individu semakin terlihat keterlibatannya dalam mewujudkan kinerja organisasi;
7. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis dengan berfokus tidak hanya pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward dan punishment, penentuan mutasi dan rotasi pegawai, serta menjadi komponen penilaian untuk talent pool;
9. Meningkatkan kualitas informasi dalam LPPD dengan menginformasikan data benchmark capaian kinerja dengan membandingkan realisasi nasional maupun se Kalimantan Barat atas indikator yang bersifat makro. Selain itu, memperkuat informasi dalam LPPD dengan menginformasikan rencana upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi) yang akan dilakukan sebagai bagian dari kesimpulan atas hal yang dituangkan dalam LPPD;
10. Mendorong penyeragaman kualitas LAKIP PD dengan menambahkan informasi rencana perbaikan kinerja kedepan dan informasi atas hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan PD dalam mewujudkan kinerja;

11. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP PD sebagai alat pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan menjadi bahan dokumen perencanaan kedepan dalam meningkatkan capaian kinerja ke depan, terutama kinerja yang capaiannya masih rendah;
12. Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala atas rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE internal guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal;
13. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari proses mempercepat pelaksanaan evaluasi internal dan komunikasi dua arah antara APIP dan PD dalam melakukan konsultasi atas hasil evaluasi yang diterima;
14. Memastikan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh PD dan dimanfaatkan sebagai alat dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja dengan cara memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan strategis dalam mencapai kinerja outcome organisasi.

2.4.6. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Indeks Pelayanan Publik
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,22	3,65	3,57	4,22	4,22

Sumber: KemenPan RB, 2024

IPP Kota Singkawang cenderung naik selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, IPP Kota Singkawang masuk dalam kategori “Baik (B-)” dengan perolehan nilai sebesar 3,22. Pada tahun 2020 dan 2021, IPP Kota Singkawang meningkat dan masuk dalam kategori “Baik (B)” dengan perolehan nilai sebesar 3,65 dan 3,57. Di tahun 2022 dan 2023 IPP Kota Singkawang kembali meningkat dengan nilai sebesar 4,22 dengan kategori “Sangat Baik (A-)”.

2.4.7. Indeks Inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Indeks Inovasi Daerah
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	-	1.143	70,63	57,18	53,33

Sumber: KemenPan RB, 2024

IID Kota Singkawang mengalami penurunan selama periode 2020-2023. Kota Singkawang melakukan pelaporan inovasi daerah mulai tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2021, IID Kota Singkawang masuk dalam kategori “Sangat Inovatif” dengan perolehan nilai sebesar 1.143 dan 70,63. Pada tahun 2022 dan 2023, IID Kota Singkawang menurun dengan nilai sebesar 57,18 dan 53,33 dengan kategori “Inovatif”.

2.4.8. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,90	3,82	2,60	2,60	3,33

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2024

SPBE Kota Singkawang cenderung mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, SPBE Kota Singkawang masuk dalam kategori “Cukup” dengan perolehan nilai sebesar 1,74. Pada tahun 2020, SPBE Kota Singkawang mengalami peningkatan tertinggi dalam kategori “Baik” dengan perolehan nilai sebesar 3,82. Pada tahun 2021 dan 2022, SPBE Kota Singkawang mengalami penurunan namun masih dalam kategori “Baik” dengan

perolehan nilai sebesar 2,60. Pada tahun 2023, SPBE Kota Singkawang kembali meningkat dan masih masuk dalam kategori “Baik” dengan perolehan nilai sebesar 3,33.

2.4.9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,52	83,74	84,94	86,71	85,62

Sumber: KemenPan RB, 2024

IKM Kota Singkawang selalu mengalami peningkatan selama periode 2019-2023 dengan kategori “Baik”. Dimulai tahun 2019, dengan perolehan nilai sebesar 82,52 hingga tahun 2023 dengan perolehan nilai mencapai 85,62”.

2.4.10. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik	83,30	84,09	85,47	86,33	87,05

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik Kota Singkawang selalu mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Dimulai pada tahun 2019, dengan perolehan nilai sebesar 83,30 hingga pada tahun 2023 dengan perolehan nilai mencapai 87,05”.

2.4.11. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Survei Penilaian Integritas
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	n/a	n/a	71,30	73,91	74,33

Sumber: Inspektorat Kota Singkawang, 2024

SPI Kota Singkawang cenderung mengalami peningkatan selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, SPI Kota Singkawang masuk dalam kategori “Rentan” dengan perolehan nilai sebesar 71,30. Pada tahun 2022 dan 2023, SPI Kota Singkawang meningkat dan masuk dalam kategori “Waspada” dengan perolehan nilai sebesar 73,91 dan 74,33.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.52
Tabel Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025

PERIODE PERENCANAAN	:	2008-2012
ARAH KEBIJAKAN	:	Pengembangan perekonomian Kota Singkawang pada tahap ini difokuskan pada peningkatan kegiatan sektor riil melalui pengembangan kegiatan investasi swasta dan masyarakat. Kegiatan agribisnis semakin ditumbuhkan dalam upaya memunculkan produk unggulan daerah. Pertumbuhan ekonomi pada periode ini ditargetkan rata-rata 5,70% per tahun, dengan kontribusi tertinggi berasal dari pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, bangunan, dan sektor transportasi/komunikasi. Menekan laju pertumbuhan penduduk yang

		relatif kecil dan terkendali, namun berusaha untuk menghindari terjadinya struktur usia penduduk semakin menua (<i>aging population</i>). Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat, termasuk pendirian Universitas Negeri. Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah). Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita. Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya sehingga jumlah Penduduk Miskin dan jumlah keluarga berstatus KS 1 (keluarga miskin) semakin berkurang.
URAIAN PENCAPAIAN	:	1. Pengembangan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan ditunjukkan dengan indikasi tumbuhnya perekonomian di Kota Singkawang. Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang di tahun 2008 sebesar 4,72% kemudian naik menjadi sebesar 6,46% pada tahun 2012 diikuti dengan indikator kinerja Angka Kemiskinan Kota Singkawang pada periode 2008-2012 mengalami penurunan sebesar 32,70% atau berada di angka 5,31%. 2. Keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas ditunjukkan dengan naiknya indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari kondisi di awal periode pada tahun 2008 sebesar 68,02% menjadi sebesar 69,77% di akhir periode atau naik sebesar 2,57%. Meningkatnya IPM didukung oleh

	meningkatnya capaian komponen IPM yaitu RLS dan AHH di Kota Singkawang. RLS dari kondisi awal sebesar 7,30% menjadi sebesar 7,59% atau naik sebesar 103,97%, dan AHH dari kondisi awal sebesar 66,95% tahun 2008 menjadi sebesar 67,46% di tahun 2012 atau naik sebesar 100,76%. Selain itu keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas juga ditunjukkan dengan naiknya angka melek huruf Kota Singkawang, dari sebesar 89,62% ditahun 2008 menjadi sebesar 90,25% ditahun 2012 atau naik sebesar 100,70%. 3. Pencapaian peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing ditunjukkan dengan indikator kinerja Angka Pengangguran. Capaian Angka Pengangguran di Kota Singkawang pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 55,72% atau masuk dalam kriteria rendah, hal ini dikarenakan adanya penurunan angka pengangguran di Kota Singkawang. Pada tahun 2008 Angka Pengangguran sebesar 6,73% kemudian turun menjadi sebesar 3,75% pada tahun 2012. 4. Pengembangan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan ditunjukkan dengan indikasi tumbuhnya perekonomian di Kota Singkawang. Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang di tahun 2008 sebesar 4,72% kemudian naik menjadi sebesar 6,46% pada tahun 2012 atau capaian kinerjanya naik sebesar 136,86% dan masuk dalam kriteria sangat tinggi. Dan keberhasilan dalam menurunkan Angka Kemiskinan Kota Singkawang pada periode 2008-2012 sebesar 32,70% atau berada di angka 5,31%.
--	--

PERIODE PERENCANAAN	:	2013-2017
ARAH KEBIJAKAN	:	Pada tahap ini, mempertahankan angka laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang yang stabil dengan laju pertumbuhan antara 1,35-1,45% per tahun. Perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 5,95% per tahun. Daya ungkit pertumbuhan terutama dikarenakan adanya peningkatan investasi swasta dan masyarakat di sektor agribisnis pada periode sebelumnya. Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat. Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita. Bidang Transportasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang ± 300 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 20 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang ± 75 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan ± 10 unit. Realisasi pembangunan infrastruktur Bandar Udara Singkawang. Terjadi peningkatan arus barang dan orang pada Pelabuhan Laut Singkawang. Bidang Sumber Daya Air, pemeliharaan jaringan distribusi air bersih dan pengembangan jaringan distribusi semakin meningkat dan mengurangi tingkat kebocoran pada jaringan distribusi.
URAIAN PENCAPAIAN	:	1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Singkawang umumnya sudah baik. Hal ini dapat dikendalikannya pertumbuhan penduduk, sehingga pada akhir tahun capaian yaitu pada tahun 2022 berada dibawah angka yang telah ditargetkan sebesar 1,24%. Namun kedepannya tetap perlu

	diperhatikan sebab prediksi pada tahun 2020-2035 akan terjadi bonus demografi dimana jumlah usia produksi Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi sejarah bangsa Indonesia, yaitu mencapai 64% dari total penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. 2. IPM Kota Singkawang pada Periode akhir periode tahun 2017 adalah sebesar 70,25% dengan capaian pertumbuhan sebesar 101,62% dibandingkan tahun 2012. IPM ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Indonesia. Meskipun demikian Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Singkawang sebesar 71,07%, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 92,56%, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,35%, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,86% dengan rata-rata capaian melebihi 100% dibandingkan pada awal periode tahun 2012. Dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang menunjukkan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pembangunan ekonomi Kota Singkawang. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut,
--	---

	penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan pendidikan formal Kota Singkawang juga menunjang pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan Kota Singkawang menunjukkan bahwa peningkatan IPM disebabkan oleh adanya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 16,62%, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi tidak mengalami hambatan yang berarti. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan tidak terlalu mengalami kesulitan. Demikian juga untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya tidak menjadi terhambat yang berarti. Implikasinya tidak terlalu mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya. Investasi swasta dalam persentase terhadap PDB cukup besar sementara persentase investasi pemerintah terhadap PDB relative kecil. Aktivitas pemerintah daerah Kota Singkawang dalam pembangunan ekonomi juga beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program bantuan kepada Ketua RT, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. 3. Kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan Kota Singkawang umumnya sudah baik. Dampak dari didirikannya beberapa perguruan tinggi sehingga memberikan
--	--

		kesempatan kepada siswa lulusan SMA/SMK melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian pula mengenai peningkatan sertifikasi guru dan pengawas dan kualifikasi pendidikan Guru SD (S1) masih belum optimal. Sementara dalam pelayanan kesehatan juga belum sepenuhnya optimal terutama terhadap penurunan Angka Kematian Balita (AKABA) per-100.000KH, Persentase Balita Gizi Buruk/Kurang, dan Rasio Tenaga Dokter Per-100.000 Pddk. 4. Pada tahun 2016 telah dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK 50 liter per detik Sungai Bulan, Intake 140 liter per detik Semelagi dan IPA 150 liter per detik Tirtasari Roban. Pada periode ini pelayanan air bersih untuk masyarakat Kota Singkawang masih sangat kurang, hanya sekitar 37% dari jumlah penduduk. Instalasi pengolahan air yang dimiliki PDAM Gunung Poteng, seperti IPA 1 Roban berkapasitas 80 liter per detik dan IPA 2 Roban berkapasitas 50 liter per detik. Sehingga jumlah air yang dapat diolah hanya 130 liter per detik, dirasakan masih sangat kurang. 5. Secara umum kualitas sumber daya manusia di Kota Singkawang yang dilihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang pendidikan dan jasa dalam arti luas yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah belum mengalami peningkatan secara optimal
PERIODE PERENCANAAN	:	2018-2022

ARAH KEBIJAKAN	: Perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 5,87% pada periode ini. Pada tahap ini, struktur ekonomi semakin kokoh dikarenakan mulai berkembangnya kegiatan industri pengolahan agribisnis dan munculnya beberapa komoditas unggulan ekspor daerah. Disamping itu, IKM semakin berperan melalui pengembangan klaster. Implikasi dari semua kemajuan di atas pada akhirnya memacu kegiatan bisnis dan perdagangan daerah. Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya, sehingga jumlah Penduduk Miskin berkurang menjadi 11,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) turun menjadi 9,7%. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah). Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar. Peningkatan penyediaan dan pemerataan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan kualitas layanan pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan Posyandu. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan manajemen Kesehatan. Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya, sehingga jumlah Penduduk Miskin berkurang menjadi 11,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) turun menjadi 9,7%. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Membangun dan meningkatkan semangat multikulturalisme dalam dimensi sosial, budaya
---------------------------	--

		dan kehidupan beragama. Infrastruktur dan sumberdaya aparatur pemerintahan daerah yang semakin handal sejalan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan modern.
URAIAN PENCAPAIAN	:	1. Untuk mewujudkan SDM Kota Singkawang yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya ditunjukkan dengan: meningkatnya capaian IPM dari sebesar 71,08 pada tahun 2018 naik sebesar 1,81 poin menjadi sebesar 72,89% pada tahun 2022 atau naik sebesar 102,55%; meningkatnya RLS dari sebesar 7,57% tahun 2018 menjadi sebesar 8,19% tahun pada tahun 2022 atau naik sebesar 108,19%; meningkatnya HLS dari sebesar 12,87% tahun pada tahun 2018 naik sebesar 0,05 poin menjadi sebesar 12,92% pada tahun 2022 atau naik sebesar 100,39%. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga diiringi dengan kenaikan taraf kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan kenaikan AHH Kota Singkawang, pada tahun 2018 AHH Kota Singkawang sebesar 71,35% atau naik menjadi 72,46% pada tahun 2022 atau naik sebesar 101,56%. 2. Untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan berkelanjutan dan mewujudkan Masyarakat Kota Singkawang Yang Sejahtera ditunjukkan dengan naiknya Pertumbuhan Ekonomi, turunnya Angka Kemiskinan, turunnya Gini Rasio, turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada periode ini mengalami kenaikan, pada awal periode terealisasi sebesar 4,64% naik menjadi sebesar 5,05% pada tahun 2022. Angka Kemiskinan Kota

	Singkawang pada tahun 2018 sebesar 5,12% turun menjadi 4,67% pada tahun 2022. Demikian juga dengan capaian Gini Rasio, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,291, turun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 0,307. 3. Pembangunan bandara dimulai pada Tahun 2019, yaitu dengan melakukan proses land clearing dikawasan bandara. Proses land clearing kembali dilanjutkan pada tahun 2021. Sampai dengan saat ini, di Tahun 2022 sedang dilakukan pembangunan pagar, saluran dan apron. Pada Tahun 2023 direncanakan akan dibangun landasan pacu atau runway Tahap I sepanjang 1.400 Meter. 4. Kota Singkawang menjadi Kota Toleran peringkat pertama dengan skor Indeks Kota Toleran tahun 2021 tertinggi, yaitu 6,483. Kota Singkawang memberikan terobosan melalui kebijakan Perwako Singkawang No. 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat. 5. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Singkawang menerima penghargaan dari Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Sangat Inovatif berada pada peringkat 40 dari 93 Kota seluruh Indonesia. Untuk Tahun 2021 Kota Singkawang Kembali menerima penghargaan dari Innovative Government Award (IGA) mencapai peringkat yang fantastis yaitu peringkat 2 setelah Kota Surabaya. 6. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam 4 (empat) tahun
--	--

	(2018-2021), opini yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada Tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Singkawang mengalami peningkatan dengan mendapatkan predikat “B”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.
--	---

RPJPD 2005-2025 Kota Singkawang disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025. Namun tidak ditemukan penjelasan di dalam dokumen mengapa RPJPD yang disusun dan efektif digunakan mulai tahun 2005 tetapi disahkan dengan peraturan daerah pada tahun 2010.

Dari hasil analisa capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang selama periode RPJPD 2005-2025 terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain:

1. Permasalahan kesenjangan pendapatan masyarakat perlu dijaga agar jaraknya tidak semakin melebar, oleh karena itu diperlukan integrasi program prioritas antar Perangkat Daerah berbasis spasial;
2. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) merupakan salah satu kunci dalam melaksanakan program-program yang direncanakan, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah dibangun dengan cara mengintegrasikan semua aplikasi yang sudah ada;

3. Peningkatan kualitas mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik dengan cara melakukan transformasi digital semua transaksi keuangan pemerintah;
4. Untuk memastikan bahwa program yang disusun sudah berorientasi kepada masyarakat maka partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan perlu ditingkatkan lagi dengan membuka kanal-kanal yang mudah diakses oleh masyarakat;
5. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi dan sinerginya dengan antar Perangkat Daerah, Kementerian atau Lembaga pusat serta *stakeholder* yang terlibat dalam peningkatan capaian indikator kinerja makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Daerah;
6. Konsistensi perencanaan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD ke RPJMD harus dijaga pada periode perencanaan selanjutnya untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu;
7. Perlu menyusun kebijakan-kebijakan dan prioritas pembangunan yang memperhatikan kemungkinan terjadinya kondisi buruk akibat pandemi atau bencana lainnya;
8. Pembangunan jaringan infrastruktur berdasarkan peta rencana pembangunan jalan, drainase, dan sanitasi;
9. Memprioritaskan pembangunan TPA regional dan pengelolaan sampah dari rumah tangga guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Evaluasi RPJPD dimulai dengan melakukan review terhadap dokumen RPJPD berdasarkan kriteria kesesuaian RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal pola ruang dan struktur ruang, visi dan misi pembangunan yang ditetapkan.

Tabel Evaluasi Dokumen RPJPD berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kota Singkawang.

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
Kesesuaian dengan RTRW	Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras	• Struktur ruang • Pola ruang	• Secara umum perencanaan pembangunan jangka

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
(penelaahan RTRW)	dengan arah kebijakan RTRW	• Indikasi program pemanfaatan ruang	panjang menggunakan perencanaan berbasis spasial dalam merencanakan pembangunan fisik dan lingkungan, namun belum memuatnya dalam indikator yang terukur. • Pembangunan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan yang tertuang dalam pembangunan jangka panjang belum didukung data dari RTRW. • Secara eksplisit dinyatakan bahwa bahwa RPJPD terkait dengan RTRW. • Permasalahan pembangunan dan isu strategis belum didukung dengan data yang cukup bahwa secara spesifik pembangunan daerah Kota Singkawang penting untuk diarahkan kepada kesejahteraan dengan berbasis pangan dan pariwisata. • Data pariwisata yang disajikan hanya data jumlah objek wisata, jumlah pengunjung.
Visi	Singkawang Maju, Sejahtera	1. Panduan Pengembangan	Secara keseluruhan, Visi " Singkawang Maju,

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
	Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Agroindustri	Wilayah: Visi tersebut mengarahkan bagaimana setiap area di Kota Singkawang akan dikembangkan. Misalnya, zona-zona tertentu akan diidentifikasi dan direncanakan untuk mendukung jasa, perdagangan, dan agroindustri. 2. Prioritas Pembangunan Infrastruktur: RTRW akan menentukan infrastruktur apa yang perlu dibangun atau ditingkatkan untuk mendukung visi ini. Misalnya, pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang mendukung perdagangan dan industri. 3. Penggunaan Lahan: RTRW akan menetapkan penggunaan lahan yang sesuai dengan visi tersebut, seperti area untuk perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Penggunaan lahan akan diatur sedemikian rupa	Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Agroindustri " berfungsi sebagai visi strategis yang menjadi dasar dari seluruh perencanaan dan pengembangan yang ditetapkan dalam RTRW kota Singkawang.

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
		agar mendukung kegiatan ekonomi yang diinginkan. 4. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan mengarahkan pengembangan ke sektor jasa, perdagangan, dan agroindustri, RTRW bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal. 5. Kebijakan Lingkungan: RTRW juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor-sektor ini, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan.	
Misi	Upaya-upaya yang jelas untuk mewujudkan visi, pada misi ketujuh yaitu “Mewujudkan infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan pertanahan untuk	1. Pembangunan Infrastruktur yang Memadai Tujuan: Infrastruktur yang baik seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya diperlukan untuk memfasilitasi	Secara keseluruhan, RTRW berfungsi sebagai kerangka kerja strategis yang memastikan bahwa pengembangan infrastruktur, penataan ruang, dan pertanahan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial di

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
	meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa sekaligus mengembangkan kepariwisataan”	arus perdagangan barang dan jasa. RTRW: Rencana Tata Ruang Wilayah mengidentifikasi dan menetapkan lokasi-lokasi strategis untuk pembangunan infrastruktur ini. Ini termasuk menentukan rute transportasi utama, zona industri, dan area logistik. 2. Penataan Ruang Tujuan: Penataan ruang yang efektif memastikan bahwa setiap area digunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya, seperti zona perdagangan, industri, perumahan, dan pariwisata. RTRW: RTRW mengatur penggunaan lahan dan mengklasifikasikan area sesuai dengan fungsinya. Ini membantu dalam mengurangi konflik penggunaan lahan dan memastikan bahwa pengembangan dilakukan secara terkoordinasi. 3. Pertanahan Tujuan: Pengelolaan pertanahan yang baik memastikan	wilayah Kota Singkawang.

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
		ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lainnya, serta menyelesaikan masalah kepemilikan dan penggunaan lahan. RTRW: RTRW memberikan panduan tentang pengelolaan dan pemanfaatan lahan, termasuk identifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan dan mekanisme penyelesaian sengketa lahan. 4. Meningkatkan Arus Perdagangan Barang dan Jasa Tujuan: Memastikan bahwa sistem distribusi dan logistik berjalan dengan lancar untuk mendukung ekonomi lokal dan regional. RTRW: RTRW merencanakan lokasi-lokasi strategis untuk pusat-pusat perdagangan dan logistik, memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang baik antara daerah-daerah produksi dan pasar.	

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
		5. Pengembangan Kepariwisata Tujuan: Meningkatkan sektor pariwisata untuk mendukung ekonomi lokal dan menarik wisatawan domestik dan internasional. RTRW: RTRW menetapkan zona-zona pariwisata dan area konservasi yang mendukung kegiatan pariwisata. Ini termasuk merencanakan infrastruktur pendukung seperti hotel, restoran, dan objek wisata. Implementasi dalam RTRW ● Zona Perdagangan dan Industri: Menetapkan area khusus untuk perdagangan dan industri untuk meningkatkan efektivitas distribusi barang dan jasa. ● Aksesibilitas: Merencanakan jaringan transportasi yang mendukung konektivitas antara zona perdagangan, industri, dan pariwisata. ● Fasilitas Umum dan Pariwisata: Mengembangkan fasilitas umum yang	

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
		mendukung sektor pariwisata, seperti pusat informasi, area parkir, dan infrastruktur pendukung lainnya. ● Kebijakan Lingkungan: Mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan tata ruang untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.	

WILAYAH DAN TATA RUANG (RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025)

No	Sektor / Bidang	Kondisi Saat Ini	Program Prioritas			
			5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1.	Wilayah dan Tata Ruang	- Penggunaan lahan untuk tapak (permukiman, industri, perdagangan dan fasilitas-fasilitas kegiatan lainnya) dan penggunaan lahan non tapak (perkebunan, sawah, hutan dan lain-lain). - Areal permukiman (perumahan dan berbagai fasilitas sosial-budayanya) yang luasnya sekitar 1.390 Ha atau sekitar 2.76 % luas kota. - Kawasan terbangun lainnya yang terdiri dari fasilitas perdagangan dan jasa komersial, pemerintahan dan pelayanan umum, terminal, pelabuhan dan industri mencakup 250.7 hektar atau sekitar 0.5 % dari luas kota. - Sekitar 25.679,90 Ha atau sekitar 51 % dari luas kota merupakan areal pertanian, kebun campuran, kebun kelapa, dan lain-lain. 12,20 % luas kota masih berupa hutan lebat yang tersebar di beberapa areal pegunungan seperti Gunung Raya, Gunung Pasi, Gunung Sari, Gunung Poteng dan lain-lain. - Hutan mangrove atau bakau tersebar di sepanjang pantai Laut Natuna yang luasnya mencapai $\pm$ 726,3 Ha atau sekitar 1,4 % dari luas kota.	- Penataan wilayah dan ruang di semua wilayah disesuaikan dan diarahkan dengan RTRK yang telah disusun sesuai menurut fungsinya. - Konsistensi terhadap Perda Tata Ruang. - Kebijakan pengembangan tata ruang kota yang sejalan dengan kebijakan dasar pengembangan kota yang terarah, konsepsional, berkesinambungan dan efektif	- Pengembangan wilayah dan ruang di semua wilayah kota sesuai dengan RTRK yang ada. - Semakin mantapnya kawasan-kawasan prioritas yang didukung oleh penataan ruang dengan pengelolaan yang tepat	- Pengelolaan secara terpadu wilayah pembangunan sesuai dengan RTRK yang ada. - Tersedianya fasilitas dan utilitas kota yang mempunyai jangkauan luas yang berperan sebagai jembatan antar kota	- Evaluasi dan revisi tata ruang di semua wilayah disesuaikan perkembangan dan kebutuhan tata ruang kota. - Berkembang pesatnya kawasan baru dan tumbuhnya pusat-pusat industri sebagai fasilitas vital perdagangan regional sesuai dengan RTRK Kota Singkawang.

No	Sektor / Bidang	Kondisi Saat Ini	Program Prioritas			
			5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		▪ Penyebaran kawasan terbangun mengarah dari pusat kota di Kecamatan Singkawang Tengah dan Barat, berkembang ke utara, timur dan selatan. ▪ Kawasan-kawasan pinggiran kota terutama ke arah perkembangan kota tersebut masih banyak tersedia lahan / kawasan tak terbangun yang berupa areal pertanian, semak belukar dan kebun campuran yang diusahakan masyarakat setempat.				

2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Untuk mengukur capaian kinerja suatu pemerintahan daerah dan membandingkannya secara nasional maka ditetapkan beberapa indikator yang berlaku secara nasional yang disebut indikator makro pembangunan. Capaian indikator makro yang dicapai Kota Singkawang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.53
Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Singkawang
Tahun 2008-2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2008)	Capaian pada tahun (2023)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,00	73,39	5,39	Capaian Positif
2.	Angka Kemiskinan	7,89	4,70	3,19	Capaian Positif
3.	Angka Pengangguran	6,73	8,51	1,78	Capaian Negatif
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,72	5,05	0,33	Capaian Positif
5.	Ketimpangan Pendapatan	0,324	0,274	0,050	Capaian Positif
6.	PDRB Per Kapita (juta Rupiah)	11.249,00	52,412,00	41.163	Capaian Positif
7.	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rupiah)	10.864,00	12.457,00	1.593	Capaian Positif

Secara umum capaian indikator kinerja makro pembangunan Kota Singkawang periode tahun 2008-2025 sangat baik, dari 7 (tujuh) indikator kinerja makro yang diukur terdapat 6 (enam) indikator kinerja makro yang mengalami capaian positif, sedangkan 1 (satu) indikator mengalami capaian negatif. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja makro dijelaskan sebagai berikut:

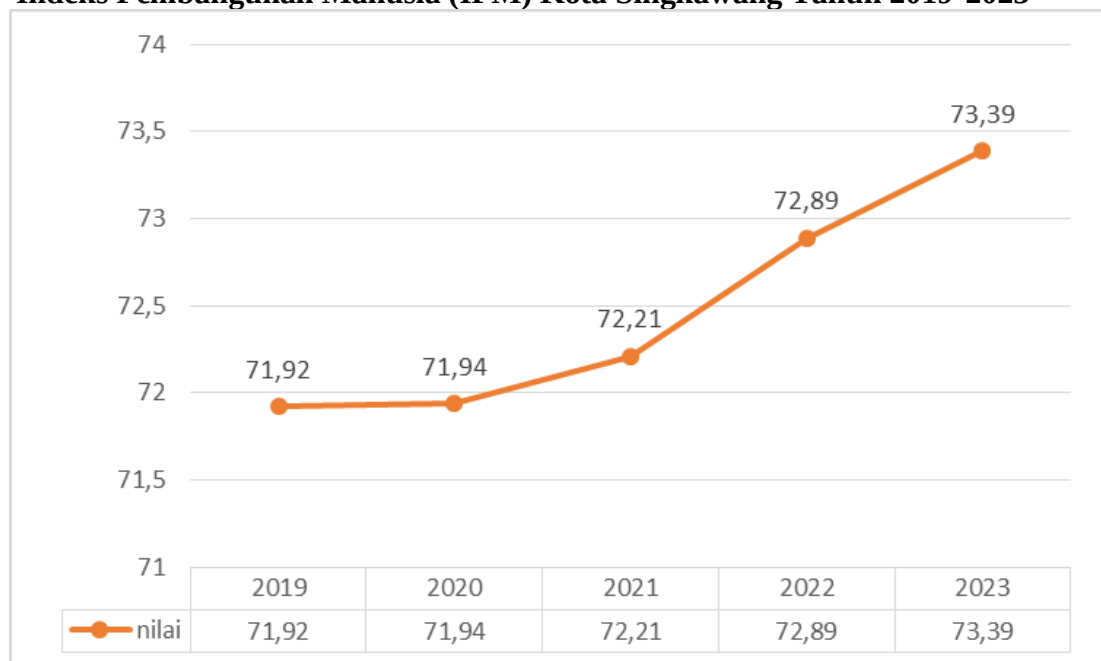
a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Singkawang dapat dinyatakan cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang. Pada tahun 2023, IPM Kota Singkawang sebesar 73,39, meningkat sebesar 5,39 jika dibandingkan pada periode awal RPJPD yaitu pada tahun 2008 yang sebesar 68,00. Kenaikan IPM ini karena

didukung oleh naiknya capaian komponen IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Harapan Hidup (AHH). RLS Kota Singkawang pada tahun 2008 sebesar 7,30 naik menjadi 8,21 pada tahun 2023, HLS Kota Singkawang pada tahun 2010 sebesar 10,86 naik menjadi sebesar 12,94 pada tahun 2023, dan untuk UHH pada tahun 2008 sebesar 66,95 tahun naik menjadi 72,81 tahun pada tahun 2023.

Capaian IPM Kota Singkawang pada tahun 2023 diatas dari capaian Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 69,41 dan dibawah capaian nasional yang sebesar 74,39. Hal ini tentunya selaras dengan Misi RPJPD Kota Singkawang “Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila”.

Grafik 2.38.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Singkawang berdasarkan hasil SP2010

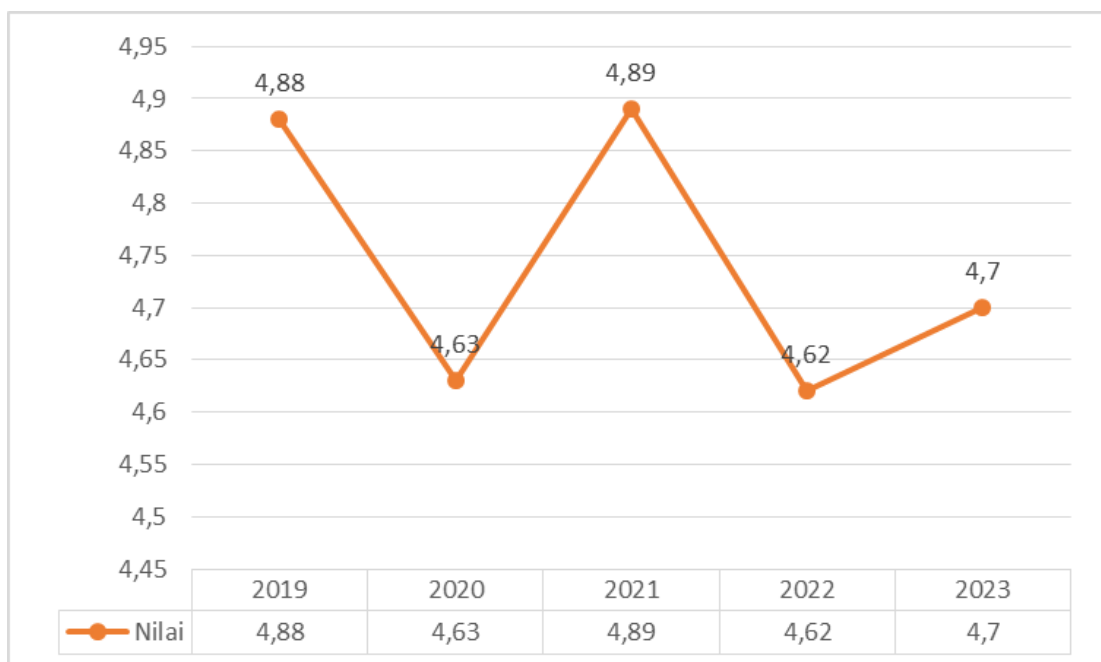
Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang bisa dikatakan berhasil, hal ini digambarkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kota Singkawang sebesar 4,70%, atau

sejumlah 11,06 ribu jiwa, menurun sebesar 3,19% jika dibandingkan pada periode awal RPJPD yang sebesar 7,89%.

Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2019, angka kemiskinan Kota Singkawang cenderung menurun hingga mencapai 4,91%. Pada tahun 2020 hingga 2021 angka kemiskinan di Kota Singkawang mengalami kenaikan mencapai sebesar 6,62%, hal ini diakibatkan oleh dampak dari pandemic *Covid-19*. Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi maupun pasca pandemi menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2022 yang sebesar 4,67% walaupun meningkat kembali 0,03 % menjadi 4,70% pada tahun 2023.

Grafik 2.39.
Angka Kemiskinan Kota Singkawang Tahun 2012-2023



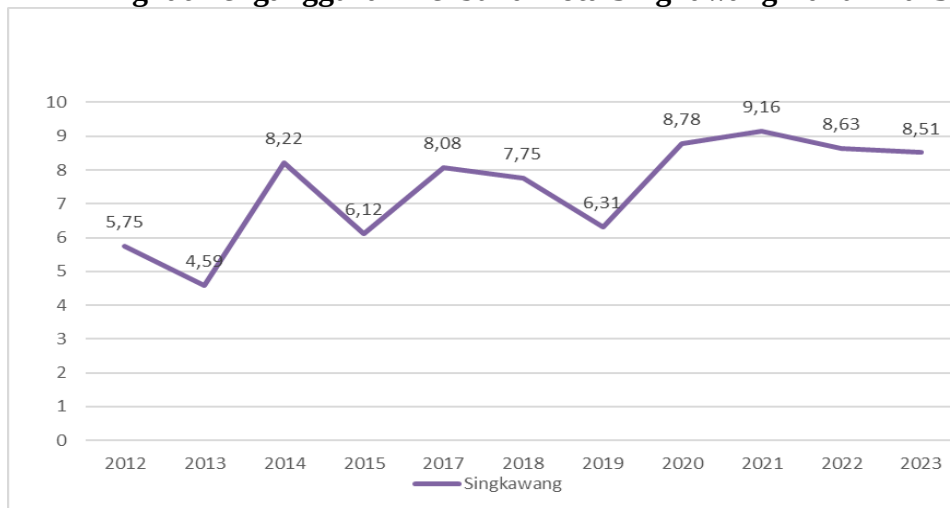
Sumber: BPS Kota Singkawang

Capaian angka kemiskinan Kota Singkawang pada tahun 2023 lebih baik dari capaian angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 6,71% dan capaian angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,36%. Hal ini tentunya selaras dengan Misi RPJPD Kota Singkawang “Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin”.

b. Angka Pengangguran

Untuk mengukur angka pengangguran Kota Singkawang menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Angka pengangguran di Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 8,51%, mengalami peningkatan sebesar 1,78% jika dibandingkan pada periode awal RPJPD yaitu pada tahun 2008 yang sebesar 6,73%, hal ini tidak selaras dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Singkawang.

Grafik 2.40.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Singkawang Tahun 2023

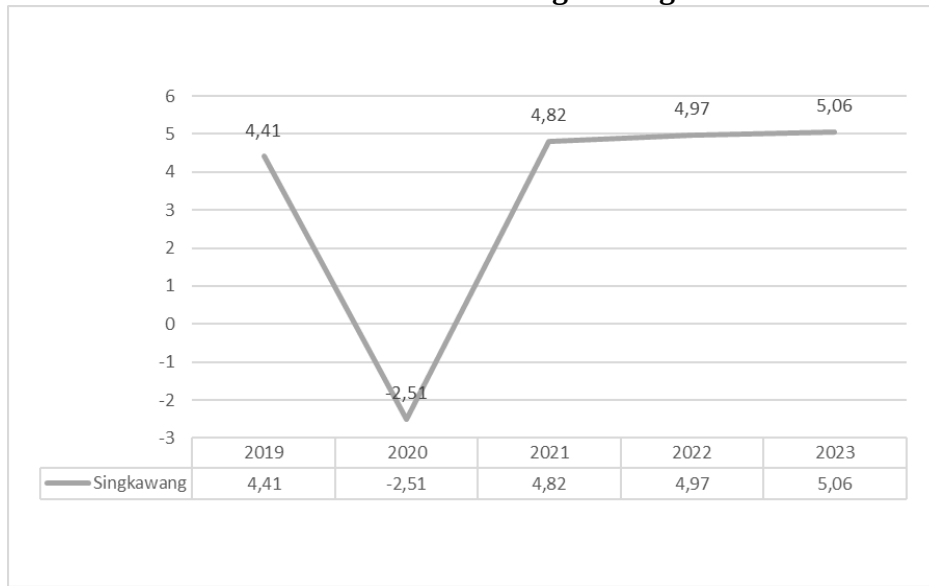


Sumber: BPS Kota Singkawang

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 5,06%, atau mengalami kenaikan sebesar 0,33% jika dibandingkan pada tahun 2008 yang mencapai 4,72%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang turun drastis hingga -2,51% karena dampak pandemic covid-19. Berkat upaya bersama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan seluruh elemen masyarakat maka perekonomian Kota Singkawang berangsur pulih pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan capaian sebesar 5,06%.

Grafik 2.41.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Periode 2019-2023



Sumber: BPS Kota Singkawang

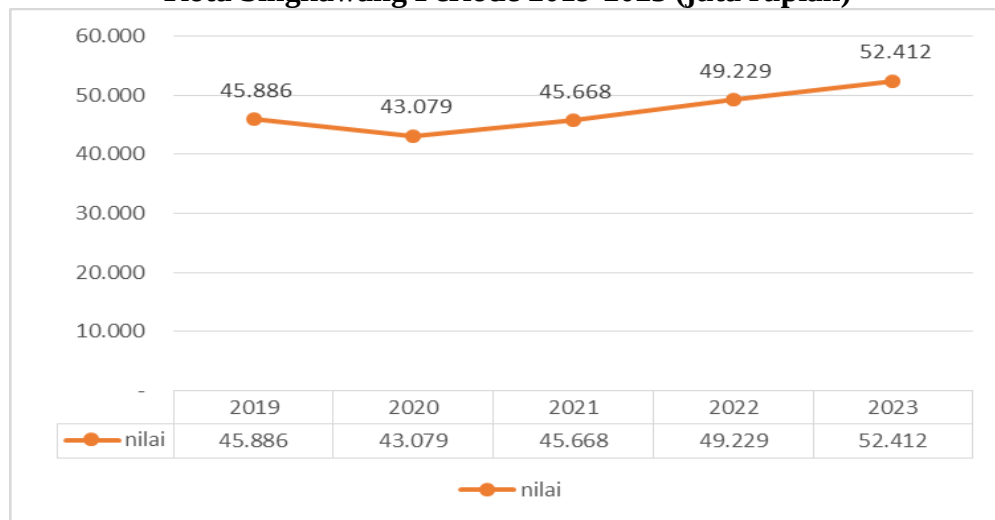
d. PDRB Per Kapita

Tahun 2023 tercatat PDRB atas dasar harga berlaku per kapita Kota Singkawang telah mencapai 52,41 juta rupiah, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 49,23 juta rupiah. Jadi, PDRB per kapita Kota Singkawang tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,47 persen.

Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Kota Singkawang. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawan mereka.

Secara keseluruhan, PDRB per kapita ADHB Kota Singkawang mengalami peningkatan yang positif dalam periode 2019-2023, seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.42.
PDRB Per Kapita ADHB
Kota Singkawang Periode 2019-2023 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Singkawang, 2024 (diolah)

e. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Rasio (Indeks Gini). Semakin tinggi nilai Gini Rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Singkawang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, tetapi ada sedikit tren penurunan. Pada tahun 2021, Gini Ratio meningkat menjadi 0,319, yang merupakan nilai tertinggi selama periode tersebut. Hal ini dapat disebabkan Ketimpangan pendapatan meningkat karena perubahan ekonomi atau pasar kerja. Distribusi kekayaan menjadi lebih tidak merata, dengan beberapa individu atau kelompok mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan sementara yang lain tidak. Terjadi pergeseran distribusi pendapatan ke arah atas spektrum pendapatan.

Pada tahun 2022 dan 2023, Rasio Gini menurun menjadi 0,291 dan 0,274, yang mengindikasikan penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan atau program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial.

Perubahan ekonomi atau pasar kerja yang menguntungkan lebih banyak orang, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan jaring pengaman sosial dan sistem pendukung yang membantu mengurangi kemiskinan dan

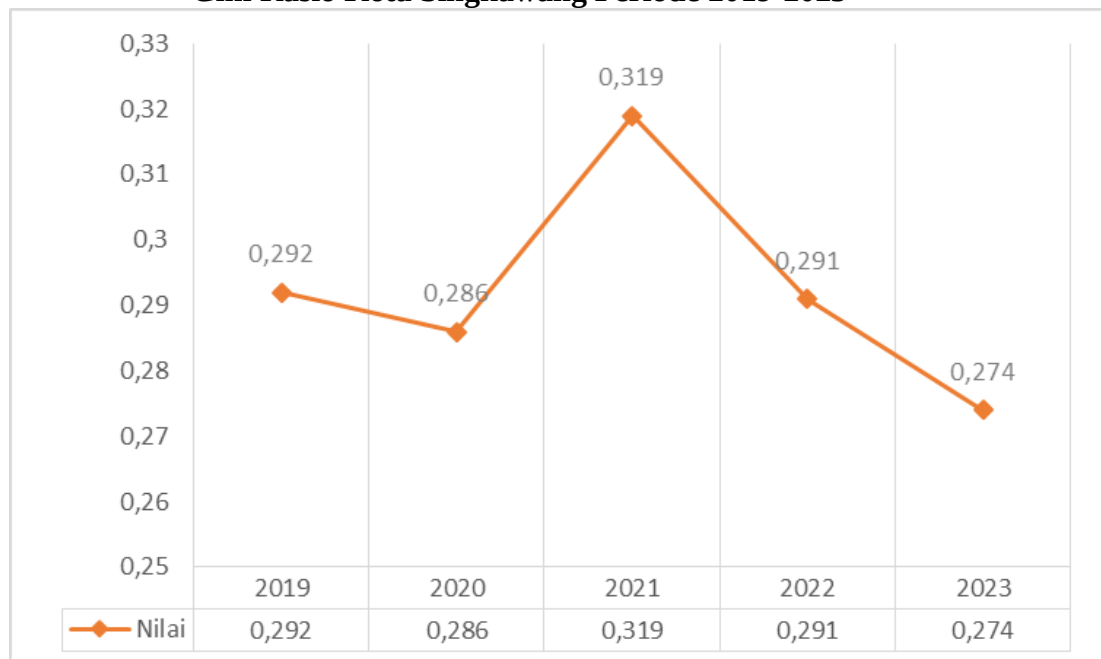
ketimpangan pendapatan. Beberapa kemungkinan penyebab perubahan Rasio Gini adalah Perubahan ekonomi atau pasar kerja, seperti pergeseran industri, kemajuan teknologi, atau tren ekonomi global.

Kebijakan atau program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, seperti perpajakan, program kesejahteraan sosial, atau inisiatif pendidikan dan pelatihan.

Perubahan demografi, seperti perubahan jumlah populasi, struktur usia, atau pola migrasi.

Perubahan komposisi rumah tangga, seperti peningkatan rumah tangga orang tua tunggal atau rumah tangga dengan banyak pencari nafkah.

Grafik 2.43.
Gini Rasio Kota Singkawang Periode 2019-2023



Sumber: BPS Kota Singkawang 2024, (diolah)

f. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran Per Kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran rata-rata per kapita dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya

anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa pengeluaran per kapita mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan terdapat tren peningkatan.

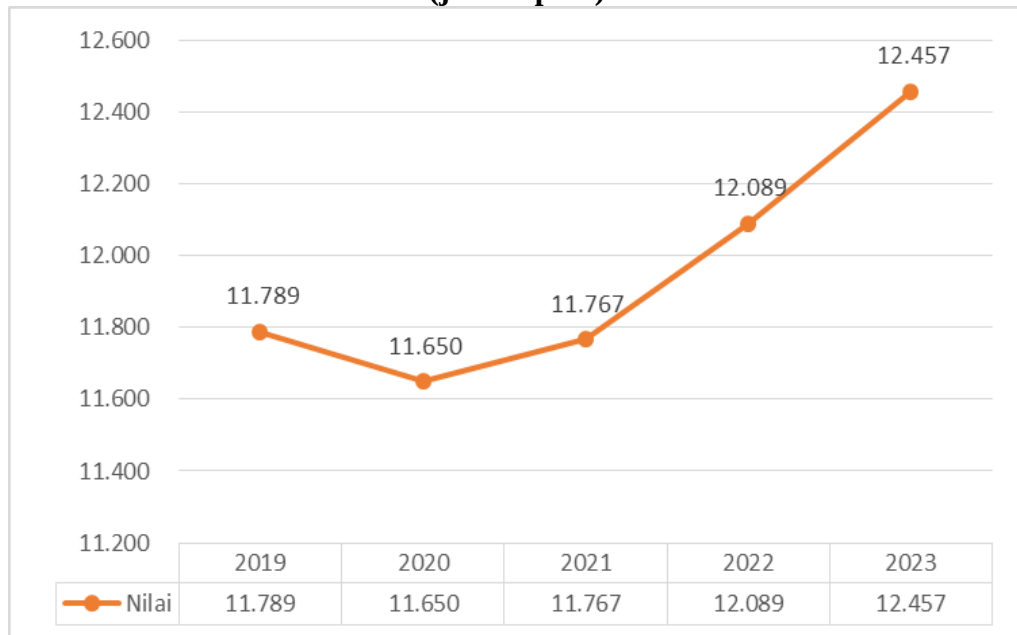
Pada Tahun 2019 Pengeluaran per kapita sebesar 11.789 dan tahun 2020 Ada penurunan menjadi 11.650. Penurunan ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19, yang mempengaruhi ekonomi dan daya beli masyarakat di banyak daerah. pada tahun 2021 Terdapat sedikit peningkatan menjadi 11.767, menunjukkan tanda pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, laju pemulihan pada tahun ini masih relatif lambat dan pada tahun 2022 Pengeluaran per kapita meningkat signifikan menjadi 12.089. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kota kembali pulih dan bahkan tumbuh setelah efek resesi yang disebabkan oleh pandemi. pada tahun 2023 Kenaikan berlanjut ke angka 12.457. Ini mengindikasikan tren positif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita di tahun-tahun terakhir bisa termasuk peningkatan kegiatan ekonomi, investasi dalam infrastruktur, peningkatan lapangan kerja, dan program-program pemerintah yang mendukung masyarakat. Penting juga untuk mempertimbangkan inflasi dan perubahan biaya hidup yang mempengaruhi nilai nominal pengeluaran.

Pemerintah Kota Singkawang perlu terus memantau dan mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam sektor-sektor yang dapat meningkatkan lapangan kerja, serta peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, juga sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren yang positif dalam pengeluaran per kapita di Kota Singkawang dalam periode 2019-2023, dengan adanya fluktuasi yang harus diperhatikan lebih lanjut seperti yang ditampilkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.44.
Pengeluaran Per Kapita Kota Singkawang Periode 2019-2023
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Singkawang 2024, (diolah)

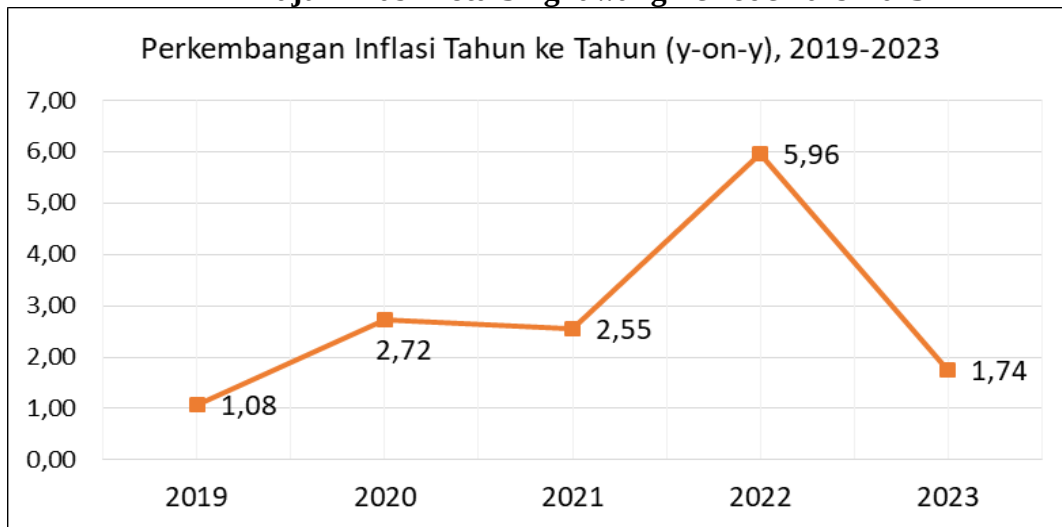
g. Tingkat Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan turun dan investasi akan terhambat sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengendalikan laju inflasi, Pemerintah Kota Singkawang sudah membentuk Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Instansi Vertikal seperti BPS, Bulog, serta seluruh perangkat daerah terkait. Forum TPID melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif, untuk menjaga agar inflasi dapat dikendalikan, dan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga terjangkau. Tingkat inflasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yakni 5,96% namun dapat dikendalikan secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 1,74%.

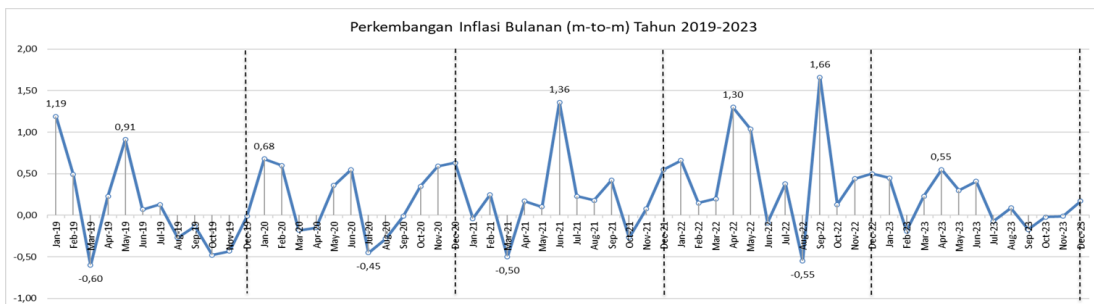
Pada tahun 2023, laju inflasi di Kota Singkawang secara umum sebesar 1,74 persen, dimana kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,64 persen diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,36 persen.

Grafik 2.45.
Laju Inflasi Kota Singkawang Periode 2019-2023



Sumber: BPS Kota Singkawang 2024, (diolah)

Gambar di atas menunjukkan inflasi tahunan Kota Singkawang yang trennya berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada 2023. Inflasi tertinggi di Kota Singkawang terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,96 persen dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,08 persen.



Tingginya inflasi di tahun 2022 disebabkan oleh beberapa hal. Apabila dilihat laju inflasi setiap bulannya, inflasi tertinggi tahun 2022 terjadi pada bulan September sebesar 1,66 persen. Tingginya inflasi pada bulan September ini diakibatkan oleh kenaikan harga pada komoditas kelompok transportasi. Komoditas yang memberikan andil besar pada inflasi ini adalah **bensin**. Bensin mengalami inflasi sebesar 27,52 persen dengan andil 0,89 persen pada September 2022. Penyebab utama kenaikan harga komoditas bensin yang sangat signifikan ini adalah naiknya harga BBM sebagai akibat dari **melonjaknya harga minyak dunia**.

Selain itu di bulan April dan Mei 2022, inflasi juga tergolong tinggi, dimana pada bulan April terjadi inflasi sebesar 1,30 persen. Inflasi ini diakibatkan oleh

kenaikan harga pada komoditas kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Komoditas kelompok Makanan yang memberikan andil inflasi terbesar adalah **minyak goreng**. Pada bulan Mei yang juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, terjadi inflasi sebesar 1,04 persen pada tahun 2022. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan harga pada komoditas kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Konsumsi masyarakat pada saat Hari Raya Idul Fitri meningkat terutama untuk konsumsi makanan.

Pada tahun 2023 inflasi cenderung lebih stabil, bisa dilihat bahwa fluktuasinya lebih kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi tertinggi tahun 2023 terjadi pada bulan April sebesar 0,55 persen. Tingginya inflasi pada bulan April ini diakibatkan oleh kenaikan harga pada komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas yang memberikan andil besar pada inflasi ini adalah **daging babi**. Daging babi mengalami inflasi sebesar 7,14 persen dengan andil 0,10 persen pada April 2023. Penyebab utama kenaikan harga komoditas daging babi yang sangat signifikan ini adalah jumlah ternak babi yang turun drastis sebagai akibat dari **penyakit menular ternak** yang menggempur peternakan babi di Kota Singkawang. Namun kenaikan harga babi di tahun 2023 tidak separah tahun 2021 dimana daging babi mengalami inflasi sebesar 72,10 persen dengan andil 0,5141 persen pada Juni 2021. Penyebab utama kenaikan harga komoditas daging babi yang sangat signifikan di tahun 2021 adalah adanya **wabah penyakit babi** yang menyebabkan stok daging babi turun.

Dapat dilihat bahwa dengan fenomena yang sama, inflasi 2023 lebih terjaga. Hal ini dapat dikaitkan dengan eksistensi **TPID** mulai Oktober 2022. Dimana sejak diadakannya tim pengendalian inflasi ini, inflasi di Kota Singkawang menjadi lebih terkendali dan cenderung lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Penduduk 2025-2045

2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Total Penduduk

Proses pembangunan yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people-centered

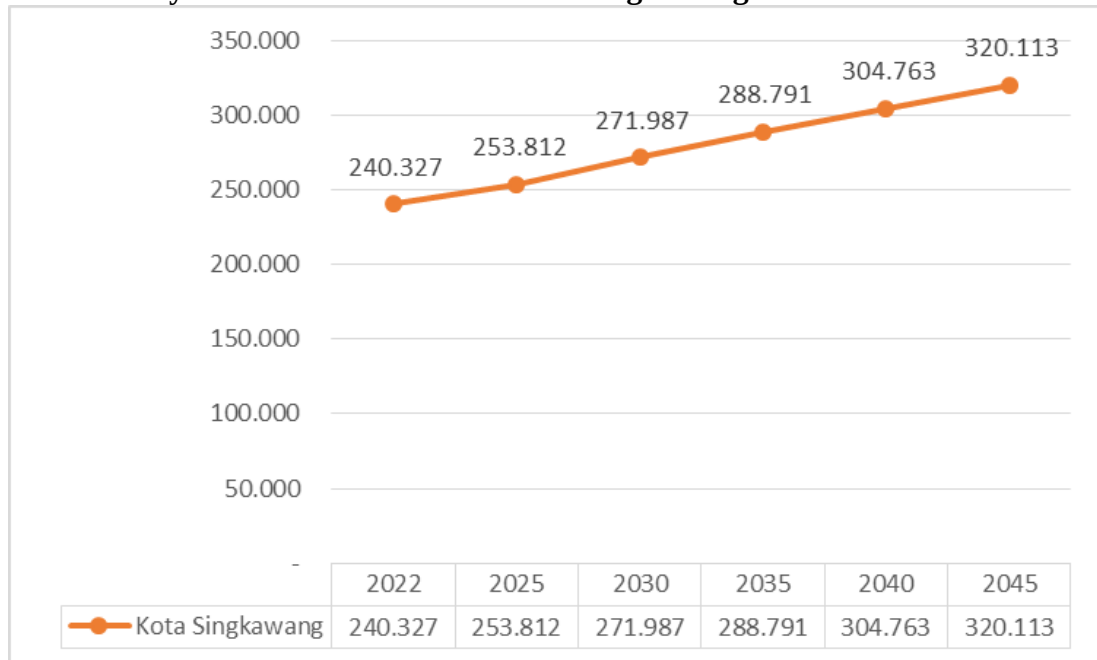
development), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketentraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk merupakan data dan informasi yang utama dalam perencanaan pembangunan. Data jumlah penduduk dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan acuan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Data tersebut dapat memperkirakan kebutuhan fasilitas maupun sarana prasarana, serta dapat menjadi acuan dalam membuat strategi kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Singkawang 2023-2045 perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dalam bagian ini menggunakan Data BPS Kota Singkawang. Adapun indikator yang digunakan berupa indikator demografis seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian dan migrasi. Beberapa aspek yang mendukung terhadap pencapaian kondisi ideal yang meliputi target terhadap Total Fertility Rate (TFR), PUS menggunakan kontrasepsi CPR, Angka Kelahiran Kasar (CBR), Angka Kematian Kasar (CDR), Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka harapan hidup. Sehingga proyeksi pertumbuhan penduduk atas dasar daya dukung yang tersedia akan memberikan gambaran penduduk ideal di tahun 2045.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Singkawang dapat diperkirakan bahwa pada akhir periode RPJPD (2045) jumlah penduduk Kota Singkawang adalah sebesar 320.113 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 17.190 jiwa dalam periode lima tahun. Jumlah penduduk pada kelompok usia 25-29 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi pada akhir periode RPJPD 2045 di Kota Singkawang, yakni sebesar 24.272 jiwa. Indikator yang menjelaskan proyeksi penduduk pada tahun 2025-2045 dalam range waktu lima tahun Kota Singkawang diringkas dalam tabel berikut:

Grafik 2.46.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: BPS Kota Singkawang, diolah

2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia balita dan usia tua. Kota Singkawang untuk tahun 2025-2045 mendapatkan bonus demografi pada rentang usia 15-64 tahun. Kelompok umur produktif lebih mendominasi dapat dilihat pada tabel proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di bawah ini:

Tabel 2.54
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kota Singkawang Tahun 2025-2045

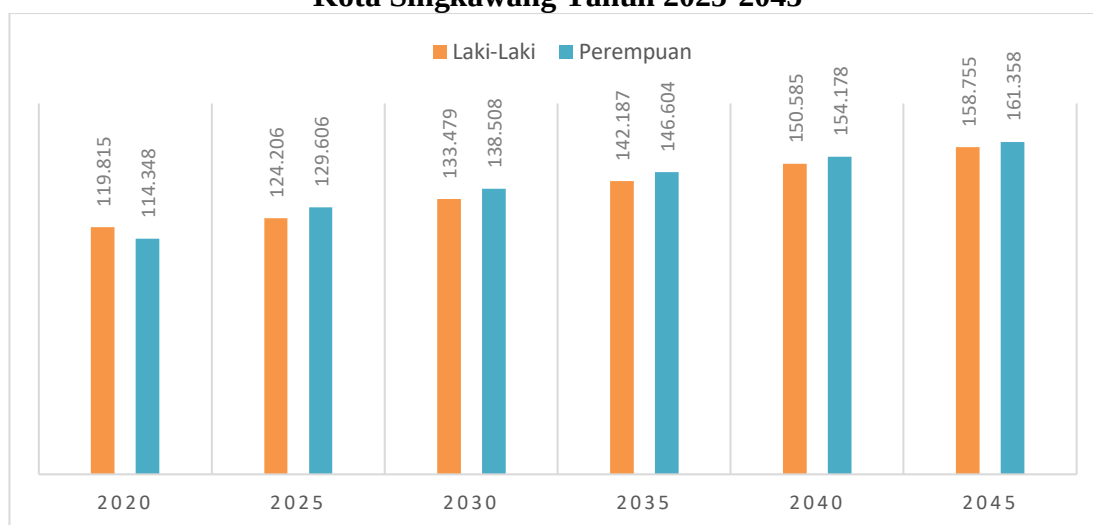
NO	KELOMPOK UMUR	BASELINE	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	0-4	23.068	23.103	22.601	22.369	22.738	23.583
2	5-9	20.980	23.275	23.314	22.814	22.577	22.950
3	10-14	20.268	21.173	23.497	23.530	23.028	22.793
4	15-19	19.341	20.398	21.311	23.651	23.690	23.180
5	20-24	20.534	19.472	20.534	21.460	23.814	23.850
6	25-29	21.308	20.922	19.843	20.924	21.879	24.272
7	30-34	19.718	21.885	21.482	20.380	21.492	22.475
8	35-39	17.729	20.001	22.190	21.782	20.672	21.803

NO	KELOMPOK UMUR	BASELINE	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
9	40-44	15.662	17.756	20.025	22.210	21.806	20.700
10	45-49	13.690	15.582	17.670	19.929	22.109	21.706
11	50-54	11.219	13.481	15.351	17.421	19.657	21.816
12	55-59	9.705	10.868	13.077	14.912	16.943	19.128
13	60-64	7.693	9.179	10.294	12.414	14.190	16.142
14	65-69	5.951	6.995	8.379	9.431	11.421	13.087
15	70-74	3.374	5.056	5.970	7.202	8.160	9.916
16	75+	3.923	4.666	6.449	8.362	10.587	12.712
	Jumlah	234.163	253.812	271.987	288.791	304.763	320.113

Sumber: BPS Kota Singkawang, diolah

Kondisi proyeksi jumlah penduduk Kota Singkawang tahun 2025-2045 menunjukkan kondisi yang terus meningkat tiap tahun. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 19.649 jiwa, di tahun 2030 mengalami kenaikan sebanyak 18.175 jiwa, di tahun 2035 mengalami kenaikan sebanyak 16.804 jiwa, di tahun 2040 mengalami kenaikan sebanyak 15.972 jiwa dan pada tahun 2045 mengalami kenaikan sebanyak 15.350 jiwa. Jadi rata-rata kenaikan proyeksi jumlah penduduk kota singkawang tahun 2025-2045 sebesar 17.190 jiwa. Selain itu jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 di tahun 2020 sebesar 3.374 jiwa, dan di tahun 2045 sebesar 9.916 jiwa.

Grafik 2.47.
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: BPS Kota Singkawang 2024, diolah.

Kondisi proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin Perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki pada periode 2025-2045 dengan kondisi tren yang terus meningkat dengan rata-rata perbandingan laki-laki 0,49 persen dan Perempuan sebanyak 0,51 persen.

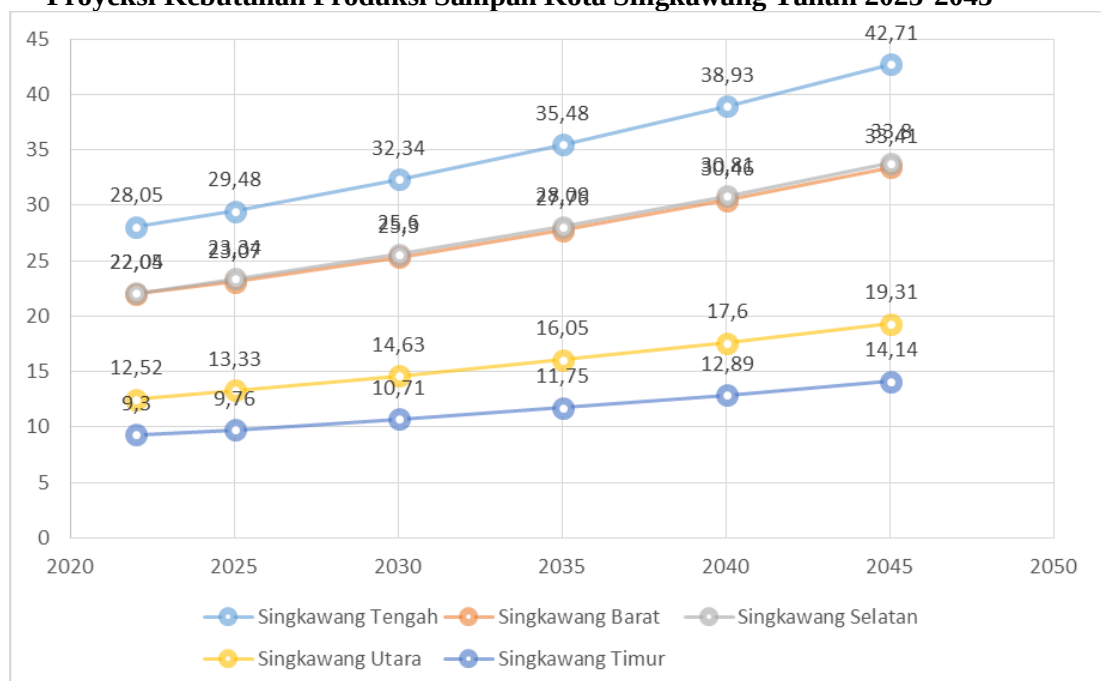
2.6.2. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana 2025-2045

2.6.2.1. Persampahan

Timbulan sampah yang dihasilkan dari penduduk kota Singkawang adalah 95,4 ton/hari. Total kapasitas maksimal TPS 81,1 ton dan sebaran TPS tidak merata. Dari 95,4 ton sampah yang dapat berkurang hanya sebesar 17 ton dan diangkut ke TPA 74 ton. Dari 74 ton yang diangkut ke TPA hanya 0,4% yang dilakukan pengolahan berupa pirolisis, kompos dan BBJP, sementara lainnya masuk ke landfill.

Dengan melihat kondisi tersebut maka dibutuhkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai berikut :

Grafik 2.48.
Proyeksi Kebutuhan Produksi Sampah Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2023;

Tabel 2.55
Proyeksi Fasilitas Persampahan
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Keterangan	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Produksi Sampah (L/Hari)					Jumlah (2025-2045)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Sel zona sampah	1 zona	1 Paket	-	1 paket	-	1 paket	3 paket
2	Bangunan pemilah sampah	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket
3	Bangunan workshop	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket
4	Container sampah	24 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	25 unit
5	Mobil armroll	5 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	11 unit
6	Bangunan depo/TPST	1 unit	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	15 unit
7	Hopper	-	6 unit	1 unit	5 unit	1 unit	5 unit	18 unit
8	Beko loader	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
9	Excavator	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
10	Bulldozer	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	2 unit
11	conveyor	1 unit	6 unit	2 unit	5 unit	2 unit	5 unit	20 unit
12	Mesin press	1 unit	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	15 unit
13	Road Sweeper	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
14	Mobil compactor	-	-	1 unit	-	1 unit	-	2 unit
15	Kendaraan roda tiga	18 unit	25 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	225 unit
16	Mesin pencacah sampah	1 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	30 unit
17	Mesin pemilah	-	1 unit	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	10 unit
18	Mobil operasional pick up	3 unit	-	2 unit	2 unit	-	2 unit	6 unit
19	Incinerator sampah	-	-	2 unit	-	3 unit	-	5 unit
20	L-Truck	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
21	Dump Truck	13 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
22	Wood chipper	1 unit	1 unit	5 unit	6 unit	6 unit	6 unit	24 unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2023;

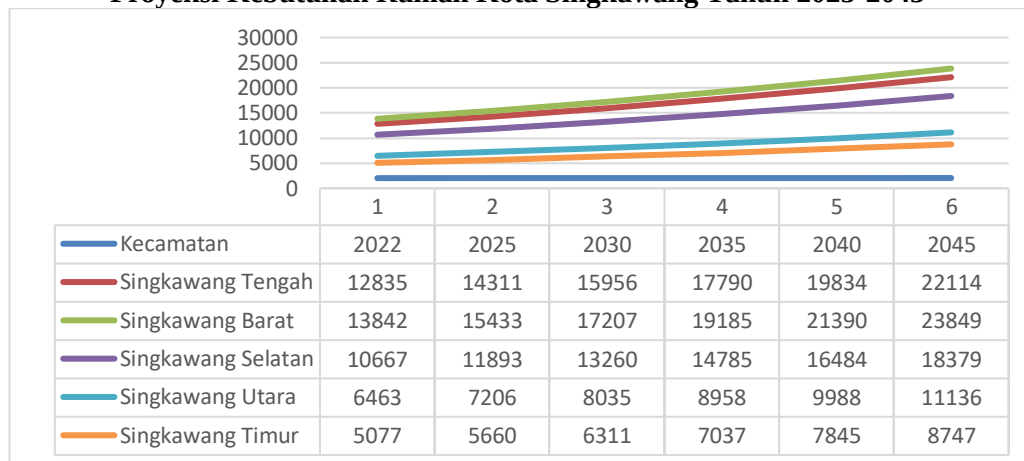
Perhitungan proyeksi produksi sampah di atas berdasarkan proyeksi pertambahan jumlah penduduk rata-rata yaitu sebesar 1,87% dengan estimasi timbulan sampah 0,395 kg/orang/hari.

2.6.2.2. Rumah / Tempat Tinggal

Kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang rata dan berkeadilan menjadi salah satu perwujudan pembangunan wilayah di Kota Singkawang yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi sarana dan prasarana dihitung dengan memperhatikan proyeksi jumlah penduduk dan cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan lahan permukiman Kota Singkawang sebagai berikut:

Grafik 2.49.
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2023

Kebutuhan rumah di kota singkawang setiap tahunnya mengalami kenaikan dimana seiringnya meningkatnya jumlah keluarga hal ini juga memicu meningkatnya kebutuhan rumah di mana pada kondisi tahun 2022 jumlah kebutuhan akan rumah sebesar 48.884 dimana kebutuhan rumah yang tertinggi berada pada kecamatan singkawang barat sebesar 13.842.

2.6.2.3. Air

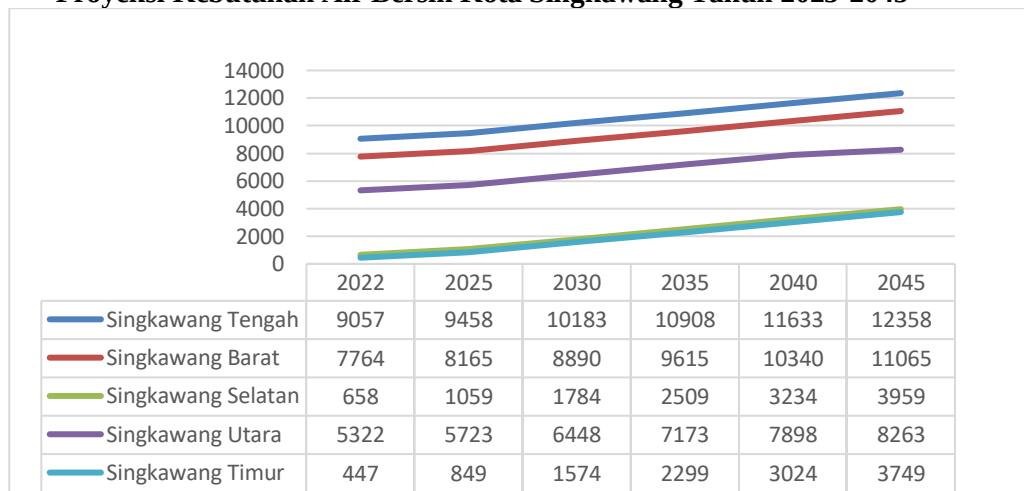
Kebutuhan sarana dan prasarana air bersih Kota Singkawang diproyeksikan dengan mempertimbangkan penggunaan air rerata dan perkiraan kehilangan air serta proyeksi jumlah penduduk. Adapun penggunaan air rerata tersebut terdiri dari penggunaan air pada rumah tangga, hidran umum, domestic dan non domestik. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Singkawang tahun 2045 diperkirakan sebesar 39.394 liter/hari. Dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.56
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (1/hr)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Singkawang Tengah	9057	9458	10183	10908	11633	12358
2	Singkawang Barat	7764	8165	8890	9615	10340	11065
3	Singkawang Selatan	658	1059	1784	2509	3234	3959
4	Singkawang Utara	5322	5723	6448	7173	7898	8263
5	Singkawang Timur	447	849	1574	2299	3024	3749
Jumlah		23248	25254	28879	32504	36129	39394

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2023;

Grafik 2.50.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2023;

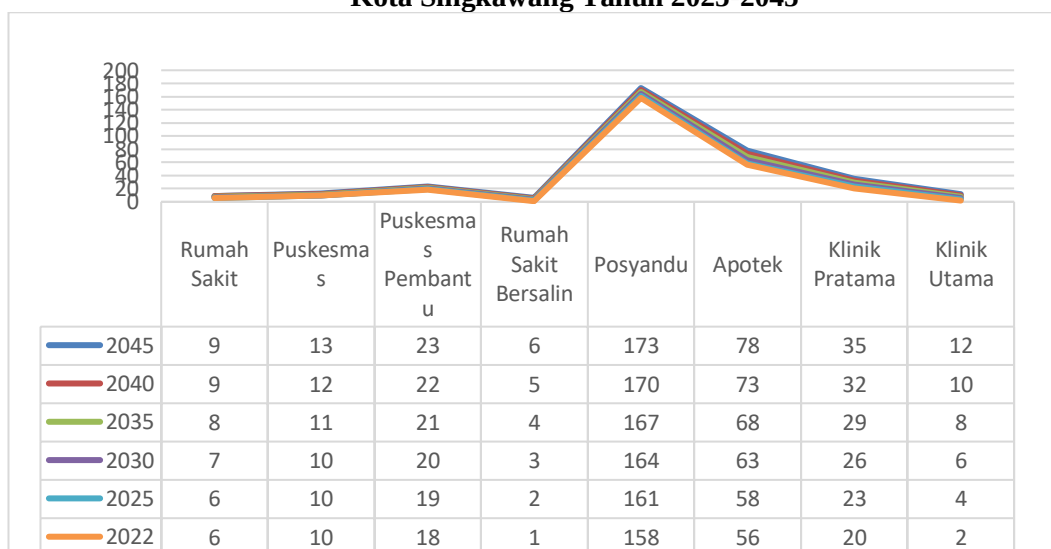
Rata-rata kebutuhan air bersih di Kota Singkawang dari tahun 2025-2045 mengalami peningkatan setiap periodenya. Kecamatan yang diproyeksikan membutuhkan air bersih paling banyak, yakni Kecamatan Singkawang Tengah sebesar 12.358 liter/hari. Dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Singkawang Timur sebesar 3.749 liter/hari. Ini disebabkan jumlah penduduk di Kecamatan Singkawang Tengah lebih besar daripada Kecamatan Singkawang lainnya.

2.6.2.5. Infrastruktur Kesehatan

Analisis kebutuhan fasilitas kesehatan merupakan aspek penting untuk mengukur proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan suatu wilayah. Kebutuhan

fasilitas kesehatan dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Singkawang. Fasilitas kesehatan yang diproyeksi terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit bersalin, posyandu, apotek, klinik pratama, dan klinik utama. Tahun 2045 proyeksi fasilitas kesehatan yang ideal dengan proyeksi jumlah penduduknya, yakni sebanyak 9 rumah sakit, 13 puskesmas, 23 puskesmas pembantu, 6 rumah sakit bersalin, 173 posyandu, 78 apotek, 35 klinik pratama, dan 12 klinik utama. Indikator yang menjelaskan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kota Singkawang pada tahun 2025-2045 dalam range waktu dua puluh tahun Kota Singkawang diringkas sebagai berikut:

Grafik 2.51.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

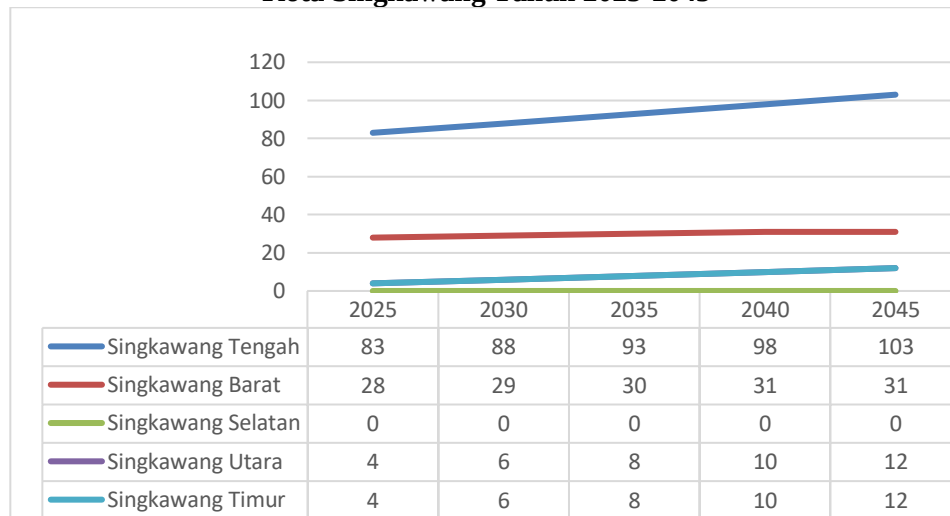


Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2024

2.6.2.6. Pasar

Kebutuhan pasar di Kota Singkawang dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Singkawang. Tahun 2045 proyeksi pasar yang ideal dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduknya, yakni sebanyak 158, dengan Kecamatan Singkawang Tengah yang paling banyak yakni sebanyak 103.

Grafik 2.52.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pasar
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

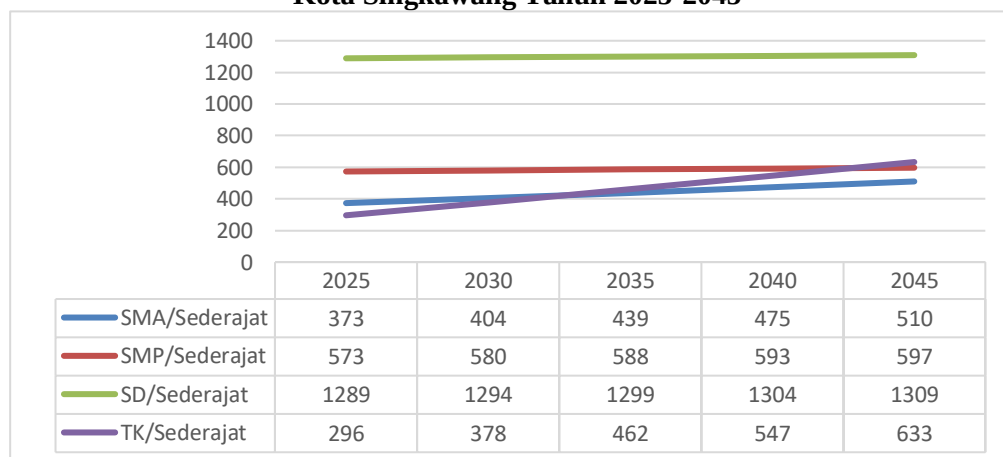


Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2023

2.6.2.7. Infrastruktur Pendidikan

Kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Singkawang dihitung dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Singkawang. Fasilitas pendidikan yang diproyeksikan antarlain TK, SD, SMP, SMA. Tahun 2045 fasilitas TK diproyeksikan sebanyak 633 unit, SD 1.309 unit, SMP 597 unit, dan SMA 510 unit. Berikut adalah proyeksi fasilitas pendidikan di Kota Singkawang:

Grafik 2.53.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kota Singkawang Tahun 2025-2045



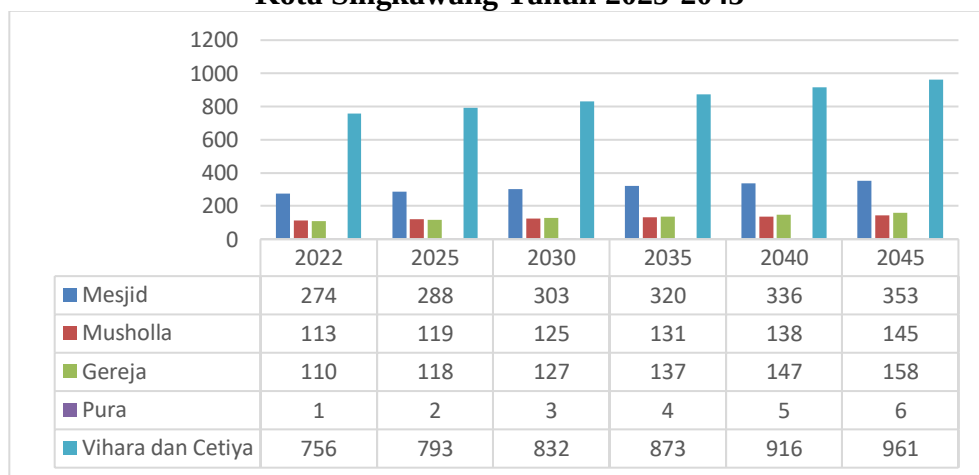
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Berdasarkan kondisi eksisting tahun 2022 jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan kota singkawang sebanyak 2.416 dimana berdasarkan proyeksi

jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah TK, SD, SMP dan SMA mengalami kenaikan hal ini juga berdampak pada kebutuhan fasilitas pendidikan terutama ruang kelas belajar. maka dari itu kebutuhan fasilitas pendidikan untuk tahun 2025 akan bertambah sebanyak 2.531, pada tahun 2030 akan mengalami peningkatan sebanyak 2.656.

2.6.2.8. Infrastruktur Rumah Ibadah

Grafik 2.54.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Ibadah
Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Singkawang, 2023

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan agama atau kepercayaan dan jumlah rumah ibadah maka didapati rasio jumlah rumah ibadah berbanding dengan jumlah penduduk berdasarkan agama adalah :

Tabel 2.57
Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Tempat Ibadah
Kota Singkawang Tahun 2023

Tempat Ibadah	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dalam Tempat Ibadah	Presentase	Jumlah Rumah Ibadah	Presentase	Rasio
Masjid dan Mushola	129.691	0,54066	387	0,3086	1 : 84
Gereja	31.269	0,13035	110	0,0877	1 : 284
Pura	74	0,00030	1	0,0008	1 : 74
Vihara	78.837	0,32866	756	0,6028	1 : 104

Sumber : Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kota Singkawang, 2023

Berdasarkan rasio di atas terlihat bahwa proporsi rumah ibadah di Kota Singkawang sudah cukup memadai, tingkat rasio paling tertinggi ada pada

rumah ibadah gereja yang digunakan penduduk agama katolik maupun Kristen. Oleh karena itu proyeksi kebutuhan rumah ibadah gereja tentunya akan lebih besar dari pada rumah ibadah lainnya.

Berdasarkan hal ini proyeksi kebutuhan fasilitas ibadah masjid, mushola, pura dan vihara dapat dinaikkan sebanyak persenan kenaikan jumlah penduduk yaitu sekitar 1%, sehingga dalam 5 tahun sekali kenaikan kebutuhan fasilitas rumah ibadah sebanyak 5%. Sedangkan kenaikan kebutuhan rumah ibadah gereja lebih besar sebanyak 1,5% setiap tahun, sehingga dalam 5 tahun terjadi kenaikan 7,5%.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan dampak pada daerah. Penetapan pusat-pusat kegiatan melalui rencana tata ruang baik pada level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota menjadi pintu masuknya berbagai program atau proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042, arah pembangunan Kota Singkawang adalah sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri, serta perdagangan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam hal kebijakan penataan ruang kota yang terdiri atas kawasan pemerintah, pariwisata, budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata yang unggul serta pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata. perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan. perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari rencana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah yang berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah Kota Singkawang. Pengembangan sistem perkotaan tersebut dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan. Berikut merupakan program dan kegiatan pada sistem perkotaan di Kota Singkawang.

Tabel 2.58.
Program Rencana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Kota Singkawang Tahun 2022-2042

	PROGRAM	LOKASI
A.	Perwujudan Struktur Ruang	
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan di Wilayah Kota	
1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	
1.1.1	Percepatan Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kota)	
	a. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Jalan Lingkar Barat - Jalan Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Utara, Jalan menuju lokasi rencana bandara
	b. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Singkawang Tengah dan - Kecamatan Singkawang Barat
	c. Penataan taman	Kecamatan Singkawang Barat
	d. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	- Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
	e. Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kawasan Kota Pusaka Singkawang	- Kecamatan Singkawang Tengah dan - Kecamatan Singkawang Barat
1.1.2	Mendorong Perkembangan bagian PPK yang belum termanfaatkan secara efisien	
	a. Penataan kawasan kumuh di Kelurahan Roban	- Kelurahan Roban

	PROGRAM	LOKASI
	b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengolahan sampah dan limbah B3	Kawasan TPA Wonosari, Kelurahan Roban
	c. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kecamatan Singkawang Barat dan - Kecamatan Singkawang Tengah
	d. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Singkawang Barat dan - Kecamatan Singkawang Tengah
	e. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	- Kecamatan Singkawang Barat dan - Kecamatan Singkawang Tengah
1.1.3	Revitalisasi dan percepatan pengembangan bagian strategis dari PPK	
	a. Pengembangan perumahan	- Kecamatan Singkawang Tengah
	b. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kecamatan Singkawang Tengah
	c. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Singkawang Tengah
1.1.4	Pengendalian perkembangan bagian kawasan PPK berbasis mitigasi bencana	
	a. Program normalisasi Sungai Singkawang	Kelurahan Pasiran, Kuala, Sungai Wie, dan Sungai Garam
	b. Pembuatan tanggul	- Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Safioedin dan Parit Hasan - Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat
	c. Bangunan Pengendali Banjir	
1.2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	
1.2.1	Percepatan Pengembangan SPPK	
	a. Penyusunan RDTR WP I, WP II, WP III, WP IV, WP V, WP VI Kota Singkawang	- Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
	b. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur

	PROGRAM	LOKASI
	c. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	
	d. Penataan taman	
	e. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	
1.2.2	Revitalisasi dan percepatan pengembangan SPPK	
	a. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara;
	b. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur
1.2.3	Pengendalian SPPK berbasis mitigasi bencana	
	a. Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Multi Bencana	- Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara;
	b. Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir (Sungai Sedau)	- Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur
	c. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	
	d. Pengembangan Sistem peringatan dini bencana banjir bandang, gempa bumi, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan	
	e. Penanaman mangrove di garis pantai yang berpotensi terkena abrasi dengan melibatkan Masyarakat sekitar kawasan tersebut	
	f. Penerapan aturan bangunan tahan gempa bumi dalam pelaksanaan PBG di daerah	
	g. Penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	
1.3.1	Percepatan Pengembangan PL (Pusat-pusat Lingkungan yang berada di Kawasan Strategis)	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Naram (Kec. Singkawang Utara);

	PROGRAM	LOKASI
		- Kelurahan Mayasopa (Kec. Singkawang Utara);
1.3.2	Revitalisasi dan percepatan pengembangan PL (Pusat-pusat Lingkungan yang berada relatif jauh dari daerah rawan bencana namun berpotensi cepat berkembang untuk meningkatkan keefektifan pelayanan kota)	- Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Sagatani (Kec. Singkawang Selatan)
1.3.3	Pengendalian PL berbasis mitigasi bencana (Pusat-pusat Lingkungan di daerah rawan bencana)	
1.3.4	Mendorong Pengembangan PL berbasis pemberdayaan masyarakat (Pusat-pusat Lingkungan di daerah yang kurang potensial atau relatif lambat kecenderungan perkembangannya)	
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana	
2.1	Sistem Jaringan Transportasi	
2.1.1	Sistem Jaringan Jalan	
	a. Jalan Umum	
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Primer	- jalan Alianyang;
		- sebagian Jalan Tebas- Singkawang, sepanjang 49,72 km (empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua kilometer);
		- Batas Kota Singkawang-Sungai Duri; dan
		- Sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 0,14 km (nol koma empat belas kilometer).
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Sekunder	- jalan Merdeka; jalan Diponegoro; sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 1,23 km (satu koma dua puluh tiga kilometer); sebagian jalan Tebas-Singkawang sepanjang 1,45 km (satu koma empat puluh lima kilometer); jalan Yos Sudarso; jalan Terminal Induk; jalan Yohana Godang; jalan GM. Situt; jalan Setia Budi; jalan Kalimantan; jalan Hasan Saad; Jalan akses Bandara 1 Kota Singkawang melalui Kelurahan Sedau – Kelurahan Pangmilang; Jalan akses Bandara 2 Kota Singkawang melalui Kelurahan Pangmilang – Kelurahan Sijangkung; dan jalan Lingkar Barat (bypass).
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Kolektor Primer	- Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Pahlawan.

	PROGRAM	LOKASI
	- Pengembangan jaringan jalan kewenangan kota berupa jalan kolektor sekunder	- jalan Baru; jalan Budi Utomo; jalan Bun Fui; jalan Conglongkong Trans; jalan Demang Akub; jalan Dr. Sutomo; jalan Firdaus HR; jalan Firdaus HR II; jalan Firdaus III; jalan GS. Lalanang; jalan Gunung Kaba'; jalan H. Bakar; jalan Hamid Matali; jalan Hermansyah; jalan Jembatan 25; jalan Kepol Mahmud; jalan Kridasana; jalan Kurau; jalan Lingkar Timur; jalan Mahad Usman; jalan Matang Lintang; - jalan Mesjid Raya; jalan Mesjid
		- Sei Bulan; jalan Niaga; jalan Nusantara; jalan P. Antasari; jalan Padat Karya Sungai Wie; jalan Pangmilang SP1-SP2; jalan Pelita; jalan Pemuda; jalan Pertanian; jalan Perwira; jalan Poros Pajintan; jalan Pramuka; jalan R. A. Kartini; jalan Raya Sagatani; jalan Raya Sebakuan; jalan Sama-Sama; jalan Saman Bujang; jalan Sanggau Kulor; jalan Sejahtera; jalan Semai; jalan SM. Tsjafoeddin; jalan Stasiun; jalan Tani SMP VII; jalan Trans Semelagi; jalan Trisula; jalan Veteran; jalan Veteran Ujung; jalan Wonosari; - dan jalan Yunus Yakub.
	- Pengembangan jaringan jalan kewenangan kota berupa jalan lokal sekunder	- Tercantum dalam Lampiran V
	- Pengembangan jaringan jalan lingkungan	- Tersebar di seluruh Kota Singkawang
	b. Pengembangan Jaringan Jalan Kewenangan Kota Berupa Jalan Khusus	- Jalan Tanjung Bajau dari Kawasan Wisata Palm Beach menuju Sinka Island Park
	c. Perwujudan Jalan Tol	- Jalan tol yang menghubungkan Pontianak - Mempawah- Bengkayang-Singkawang - Pintu Tol Singkawang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
	d. Perwujudan Jalan Bebas Hambatan	Kota Singkawang
	e. Terminal Penumpang	
	- Perwujudan Terminal penumpang Tipe A	- Terminal Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah

	PROGRAM	LOKASI
	- Pengembangan terminal penumpang Tipe C	- Terminal Beringin di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah; Terminal Pasiran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat; Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara; Kelurahan Pangmilang - Kecamatan Singkawang Selatan; dan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur.
	f. Perwujudan Terminal Barang	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan
	g. Revitalisasi Jembatan Timbang Barang	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan
	h. Pembangunan Jembatan pada Daerah Perbatasan	Di seluruh wilayah Kota Singkawang
2.1.2	Sistem Jaringan Kereta Api	
	a. Penetapan secara definitif jalur untuk lintas rel KA dan stasiun KA	- Jalur Rel Kereta Api dari Bandara Supadio Pontianak–Mempawah–Singkawang – Batas Negara, melalui Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Tengah, dan Kecamatan Singkawang Utara
	b. Pengalokasian lahan untuk stasiun KA	- Stasiun Penumpang di Kecamatan Singkawang Utara; - Stasiun Operasi di Kecamatan Singkawang Selatan
	c. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	- Kecamatan Singkawang Selatan, - Kecamatan Singkawang Barat, - Kecamatan Singkawang Tengah, sampai Kecamatan Singkawang Utara
2.1.3	Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan	
	a. Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	- menghubungkan Kota Singkawang dengan Pelabuhan Pulau Tambelan
	a. Pelabuhan Penyeberangan	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan
2.1.4	Sarana Jaringan Transportasi Laut	
	a. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan Singkawang	- Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat
	b. Peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan	- Kelurahan Kuala, Kecamatan

	PROGRAM	LOKASI
		Singkawang Barat dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
2.1.5	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	
	a. Pengembangan dan Pemantapan Bandar Udara Umum Singkawang	- Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan
	b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Bandar Udara Khusus	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara
	c. Penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	- Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan
		- Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara
2.2	Sistem Jaringan Energi	-
2.2.1	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	- Jalan Raya Sedau; Jalan Batas Kota Singkawang-Sungai Duri; Jalan Ahmad Yani; Jalan Diponegoro; Jalan Merdeka; Jalan Bambang Ismoyo; Jalan Ratu Sepudak
2.2.2	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
	a. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sungai Wie	- Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah
	b. Pemeliharaan SUTT	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam, dan Kelurahan Naram di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Kuala, dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur.

	PROGRAM	LOKASI
	a. Pengembangan SUTM dan SUTR	- Disepanjang jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di Kota Singkawang; - Seluruh wilayah Kota Singkawang
	b. Pengembangan gardu induk/ gardu listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat	- Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah
	c. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa tenaga surya, angin, biogas/biomassa dan mikrohidro	- Seluruh Wilayah Kota Singkawang
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi	
2.3.1	Pengembangan Jaringan Tetap	- Seluruh Wilayah Kota Singkawang
2.3.2	Pengembangan Jaringan Bergerak	
	a. Pengembangan Jaringan Bergerak Terrestrial	Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
	b. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler Berupa <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, dan Kecamatan Singkawang Tengah
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
2.4.1	Sistem Jaringan Irigasi	
	a. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi primer	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
	b. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi sekunder	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; dan - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.

	PROGRAM	LOKASI
	c. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi tersier	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
	d. Pembuatan sumur resapan dan biopori	Seluruh Wilayah Kota
2.4.2	Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir berupa Kolam Retensi	- Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah
2.4.3	Bangunan Sumber Daya Air	
	a. Operasi dan Pemeliharaan Embung	- Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur dan - Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan
	b. Peningkatan Pintu Air	- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.

	PROGRAM	LOKASI
	c. Pengembangan Prasarana Irigasi	- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
2.5	Infrastruktur Perkotaan	
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM)	
	a. Jaringan Perpipaan	-
	- Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur - Kelurahan Semelagi Kecil dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara
	- Pengembangan Jaringan Air Baku	- Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;

	PROGRAM	LOKASI
	- Pengembangan Unit Produksi Berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA)	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, - Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara - Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;
	- Pengembangan Unit Produksi Berupa Reservoir	- Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah
	- Pengembangan Jaringan Produksi	- Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sungai Wie, di Kecamatan Singkawang Tengah; dan - Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara
	- Pengembangan Unit Distribusi Berupa Jaringan Distribusi	- hampir di seluruh Kota Singkawang kecuali Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur
	b. Pengembangan Bukan Jaringan Perpipaan terdiri dari Sumur Pompa	- Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Mayasopa, dan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	
	a. Pengembangan SPAL nondomestik	- Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Roban, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan - Kelurahan Bagak Sahwa dan Kelurahan

	PROGRAM	LOKASI
		Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur.
	b. Pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik terpusat	- Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan
	c. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat permukiman dengan pembangunan WC, septic tank rumah tangga atau septic tank bio filter	- Seluruh Kelurahan
2.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	- Di dekat kawasan pengolahan sampah perkotaan TPA Wonosari di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan pada Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan
2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan	
	a. Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas TPS	- Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan

	PROGRAM	LOKASI
		- Kelurahan Pajantan di Kecamatan Timur
	b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
	c. Peningkatan dan Pemeliharaan TPA	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
	d. Pengadaan zona baru TPA	Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
	e. Pengolahan sampah terpadu (3R), pemindahan lokasi TPA	Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	
	a. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	- jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan - lingkungan di Kota Singkawang
	b. Pengembangan ruang evakuasi bencana	- lapangan olahraga, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kantor pemerintah dan bangunan besar lain yang aman dari bencana
2.5.6	Sistem Drainase	-
	a. Normalisasi jaringan drainase primer	- Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, Sungai Semelagi Kecil, Sungai Pinang, Sungai Selakau, Sungai Air Putih, Sungai Air Hitam, Sungai Setapuk Besar, Sungai Setapuk Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Nangka, Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Sakok, Sungai Jamthang.
	b. Pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase sekunder	- disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor dan sebagian - lokal di Kota Singkawang.
	c. Pengembangan jaringan drainase tersier	- disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi jalan lokal di Kota Singkawang.

	PROGRAM	LOKASI
	d. Pengembangan sistem drainase terpadu antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier agar saling terkoneksi	- Seluruh Wilayah Kota
2.5.7	Jalur Sepeda	- Jalan Ahmad Yani, jalan Firdaus HR, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan diponegoro, Jalan pemuda, Jalan merdeka, Jalan setiabudi, Jalan sejahtera, Jalan Kalimantan, Jalan sudirman, dan Jalan nusantara
2.5.8	Jaringan Pejalan Kaki	- Jalan Firdaus HR, Jalan Dr. Sutomo, Jalan P. Antasari, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan Yos Sudarso, Jalan Alianyang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Firdaus HR II, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Pemuda, Jalan Nusantara, Jalan Perwira, Jalan R.A Kartini, Jalan Satria, Jalan Bintara, Jalan Sudirman, Jalan Kalimantan, Jalan GS. Lalanang, Jalan Yohana Godang, dan Jalan GM. Situt.
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang	
1	Perwujudan Kawasan Lindung	
1.1	Perlindungan terhadap badan air	- Sungai Singkawang Sungai Sedau Sungai Air Merah Sungai Selakau Sungai Setapuk Besar Sungai Garam Sungai Wie Embung Pajintan Danau Serantangan
1.2	Perlindungan terhadap Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya	
1.2.1	Perlindungan terhadap kawasan lindung gambut	- Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; dan - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.
1.3	Pelestarian Kawasan perlindungan setempat	
1.3.1	Pelestarian Kawasan sempadan pantai (100 m dari titik pasang tertinggi)	Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan
1.3.2	Pemasangan patok sempadan pantai guna pelestarian kawasan	- Pesisir Kota Singkawang
1.3.3	Pengendalian alih fungsi dengan penetapan sempadan sungai	- Sungai Acoi Sungai Garam Sungai Merah Sungai Pasi Sungai Sedau - Sungai Setapuk Besar Sungai Transad Sungai Wie - Sungai Singkawang

	PROGRAM	LOKASI
1.3.4	Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau atau waduk	- Danau Serantangan
1.4	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	
1.4.1	Pengadaan dan pembebasan lahan untuk RTH Publik	- Tersebar di 5 Kecamatan di seluruh Kota Singkawang
1.4.2	Pengembangan Rimba Kota	- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau, dan Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir, dan Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara.
1.4.3	Pengembangan Taman Kota	- Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat; dan - Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah
1.4.4	Pengembangan Taman Kecamatan	Kelurahan Rasau, Kecamatan Singkawang Utara
1.4.5	Pengembangan Taman Kelurahan	- Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat

	PROGRAM	LOKASI
1.4.6	Pengembangan pemakaman	- Seluruh Kota Singkawang
1.5	Pengembangan kawasan	
	konservasi	
1.5.1	Perlindungan terhadap kawasan cagar alam Gunung Raya Pasi	Kecamatan Singkawang Selatan dan Kecamatan Singkawang Timur
1.6	Pengembangan kawasan ekosistem mangrove	- Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk - Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan
1.6.1	Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove	- Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat - Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan
1.6.2	Pembuatan bangunan pengendali abrasi dan gelombang pasang	- Pesisir Kota Singkawang

BAB III

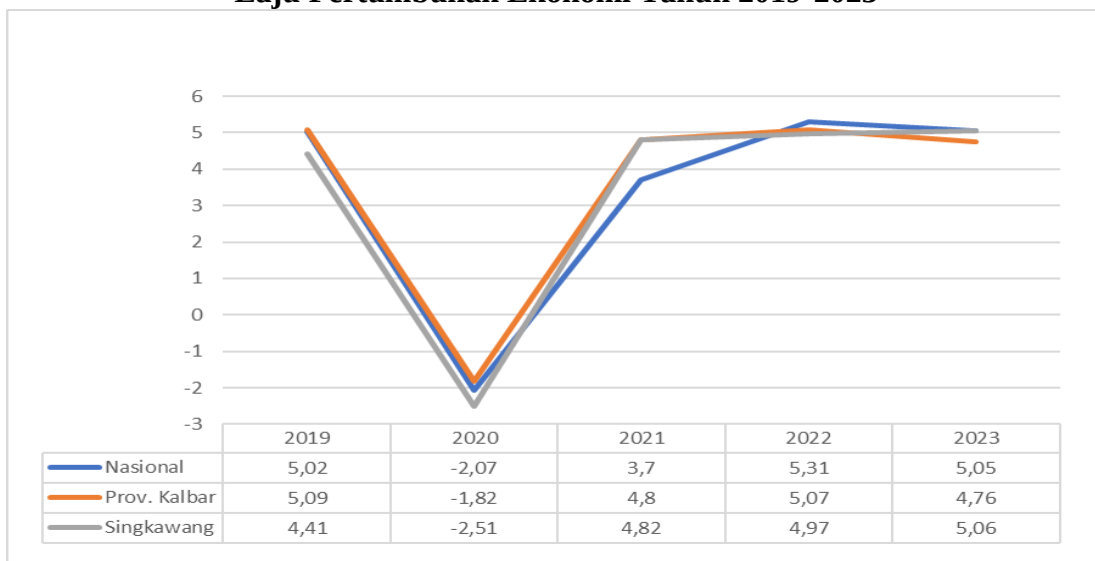
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1 Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang mengalami perbaikan sejak tahun 2021 dimana laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang meningkat sebesar 0,23 poin yakni dari 4,82% menjadi 5,05% pada tahun 2022.

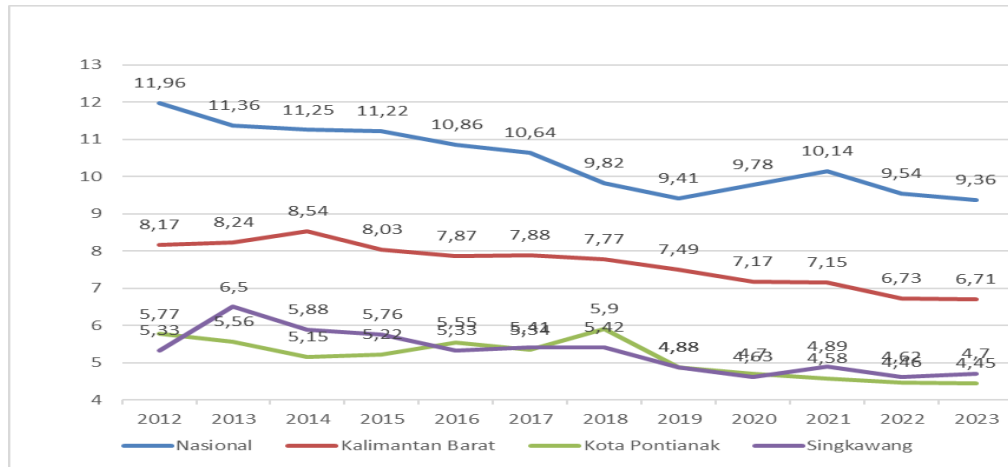
Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Penduduk miskin kota Singkawang mengalami kenaikan walaupun terbilang masih kecil yakni 0,03% dari semula 4,67% di tahun 2022 menjadi 4,70% di tahun 2023 dengan jumlah kenaikan orang miskin sebanyak 240 jiwa, hal itu dapat menggambarkan kurang berhasilnya kebijakan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka penurunan kemiskinan di Kota Singkawang.

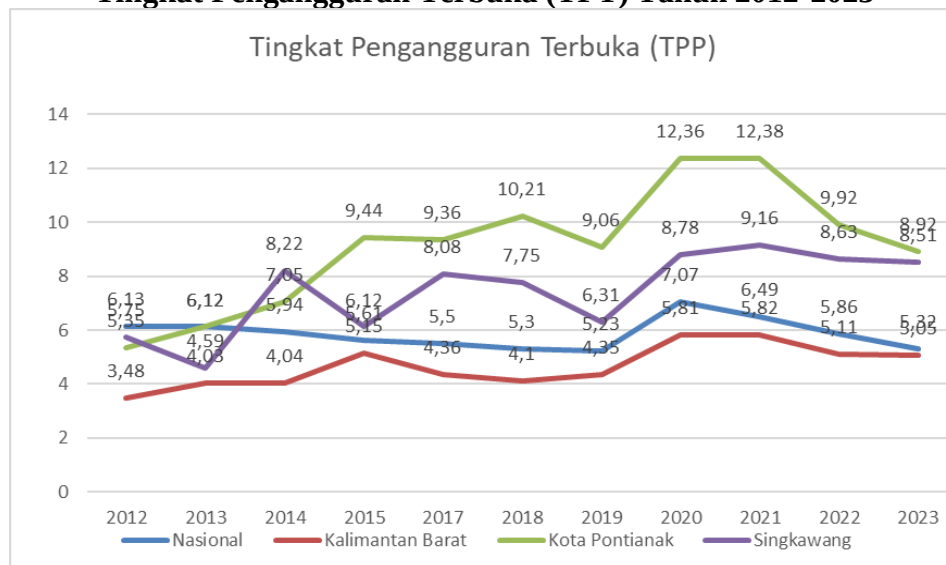
Grafik 3.2
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Singkawang masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang pada tahun 2021-2023 walaupun mengalami penurunan yakni tahun 2021 nilai TPT Kota Singkawang sebesar 9,16%, nilainya turun pada tahun 2022 sebesar 0,53% menjadi 8,63%, dan tahun 2023 turun sebesar 0,12% menjadi 8,51%. Namun apabila dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, tingkat pengangguran di Kota Singkawang masih cukup tinggi sehingga perlu diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Grafik 3.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012-2023



Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor peternakan dan perikanan bisa menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Pada sub sektor perikanan, produksi perikanan mengalami kenaikan dari 5.042 ton pada tahun 2022 menjadi 5.146 Ton pada tahun 2023. Namun jumlah produksi tahun 2023 lebih kecil dibanding tahun 2021 yakni sebesar 5.650 ton. Adapun penurunan produksi perikanan terjadi pada perikanan perairan umum, perikanan budidaya dan perikanan laut. Pada tahun 2023, kategori ini memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,32 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11,82 persen.

Adapun Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini sebesar 3,61 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,94 persen.

Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kota Singkawang. Kategori Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar ketiga pada tahun 2023. Kategori Industri Pengolahan menyumbang sebesar 13,25 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Singkawang pada tahun 2023 atau senilai 1.709.021,1 juta rupiah, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 14,44 persen pada tahun 2022 atau senilai 1.720.961,0 juta rupiah.

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kota Singkawang terutama di wilayah utara Kalimantan Barat. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM. Adapun kontribusi sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum pada PDRB Atas Dasar harga Berlaku pada tahun 2023 sebesar 3,92% atau senilai 505.798, juta rupiah meningkat 0,27 persen dari 3,65 persen pada tahun 2022 dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 435.396,6 juta rupiah dengan urutan kesembilan dari sektor lainnya.

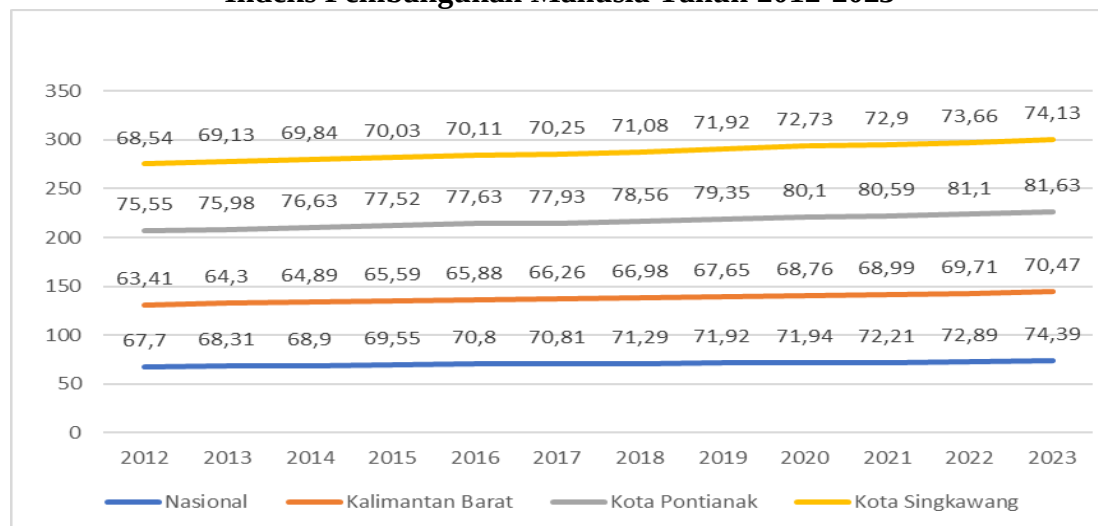
Dari sisi akomodasi, pada tahun 2023 Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) di Kota Singkawang sebesar 34,51 persen. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik tercatat sebesar 1,55 hari dan 1,17 hari.

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan perbaikan layanan urusan perdagangan. Selama lima tahun terakhir, sektor Perdagangan menjadi kontributor utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap nilai PDRB Singkawang. Pada tahun 2023, kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) sebesar 20,30 persen atau mencapai 2.618.450,7 juta rupiah. Pada tahun 2023, lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan positif yang cukup tinggi, yaitu sebesar 10,79 persen.

3.1.2 Aspek Sosial

Capaian pembangunan daerah dapat diukur dengan indikator makro pembangunan di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian kinerja pembangunan aspek sosial dapat dibandingkan antara Kota Singkawang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.4.
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Berdasarkan data BPS tahun 2023, IPM Kota Singkawang mengalami kenaikan sebesar 0,47 poin dimana pada tahun 2022, IPM Kota Singkawang sebesar 73,66 sedangkan pada tahun 2023 menjadi 74,13, hasil ini menjadikan IPM kota Singkawang

lebih baik 3,66 poin dari IPM Provinsi Kalimantan Barat yakni 70,47. Namun apabila dibandingkan dengan IPM Nasional dan Kota Pontianak pada tahun 2023, IPM Kota Singkawang lebih rendah 0,26 poin dan 7,5 poin, hal ini harus menjadi prioritas kebijakan dari Pemerintah Kota Singkawang untuk mengejar ketertinggalan dari Kota Pontianak.

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah. Indikasi ini dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Singkawang yakni 12,94 tahun pada tahun 2023 dimana masih sangat jauh dibandingkan dengan Kota Pontianak yakni 15,04 maupun dari Kabupaten Kubu raya yakni sebesar 13,89. Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Singkawang yakni 8,21 tahun pada tahun 2023 masih sangat jauh tertinggal dari Kota Pontianak dimana pada tahun 2023 mencapai 10,45.

Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, hal ini dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Singkawang Tahun 2023 sebesar 74,42 masih dibawah Kota Pontianak yakni 75,07.

Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang masih terdapat beberapa permasalahan umum sesuai data tahun 2023 seperti masih adanya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 56,51 jiwa; angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 10,46; Adapun balita gizi buruk sebanyak 0,32, prevalensi balita gizi kurang sebanyak 7,06.

3.1.3 Aspek Infrastruktur

Kuantitas dan Kualitas infrastruktur dasar belum optimal dengan melihat tingkat capaian pada tahun 2023 seperti proporsi panjang jalan yang sudah diaspal baru mencapai 61,15%, jalan beton sejumlah 4,4%, jalan kerikil 9,60% dan 24,85% masih jalan tanah dari panjang jalan kota yang mencapai 444,05 kilometer. Sedangkan jika ditinjau dari kondisinya, kondisi baik yang baru mencapai 38,30%; kondisi sedang mencapai 14,73% sedangkan kondisi rusak berat masih mencapai 33,94%.

Adapun kondisi drainase dalam keadaan baik yang baru mencapai 81,61%; persentase rumah tangga masing menggunakan air hujan dengan besaran 41,47%, sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan jalan dan drainase, akses pada

air bersih di beberapa wilayah.

Permasalahan banjir merupakan peristiwa yang setiap tahun menjadi topik pemberitaan. Pada musim hujan, banyak daerah-daerah di Kota Singkawang yang mengalami bencana banjir. Telah banyak usaha dilakukan pemerintah antara lain perbaikan saluran drainase dan pembuatan saluran pembawa namun belum ada yang menyelesaikan masalah walaupun mengalami penurunan luas kawasan banjirnya. Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alamiah pada umumnya meliputi topografi, jenis tanah, penggunaan lahan dan curah hujan. Tata kota dapat mengurangi banjir sejauh penataan tersebut memberi ruang untuk sistem menyerap dan mengalirkan air sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran permukaan yang liar yang menyebabkan banjir. Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi daya tampung sistem drainase/saluran air apakah mampu menampung air atau tidak pada debit tertentu di perkotaan.

Kota Singkawang memiliki banyak saluran primer yang bagian hilirnya secara langsung bermuara ke laut natuna. meski demikian masing-masing sungai utama yang berada di Kota Singkawang tidak saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Penyebab Banjir di Singkawang antara lain:

- a. Kemiringan yang sangat kecil pada bagian hilir Kemiringan lahan hanya 0,073 % dari muara sampai jarak 6 km dari muara. Elevasi lahan pada jarak tersebut hanya berada 85 cm diatas muka air pasang tertinggi. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan drain sangat kecil dan rentan sedimentasi. Sementara dasar sungai-sungai di Kota Singkawang pada jarak tersebut masih berada di bawah muka air pasang.
- b. Intensitas hujan tahunan yang tinggi. Intensitas hujan tahunan daerah ini antara 2.500 hingga 3.500 mm dengan jumlah hari hujan perbulannya bervariasi dari 9 hingga 23 hari. Intensitas hujan yang besar akan memberikan kontribusi pada debit banjir yang besar pula.
- c. Implementasi dari penataan drainase yang belum komprehensif.
- d. Pemanfaatan lahan di bantaran sungai yang sangat intensif di pusat perkotaan e.
- f. Pengaruh pasang surut muka air laut Pasang surut mengakibatkan efek *backwater* pada saluran drainase kota, sehingga mengurangi kecepatan aliran dan daya hantar Sungai Singkawang.
- g. Normalisasi Sungai Normalisasi sungai Singkawang dilakukan pada bagian hulu

dan hilir sungai, sementara pada bagian tengah yang merupakan *bottleneck* pengaliran justru tidak dilakukan perbaikan.

Kondisi sungai Singkawang telah mengalami pendangkalan akibat erosi di daerah hulu. Kondisi ini terutama terlihat di daerah muara sungai (di daerah pelabuhan Singkawang) di mana endapan lumpur hasil erosi terakumulasi dan mengakibatkan pendangkalan tersebut. Sedangkan di bagian tengah atau daerah pusat Kota, terjadi pula penyempitan alur sungai yang disebabkan adanya bangunan- bangunan sepanjang tepi sungai dan endapan sampah seperti di pasar Turi. Disamping itu, di bagian alur sungai banyak pula terdapat tanjung yang mengakibatkan terhambatnya aliran sungai, khususnya di bagian tengah ke hulu. Daya tampung sungai ini sudah berkurang, sehingga apabila intensitas hujan tinggi atau air laut mengalami pasang, maka air sungai tersebut mudah meluap. Demikian pula sebagian saluran pembuang air hujan yang membuang airnya ke sungai ini akan tertahan alirannya pada saat pasang naik yang menimbulkan masalah genangan/banjir rutin pada setiap musim hujan.

3.1.4 Aspek Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu cita-cita pembangunan. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kota Singkawang meningkat dari 50,4 Pada tahun 2018 menjadi 66,01 pada tahun 2023. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan lingkungan hidup adalah menurunnya Indeks Kualitas Air yakni 61,67 pada tahun 2022 dari target 80,00. Belum seimbangny jumlah sarpras yang tersedia dengan jumlah permintaan pelayanan masyarakat.

3.1.5 Aspek Tata Kelola

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 PAD di Kota Singkawang terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari objek pajak maupun retribusi.

Capaian fungsi pengawasan di Kota Singkawang telah memenuhi target nasional, yakni Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang berada di Level III. Capaian

tersebut diperkuat dengan peningkatan integritas aparatur yang ditandai dengan transparansi kegiatan dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan fungsi pengawasan di masa depan yaitu Sebagian besar perangkat daerah belum melakukan manajemen risiko.

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat dirangkum menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Tingkat Pendidikan Masih Belum Optimal
- Akses Pelayanan Kesehatan Belum Merata
- Daya saing SDM masih belum tinggi
- Kesenjangan Pendapatan Masyarakat belum merata
- Tingkat Pengangguran Relatif Masih Tinggi (TPT)
- Masih kurang tinggi kualitas dan kuantitas sektor manufaktur
- Kualitas infrastruktur masih belum merata
- Infrastruktur dasar masih kurang maksimal
- Kinerja pelayanan publik belum optimal
- Kurangnya mitigasi bencana terutama banjir
- Belum Optimalnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)
- Belum Optimalnya pengelolaan limbah B3 dan persampahan

3.2 Isu Strategis Daerah

3.2.1. Isu Sustainable Development Goals (SDG's)

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sementara itu, kesepakatan Global Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

3.2.2. Isu Strategis RPJPN Tahun 2025-2045

Isu strategis nasional tidak lepas dari isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu:

- rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global;
- kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai;
- deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
- belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
- belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
- rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;

- produktivitas tenaga kerja indonesia relatif tertinggal
- pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;
- rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi;
- kualitas pendidikan yang masih rendah;
- belum meratanya akses jaminan sosial;
- disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi
- belum meratanya kualitas pelayanan publik
- tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati

Maka dari itu dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. pendapatan per kapita setara negara maju;
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.

3.2.3. Isu-Isu Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

Permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Akses dan kualitas pendidikan masih rendah;
2. Pemajuan kebudayaan Kalimantan Barat belum optimal;
3. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah;
4. Kesenjangan sosial antar kelompok masih tinggi;
5. Kesetaraan dan keadilan gender rendah;
6. Pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik rendah;
7. Perlindungan masyarakat dan ketertiban dan ketenteraman belum optimal;
8. Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal;
9. Pembangunan kepemudaan belum optimal;
10. Pendapatan per kapita masyarakat kalbar masih rendah;

11. Rendahnya produktivitas Daerah;
12. Kuantitas dan kualitas sarpras belum sebanding dengan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah yang mendukung terbentuknya wilayah maju dan mandiri;
13. Tingginya degradasi lingkungan hidup;
14. Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal;
15. Kelembagaan pelayanan publik belum responsif menghadapi dinamika dan tuntutan publik;
16. Kualitas SDM dan partisipasi kerja yang masih rendah;
17. Tingkat kesejahteraan pekerja rendah.

Dari beberapa permasalahan yang terdapat di Kalimantan Barat, dirumuskan beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Kualitas kehidupan masyarakat (meningkatkan pembangunan manusia);
2. Transformasi ekonomi berkelanjutan;
3. Konektivitas dan pemerataan pembangunan;
4. Lingkungan hidup dan perubahan iklim;
5. Tata kelola pemerintahan;
6. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

3.2.4. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045, isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penataan kota yang meliputi tersedianya hunian layak dan terjangkau dan tersedianya ruang terbuka hijau ;
2. Terbatasnya perencanaan serta upaya adaptasi dan mitigasi bencana;
3. Belum optimalnya layanan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak;
4. Belum optimalnya pengelolaan lahan dan lahan kritis;
5. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan persampahan;
6. Belum optimalnya layanan terhadap perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
7. Belum optimalnya peningkatan gizi dan kesehatan pada balita;

3.2.5. Isu Strategis Kota Singkawang

Berdasarkan dari beberapa dokumen diatas, dapat ditetapkan isu strategis pembangunan Kota Singkawang sebagai berikut:

1. belum optimalnya layanan pendidikan, kesehatan Perlindungan sosial dan ketenagakerjaan;
2. belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
3. belum meratanya kualitas pelayanan publik;
4. belum optimalnya penataan kota yang meliputi tersedianya hunian layak dan terjangkau;
5. belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
6. belum optimalnya layanan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak;
7. terbatasnya perencanaan serta upaya adaptasi dan mitigasi bencana terutama bencana banjir.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi dan misi pembangunan Kota Singkawang merupakan harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan, melalui upaya dan tindakan yang harus dicapai dalam jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yakni tahun 2025-2045.

Visi dan misi Pembangunan Kota Singkawang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menentukan arah pembangunan, dan dapat dijadikan landasan atau sebagai dasar untuk menjadi acuan untuk merancang inovasi mendukung perkembangan dan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2025-2045.

Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Singkawang yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka panjang serta sejalan dengan visi RPJPD Kalimantan Barat“ Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dan mengacu visi Indonesia Emas 2045. Selain itu Visi pembangunan jangka panjang daerah juga mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis.

Isu strategis pembangunan Kota Singkawang yaitu :

1. belum optimalnya layanan pendidikan, kesehatan Perlindungan sosial dan ketenagakerjaan;
2. belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
3. belum meratanya kualitas pelayanan publik;
4. belum optimalnya penataan kota yang meliputi tersedianya hunian layak dan terjangkau;
5. belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
6. belum optimalnya layanan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak;
7. terbatasnya perencanaan serta upaya adaptasi dan mitigasi bencana.

Berdasarkan isu Strategis Kota Singkawang, maka dirumuskan Visi dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Singkawang Cemerlang 2045;

Kreatif, Maju Merata, Atraktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Penjelasan Visi Singkawang Cemerlang 2045 adalah sebagai berikut :

- Kreatif

Kreatif berdasarkan KBBI adalah 1) memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; 2) bersifat (mengandung) daya cipta: *pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi*.

Konteks Visi kreatif adalah bahwa menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi, maka diharapkan sumber daya manusia Kota Singkawang memiliki daya kreatif, inovatif sehingga kualitas kerjanya lebih produktif dan memiliki daya saing yang tinggi.

- Maju dan Merata

Singkawang sebagai kota dengan luas wilayah terkecil kedua di Kalimantan Barat, maka kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sosial dan ekonomi akan berjalan baik, jika didukung dengan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah Kota Singkawang, yang meliputi jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi sehingga mendukung kemajuan ekonomi di Kota Singkawang akan semakin berkembang.

- Atraktif

Atraktif mengacu pada Kota Singkawang yang merupakan daerah tujuan wisata, baik wisata budaya, wisata alam maupun wisata kuliner, sehingga diharapkan Pengembangan pariwisata dapat lebih atraktif, agar wisatawan yang berkunjung di Kota Singkawang dapat lebih lama, sehingga dampaknya dapat menggerakkan perekonomian di Kota Singkawang.

- Berkelanjutan

Konteks berkelanjutan adalah Pembangunan kota Singkawang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi.

Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

- **Berdaya Saing**

Berdaya saing memiliki makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar bahkan lebih tinggi dari daerah lain.

Untuk mewujudkan daya saing Kota Singkawang melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, manajemen SDM yang berkualitas, pelayanan publik yang prima serta, serta tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif.

Tabel 4.1
Perumusan Visi

No	Isu Strategis	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	belum optimalnya layanan pendidikan, kesehatan Perlindungan sosial dan ketenagakerjaan;	Kreatif dan berdaya saing	Singkawang Cemerlang 2045; Singkawang Kreatif, Maju Merata, Berkelanjutan, Atraktif dan Berdaya Saing
2.	- belum optimalnya penataan kota yang meliputi tersedianya hunian layak dan terjangkau - belum optimalnya layanan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak;	Maju dan Merata	
3.	belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Atraktif	
4.	- belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup - terbatasnya perencanaan serta upaya adaptasi dan mitigasi bencana	Berkelanjutan	
5.	belum meratanya kualitas pelayanan publik	Berdaya saing	

4.1.1 Penyelarasan antara visi dan sasaran RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPD Kota Singkawang

Berdasarkan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPD Kota Singkawang, dapat dilihat keselarasan visi sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Penyelarasan Visi

	Visi RPJPN 2025-4025	Visi RPJPD Prov. Kalimantan Barat 2025-2045	Visi RPJPD Kota Singkawang 2025-2045
	Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Singkawang Cemerlang 2045; Kreatif, Maju Merata, Berkelanjutan, Atraktif dan Berdaya Saing

4.1.2 Sasaran Visi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Visi Kota Singkawang yakni Singkawang Cemerlang 2045; Kota Singkawang Kreatif, Maju Merata, Berkelanjutan, Atraktif dan Berdaya Saing tercermin melalui 5 (lima) sasaran utama visi yaitu:

- Peningkatan pendapatan per kapita dengan indikatornya adalah PDRB per kapita dan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan;
 - Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikatornya adalah Tingkat Kemiskinan, Rasio gini, Kontribusi PDRB Kab/Kota;
 - Kepemimpinan Daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan indikatornya adalah Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah;
 - Peningkatan daya saing Sumber daya manusia dengan indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia;
 - Penurunan emisi GRK menuju net zero emission dengan indikatornya adalah Penurunan intensitas emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.
- Untuk lebih jelasnya gambaran target sasaran visi tahun 2025-2045 dalam mendukung capaian visi Kota Singkawang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Sasaran Visi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Base Line 2025	Sasaran 2045
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita		
	a. PDRB per Kapita (Rp Juta)	54,48-54,52	374,230
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	n/a	n/a
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	14,00	16,33
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,5	2,5
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,290	0,250
	c. Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	4,75	4,88
	d. Pertumbuhan Ekonomi	5,44	6,49
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat		
	Indeks Inovasi Daerah	60	80
	Indeks Daya Saing Daerah	3,93	4,2-4,5
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,07	87,29 – 88,00
	Indeks Modal Manusia (IMM)	n/a	0,75
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Net Zero Emission		
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK.	67,42	99,62
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,82	78,63

4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

4.2.1 Telaah Misi RPJPN

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari:

1. Transformasi Sosial; Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggulan, dan berdaya saing.
2. Transformasi Ekonomi; Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi

- ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Transformasi Tata Kelola; Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga ,komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilisasi, dan kepemimpinan indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
 8. Kestinambungan Pembangunan; Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian indonesia emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

4.2.2. Telaah Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan misi Kota Singkawang untuk mencapai visi dan sasaran visi harus memperhatikan misi pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-

2045 yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan untuk mendukung Indonesia Emas. Penjabaran 8 (delapan) misi tersebut dapat dicermati sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
2. Transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas dengan akselerasi pengembangan iptek, ekonomi produktif dan sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, umkm dan koperasi dan penerapan kota untuk mendukung pertumbuhan.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dengan tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, pemerintahan yang efektif dan responsif serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan meningkatkan ketangguhan multidimensi meliputi ketangguhan sosial-budaya, pembangunan karakter dan keseimbangan hubungan timbal-balik antara komponen sosial-budaya dan ekologi serta optimalisasi modal sosial dan modal budaya masyarakat khususnya dalam menghadapi risiko bencana dan iklim dan pelestarian sumberdaya alam.
6. Pembangunan kewilayahan yang diwujudkan untuk peningkatan pemerataan dan keadilan pembangunan dan diperkuat melalui transformasi supremasi hukum, stabilitas, ketangguhan diplomasi dan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang sesuai dengan konteks dan karakter masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan yang menjadi kunci pengembangan wilayah dan mendukung agenda transformasi.
8. Kesinambungan pembangunan yang terwujud dalam pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan.

Delapan misi di atas termasuk ke dalam upaya strategis untuk mencapai visi dan sasaran visi Provinsi Kalimantan Barat.

4.2.3 Misi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Misi merupakan Langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi pembangunan jangka panjang mengacu pada perumusan visi, masalah pokok pembangunan dan berdasarkan faktor lingkungan strategis.

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 dengan memperhatikan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045. Maka untuk mewujudkan visi Singkawang Cemerlang 2045 Kota Singkawang Kreatif, Maju Merata, Berkelanjutan, Atraktif dan Berdaya Saing, ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial yang inklusif
2. Ekonomi Inklusif dan berdaya saing
3. Transformasi Tata Kelola yang adaptif
4. Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang berkualitas
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berkelanjutan

Adapun perumusan dan penjelasan Misi RPJPD Kota Singkawang adalah sebagai :

Misi 1 : Transformasi Sosial yang Inklusif

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang yang memiliki daya kreatif, inovatif sehingga kualitas kerjanya lebih produktif dan memiliki daya saing yang tinggi, maka upaya yang dilakukan adalah melalui Transformasi sosial yang inklusif. Sehingga diharapkan akan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang, menurunkan kemiskinan ekstrim menuju nol, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang

Misi 2: Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing

Misi Ekonomi Yang Inklusif dan Atraktif adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang.

Kota Singkawang sebagai Kota tujuan wisata di Kalimantan Barat memiliki berbagai potensi wisata, baik alam, budaya dan kuliner. Predikat Singkawang sebagai Kota Tertoleran di Indonesia merupakan kekuatan yang dimiliki Kota Singkawang untuk menarik wisatawan baik lokal maupun manca negara untuk dapat mengunjungi destinasi wisata di Kota Singkawang. Peluang ini menjadi kekuatan untuk menciptakan Pariwisata yang atraktif, sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Misi 3: Transformasi Tata Kelola yang Adaptif

Untuk mewujudkan Kota Singkawang yang kreatif, inovatif, produktif dan mempunyai daya saing tinggi, maka upaya yang dilakukan adalah melalui transformasi tata Kelola yang adaptif.

Akselerasi reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, melalui sistem birokrasi yang adaptif, *agile*, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai bentuk akselerasi perubahan perlu dilakukan transformasi organisasi meliputi perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut tentunya akan berjalan optimal dengan didukung dengan kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi.

Penguatan tata kelola yang adaptif diharapkan juga dapat meningkatkan keamanan dari kriminalitas melalui penguatan kinerja aparatur pelayanan ketentraman dan ketertiban sehingga tingkat keamanan semakin tinggi.

MISI 4: Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang berkualitas

Untuk mewujudkan Penataan Kota yang berkualitas, Maju dan Merata upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan penataan infrastruktur perkotaan dan pemukiman yang berkualitas.

Infrastruktur memegang peranan penting untuk kemajuan Kota Singkawang, Pembangunan infrastruktur menjadi landasan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan Pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan air bersih, sanitasi dan pemukiman yang layak merupakan bagian dari infrastruktur perkotaan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Singkawang.

Infrastruktur transportasi jalan, jembatan akan membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

MISI 5: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berkelanjutan

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Misi ini berkaitan dengan Kota Singkawang yang memiliki tantangan terkait masalah lingkungan hidup berupa kerusakan lahan akibat pertambangan ilegal, dan pencemaran air dari aktivitas domestik dan industri. Selain itu kerusakan lingkungan juga diakibatkan masalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai dan kerusakan lingkungan lainnya.

Tabel 4.4.
Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kab/Kota

Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Prov.Kalimantan Barat 2025-2045	Misi RPJPD Kota Singkawang 2025-2045
1. Transformasi Sosial 2. Transformasi Ekonomi 3. Transformasi Tata Kelola 4. Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 8. Kestinambungan Pembangunan	1. Mewujudkan transformasi sosial 2. Transformasi ekonomi 3. Transformasi tata kelola pemerintahan 4. Keamanan daerah tangguh 5. Pemantapan ketahanan sosial budaya 6. Pembangunan kewilayahan 7. Dukungan sarana dan prasarana 8. Kestinambungan pembangunan	1. Transformasi Sosial yang Inklusif 2. Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing 3. Transformasi Tata Kelola yang Adaptif 4. Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang berkualitas 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berkelanjutan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan turunan dari misi yang menggambarkan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Adapun arah kebijakan Kota Singkawang ini dibagi menjadi 4 tahapan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Tahap I)

Arah kebijakan tahap pertama yakni Tahap Perkuatan Pondasi Transformasi adalah sebagai berikut:

- a. **Transformasi Sosial yang inklusif:** Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan sosial.
- b. **Ekonomi Inklusif dan berdaya saing:** Penguatan sektor unggulan dan tata kelola perizinan, pembangunan kawasan wisata dan peningkatan kapasitas angkatan kerja pada sektor unggulan.
- c. **Transformasi Tata Kelola yang Adaptif:** Penataan Kelembagaan, Regulasi, digitalisasi dan inovasi dan terbangunnya rasa aman dan ruang demokrasi bagi masyarakat.
- d. **Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang Berkualitas:** pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar;
- e. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:** penguatan Tata Kelola lingkungan hidup dan peningkatan mitigasi dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.

2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Tahap II)

Arah kebijakan tahap kedua yakni Tahap Akselerasi Transformasi adalah sebagai berikut:

- a. **Transformasi Sosial yang Inklusif:** peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial yang inklusif.
- b. **Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing:** peningkatan iklim investasi melalui promosi dan insentif penanaman modal, peningkatan destinasi wisata.
- c. **Transformasi Tata Kelola yang Adaptif:** peningkatan Peran Kelembagaan berbasis teknologi informasi dan meningkatnya keamanan ketertiban ruang

demokrasi bagi masyarakat.

- d. **Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang Berkualitas:** peningkatan penyediaan infrastruktur dasar.
- e. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:** perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan.

3. Arah Kebijakan Periode 2034-2039 (Tahap III)

Arah kebijakan tahap ketiga yakni Tahap Perluasan/Ekspansi Transformasi adalah sebagai berikut:

- a. **Transformasi Sosial yang Inklusif:** penguatan daya saing SDM dan kolaborasi kelembagaan (Penta Helix) dalam perlindungan sosial;
- b. **Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing:** peningkatan Produktivitas, dan Daya Saing Sektor Unggulan dan penguatan kepariwisataan.
- c. **Transformasi Tata Kelola yang Adaptif:** penguatan fungsi kelembagaan adaptif dan ASN yang kompetitif dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebijakan pembangunan.
- d. **Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang Berkualitas:** optimalisasi penyediaan dan konektivitas infrastruktur dasar;
- e. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:** konsistensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Tahap IV)

Arah kebijakan tahap keempat yakni Tahap Perwujudan Singkawang Cemerlang adalah sebagai berikut:

- a. **Transformasi Sosial yang inklusif:** perwujudan SDM yang unggul dan kompetitif;
- b. **Ekonomi Inklusif dan berdaya saing:** perwujudan Ekonomi berkelanjutan dan perwujudan kepariwisataan yang unggul;
- c. **Transformasi Tata Kelola yang adaptif:** perwujudan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, kolaboratif dan pendayagunaan aset daerah dan

terciptanya rasa aman dan pelibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

- d. **Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang berkualitas:** perwujudan penataan kota yang berkualitas, maju dan merata; dan
- e. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:** perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun perumusan arah kebijakan RPJPD tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Periode I 2025-2029 Perkuatan Pondasi	Periode II Akselerasi Transformasi	Periode III Perluasan/ Ekspansi Transformasi	Periode IV Perwujudan Singkawang Cemerlang
1	2	3	4	5	6
Singkawang Cemerlang 2045; Kota Singkawang Kreatif, Maju Merata, Atraktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing	Transformasi Sosial yang inklusif	Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan sosial	Peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial yang inklusif	Penguatan daya saing SDM dan kolaborasi kelembagaan (Penta Helix) dalam perlindungan sosial	Perwujudan SDM yang unggul dan kompetitif
	Ekonomi Inklusif dan berdaya saing	Penguatan sektor unggulan dan tata kelola perizinan, Pembangunan Kawasan Wisata dan Peningkatan Kapasitas Angkatan Kerja Pada Sektor Unggulan	Peningkatan iklim investasi melalui promosi dan insentif penanaman modal, Peningkatan destinasi wisata	Peningkatan Produktivitas, dan Daya Saing Sektor Unggulan dan Peningkatan kepariwisataan	Perwujudan Ekonomi berkelanjutan dan Perwujudan kepariwisataan yang unggul

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Periode I 2025-2029 Perkuatan Pondasi	Periode II Akselerasi Transformasi	Periode III Perluasan/ Ekspansi Transformasi	Periode IV Perwujudan Singkawang Cemerlang
1	2	3	4	5	6
	Transformasi Tata Kelola yang adaptif	Penataan Kelembagaan, Regulasi, digitalisasi dan inovasi dan Terbangunnya rasa aman dan ruang demokrasi bagi masyarakat	Peningkatan Peran Kelembagaan berbasis teknologi informasi dan Meningkatnya keamanan ketertiban ruang demokrasi bagi masyarakat	Penguatan fungsi kelembagaan adaptif dan ASN yang kompetitif dan Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebijakan pembangunan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, kolaboratif dan pendayagunaan aset daerah dan terciptanya rasa aman dan pelibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan
	Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang berkualitas	Pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar	Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar	Optimalisasi penyediaan dan konektivitas infrastruktur dasar	Perwujudan penataan kota yang berkualitas, maju dan merata
	Pengelolaan lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Penguatan Tata Kelola lingkungan hidup dan Peningkatan	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan	Konsistensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perwujudan Pembangunan yang berkelanjutan

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Periode I 2025-2029 Perkuatan Pondasi	Periode II Akselerasi Transformasi	Periode III Perluasan/ Ekspansi Transformasi	Periode IV Perwujudan Singkawang Cemerlang
1	2	3	4	5	6
		mitigasi dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.	Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan.	dan Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.	

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045 yaitu Singkawang Cemerlang 2045; Kreatif, Maju Merata, Atraktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing, dengan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing visi sebagai berikut:

1. Kota Singkawang Kreatif adalah harapan agar SDM Kota Singkawang memiliki daya kreatif, inovatif sehingga kualitas kerjanya lebih produktif dan memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi.
2. Kota Singkawang yang Maju Merata adalah harapan agar pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah Kota Singkawang, yang meliputi jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi sehingga mendukung kemajuan ekonomi di Kota Singkawang akan semakin berkembang.
3. Kota Singkawang yang Atraktif adalah harapan Pengembangan pariwisata dapat lebih atraktif, agar wisatawan yang berkunjung di Kota Singkawang dapat lebih lama, sehingga dampaknya dapat menggerakkan perekonomian di Kota Singkawang.
4. Kota Singkawang yang Berkelanjutan adalah harapan agar Pembangunan kota Singkawang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi.

Dari sasaran yang dijabarkan diatas, dapat disederhanakan menjadi 5 sasaran pokok yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government);
4. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar;
5. Mewujudkan Manajemen Lingkungan Hidup yang Sirkular.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Kota Singkawang meliputi:

1. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan.

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*), mencakup:

(i) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan kurikulum adaptif dan sistem asesmen komprehensif; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta profesionalisme pengelola lembaga pendidikan; penguatan pembelajaran bagi murid dan guru berkebutuhan khusus; peningkatan integrasi soft skills, social skills, dan life skills dalam pembelajaran; peningkatan kecakapan literasi kelas awal; penguatan pendidikan karakter; serta pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;

(ii) Penguatan pembelajaran berbasis digital dan mitigasi pengaruhnya melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik, dan orang tua; penerapan pedagogi modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi pembelajaran (pedagogical-technological content knowledge; serta peningkatan ketersediaan

sumber pembelajaran digital, infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan pasokan energi (listrik);

(iii) Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan melalui penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini); peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; penguatan kebijakan diversifikasi layanan pendidikan; dan peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan;

(iv) Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyelarasan pemanfaatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; pemanfaatan sumber pendanaan inovatif; dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan.

3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan, melalui: (i) peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata; dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia

5. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan keluarga

termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (no one left behind, dengan arah kebijakan: (i) penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif; (ii) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme insentif, dan pelibatan vibrant community.

6. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

7. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Indonesia diharapkan akan mengambil peran sebagai salah satu pusat pengembangan Iptek dan Inovasi di Kawasan Asia dan dunia, terutama dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana.

8. Transformasi Digital

Transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (i) regulasi dan institusi; (ii) pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi; (iv) keterpaduan data (data enablement); (v) modal investasi teknologi financing technologies); serta (vi) riset dan inovasi.

9. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

Kebijakan terkait integrasi ekonomi domestik dan global difokuskan pada: (i) penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi; (ii) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada. , termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif; (iv) penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi; (v) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; (vi)

peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi.

10. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah kota sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global.

11. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan transformasi kebijakan fiskal, optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dan penguatan sektor keuangan, yang didukung dengan penguatan koordinasi dan sinergi para pemangku kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

12. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Dalam mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, arah kebijakan difokuskan pada (i) penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi, dan (ii) peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi.

13. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia.

14. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan saling berkaitan

erat dan memperkuat, yang antara lain bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan daerah di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antar daerah yang konstruktif.

15. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan energi adalah: perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi terutama gas dan listrik serta ketahanan pangan.

16. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan: (i) perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan; (ii) peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; (iii) peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; (iv) pengelolaan lahan secara berkelanjutan;

17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup: (i) peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan bakau, serta penerapan zero forest land-fires; (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi; (iii) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (iv) pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (v) pengembangan industri hijau; (vi) dukungan insentif fiskal dan non fiskal serta implementasi carbon pricing yang optimal; (vii) pembangunan bangunan gedung dan hunian yang rendah karbon; dan (viii) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

Tabel 5.2
Kerta Kerja Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
Transformasi Sosial yang inklusif	Kesehatan Untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	1.Usia Harapan Hidup (UHH)		74,12	77,5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
		Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.	2.Kesehatan Ibu dan Anak:					
			a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	55	18		
			b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,06	6,2		
		Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis), serta afirmasi di daerah 3TP	3.Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)					
			a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100		
			b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	95		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket
				Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan, terutama di daerah perbatasan	4.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100		
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	5.Hasil Pembelajaran:				
			a)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				i) Literasi Membaca	-		
				ii) Numerasi	-		
			b)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				i) Literasi Membaca	60,28-66,67		
				ii) Numerasi	49,65		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	c)	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,25-9,20	12		
			d)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,5-13,82	15,1		
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment	6.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		3,41	8,21		
			7.Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		59	75		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket
				Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5	6	7	8	9
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Wilayah melalui perlindungan sosial adaptif	8.Tingkat Kemiskinan (%)	4,3	1,0-2,3		
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	9.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25	90		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket
				Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5	6	7	8	9
		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat -setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas	10.Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	25	45		
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	37.Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)*	112	122		
			38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,78	87,41		
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	39.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65,96	70,69		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
	Masyarakat Inklusif	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Kalimantan.	40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,370	0,250		
Ekonomi Inklusif dan berdaya saing	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan pusat-pusat industri	11.Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		16,00-16,60	16,00-18,00	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
		Pengembangan destinasi wisata potensial dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja, seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam maupun destinasi MICE dan perkotaan	12.Pengembangan Pariwisata					
			a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,64	9,86		
			b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	9	14,4		
			13.Proporsi Investasi ekraf terhadap PDRB (ekraf yang sudah ber NIB).		0,77	0,99		
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai	14.Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
		industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	a.i	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)	1,43	4		
			a.ii	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%) / Usaha Mikro Naik Kelas menjadi Usaha Kecil	1,99	4		
			b	Rasio Kewirausahaan Daerah	19,4	21,5		
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	c	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,58	33		
		Peningkatan produktivitas BUMD.	d	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	4,47	5,34		
		Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling	15.Penciptaan Lapangan Kerja Baik :					

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
		dan transisi school-to-work	a). Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		7,5	2,75-3,5		
			b). Proporsi Penciptaan lapangan Kerja Formal (%)		n/a	n/a		
			16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		49	75		
			17.Tingkat Penguasaan IPTEK: Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan					
	Penerapan Ekonomi Hijau	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri	18.Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			a)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	69,47	89,68		
			b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	38	94,96		
	Transformasi Digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	19.Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		6	7,5		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Malaysia termasuk pada pengembangan kawasan perbatasan	20.Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi		10,46	5,7		
			21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		36	18,1		
			22.Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		33,82	35,05		
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah Metropolitan, yang terintegrasi, cerdas, hijau, dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	23.Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
			a)	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	n/a	n/a		
			b)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,24	82,79		
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
	Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	31.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		2,9	3,5		
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	32.Tingkat Inflasi (%)		2,74	2,5		
		pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon	33.Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
			a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) data BPS	45,60	66,8		
			b)	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,26	3,57*		
			c)	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten / Kota Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	n/a	n/a		
			d)	Total Kredit/PDRB (%) data BPS	27,55	62,3		
			34.Inklusi Keuangan (%)		90,4	98,86		
		35. Jumlah Kerjasama	17	21				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket
				Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5	6	7	8	9
Transformasi Tata Kelola yang adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Optimasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah	36. Persentase Penurunan Konflik SARA	n/a	n/a		
			24. Indeks Reformasi Hukum	40	90	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government)	
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,34	4,5		
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	26. Indeks Pelayanan Publik	4,35	5,00		
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi	27. Indeks Integritas Nasional	77	87		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket
				Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5	6	7	8	9
		layanan perizinan berbasis digital.					
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	28.Indeks Pembangunan Hukum (Presentase penegakan hukum peraturan Daerah)	100	100		
			29.Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	37,07	90,45		
		Penguatan integritas partai politik	30.Presentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	60-80	81		
Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang berkualitas	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus	43.Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	
			a) Ketahanan Energi				
			- Konsumsi Listrik per Kapita (KWH) konsultasi PLN	1.107	4.340		
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	n/a	n/a		
		Pengembangan diversifikasi pangan	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi	7,74	3,00		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
	3	4	5		6	7	8	9
				Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)				
		Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	c)	Ketahanan Air				
				- Kapasitas Air Baku (m3/detik) data PU dan PDAM	0,33	1,2		
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) data PDAM	39,82	100		
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		0,46	0,627	Mewujudkan Manajemen Lingkungan Hidup yang Sirkular.	
			42.Kualitas Lingkungan Hidup					
			a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,82	78,63		
			b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,98	49,58		
			c)	Pengelolaan Sampah				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Ket	
					Baseline 2025	Target 2045			
	3	4	5		6	7	8	9	
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.		-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	92,12	94,12		
				-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	85,3	92,21		
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	44.Indeks Risiko Bencana (IRB) data BPBD		144	89,82	Meningkatkan Mitigasi Bencana.		
			45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
			a)	Kumulatif	67,42	99,62			
			b)	Tahunan	24,91	58,83			

Tabel 5.3
Sasaran Pokok

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan Untuk Semua	1.Usia Harapan Hidup (UHH)	74,12	77,5	
			2.Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	55	18	
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,06	6,2	
			3.Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)			
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100	
			b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	95	
			4.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	
			5.Hasil Pembelajaran:			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			i) Literasi Membaca	-	-	
			ii) Numerasi	-	-	
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			i) Literasi Membaca	60,28-66,67	87,94	
			ii) Numerasi	49,65	70	
			c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,25-9,20	12	
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,5-13,82	15,1	
			6.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	3,41	8,21	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
			7.Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	59	75	
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	8.Tingkat Kemiskinan (%)	4,3	1,0-2,3	
			9.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25	90	
			10.Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	25	45	
		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37.Objek Pembangunan Kebudayaan (OPK)*	112	122	
			38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,78	87,41	
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65,96	70,69	
			40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,37	0,250	
2	Meningkatkan Pertumbuhan		11.Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,00-16,60	16,60-18,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
	Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	12.Pengembangan Pariwisata			
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,64	9,86	
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	9	14,4	
			13.Proporsi Investasi ekraf terhadap PDRB (ekraf yang sudah ber NIB	0,77	0,99	
			14.Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a.i Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)	1,43	4	
			a.ii Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%) / Usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil	1,99	4	
			b Rasio Kewirausahaan Daerah	19,4	21,5	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
			c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,58	3	
			d Return on Asset (ROA) BUMD (%)	4,47	5,34	
			15.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
			a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5	2,75-3,5	
			b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	n/a	n/a	
			16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49	75	
			17.Tingkat Penguasaan IPTEK: Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama			
		Penerapan Ekonomi Hijau	18.Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	69,47	89,68	
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	38	94,96	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
		Transformasi Digital	19.Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,5	
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20.Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	10,46	5,7	
			21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36	18,1	
			22.Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	33,82	35,05	
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23.Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	n/a	n/a	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,24	82,79	
		Stabilitas Ekonomi Makro	31.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,9	3,5	
			32.Tingkat Inflasi (%)	2,74	2,5	
			33.Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	45,50	66,8	
			b) Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,26	3,57*	
			c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	n/a	n/a	
			d) Total Kredit/PDRB (%)	27,55	62,3	
			34.Inklusi Keuangan (%)	90,4	98,86	
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government)	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	35. Jumlah Kerjasama	17	21	
			36. Persentase Penurunan Konflik SARA	n/a	n/a	
			24.Indeks Reformasi Hukum	40	90	
			25.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,34	4,5	
			26.Indeks Pelayanan Publik	4,35	5,00	
			27.Indeks Integritas Nasional	77	87	
		Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh,	28. Indeks Pembangunan Hukum	100	100	
			29.Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	n/a	n/a	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
		dan Demokrasi Substansial	30.Indeks Demokrasi Indonesia (Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik)	60-80	81	
4	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43.Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
			a) Ketahanan Energi			
			- Konsumsi Listrik per Kapita (KWH)	1.107	4.340	
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	n/a	n/a	
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,74	3,00	
			c) Ketahanan Air			
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,33	1,2	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,82	100	
5	Mewujudkan Manajemen		41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,46	0,627	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
	Lingkungan Hidup yang Sirkular.	Lingkungan Hidup Berkualitas	42.Kualitas Lingkungan Hidup			
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,82	78,63	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,98	49,58	
			c) Pengelolaan Sampah			
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	92,12	94,12	
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	85,3	92,21	
	Meningkatkan Mitigasi Bencana.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44.Indeks Risiko Bencana (IRB)	144	89,82	
			45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
			a) Kumulatif	67,42	99,62	
			b) Tahunan	24,91	58,83	

TABEL 5.4
Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPD 2025-2045

Indikator Utama Pembangunan		Target	
		Baseline 2025	Target 2045
1		2	3
TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1. Kesehatan Untuk Semua			
1. Usia Harapan Hidup (UHH)		74,12	77,5
2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	55	18
b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,06	6,2
3. Penanganan Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)			
a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100
b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	95
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		100	100
IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata			
5. Hasil Pembelajaran			
a)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
	i) Literasi Membaca	-	-

Indikator Utama Pembangunan		Target	
		Baseline 2025	Target 2045
1		2	3
	ii) Numerasi	-	-
b)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i) Literasi Membaca	60,28-66,67	87,94
	ii) Numerasi	49,65	70
c)	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,25-9,20	12
d)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,5-13,82	15,1
6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		3,41	8,21
7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		59	75
IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif			
8. Tingkat Kemiskinan (%)		4,3	1,0-2,3
9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		25	90
10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		25	45
TRANSFORMASI EKONOMI			

Indikator Utama Pembangunan		Target	
		Baseline 2025	Target 2045
1		2	3
IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		16,00-16,01	16,60-18,00
12. Pengembangan Pariwisata			
a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,64	9,86
b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	9	14,4
13. Proporsi Ekraf Terhadap PDRB (Ekraf yang sudah ber NIB)*		0,77	0,99
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
a-i	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)	1,43	4
a-ii	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%) / Usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil *	1,19	4
b	Rasio Kewirausahaan Daerah	19,4	21,5
c	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,58	3
d	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	2,32	10,51
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5	2,75-3,5
b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	44	90

Indikator Utama Pembangunan		Target	
		Baseline 2025	Target 2045
1		2	3
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		49	75
17. Tingkat Penguasaan IPTEK: Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama			
- Indeks Inovasi Daerah		60	80
IE5 Penerapan Ekonomi Hijau			
18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
a)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	69,47	89,68
b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	38	94,96
IE6 Transformasi Digital			
19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		6	7,5
IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
20. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi		n/a	n/a
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		36	18,1
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		33,82	35,05
IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
a)	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)		

Indikator Utama Pembangunan		Target	
		Baseline 2025	Target 2045
1		2	3
b)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,24	82,79
24. Indeks Reformasi Hukum		40	90
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,34	4,5
26. Indeks Pelayanan Publik		4,35	5,00
27. Indeks Integritas Nasional		77	87
IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansi			
28. Indeks Pembangunan Hukum *		100	100
a.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		
29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		73,07	90,45
a.	Indeks Trantibumlinmas dari Pol PP		
30. Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik		60-80	81
31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		2,9	3,5
IE11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
32. Tingkat Inflasi (%)		2,74	2,5
33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	45,60	66,8
b)	Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	-	-
c)	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten/Kota Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	n/a	n/a
d)	Total Kredit/PDRB (%)	27,55	62,3
34. Inklusi Keuangan (%)		90,4	98,86

Indikator Utama Pembangunan		Target	
		Baseline 2025	Target 2045
1		2	3
IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
35. Jumlah Kerjasama		17	21
36. Persentase Penurunan Konflik SARA		n/a	n/a
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
37. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)*		112	122
38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)*		79,78	87,41
IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif			
39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		65,95	70,69
40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,370	0,250
IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas			
41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		0,46	0,627
42. Kualitas Lingkungan Hidup			
a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,83	75,68
b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,98	49,58
c)	Pengelolaan Sampah		

Indikator Utama Pembangunan			Target	
			Baseline 2025	Target 2045
1			2	3
	-	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	92,12	94,12
	-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	76,21	92,21
IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan				
43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
a)	Ketahanan Energi			
	-	Konsumsi Listrik per Kapita (KWH)	1.107	4.340
	-	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	n/a	n/a
b)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)		7,74	3,00
c)	Ketahanan Air			
	-	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,33	1,2
	-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,82	100
IE16 Realisasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
44. Indeks Risiko Bencana (IRB)			144	89,82
45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
a)	Kumulatif		30	59,83
b)	Tahunan		30	100

5.3 Arah Kebijakan dalam Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Barat

Dalam pengembangan kewilayahan di Kalimantan Barat, Kota Singkawang masuk dalam klaster 2 yang terdiri dari Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang dengan pusat klaster berada di Kota Singkawang yang memiliki fungsi kawasan sebagai PKW. sebagai daerah pesisir, dan kondisi topografi yang beragam, klaster ini memiliki potensi pariwisata baik pantai maupun perbukitan, serta air terjun (riam) serta posisinya yang strategis, yang merupakan Gerbang Negara Indonesia, dikarenakan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Terdapat 2 PLBN pada klaster ini yaitu PLBN Aruk (Sambas) dan PLBN Jagoi Babang (Bengkayang).

Permasalahan wilayah pada klaster ini berupa banjir dan abrasi pantai. Klaster ini memiliki beberapa kawasan kota Tua Singkawang-Sambas, Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Paloh dan sekitarnya, KPPD Ledo, dan Cagar Alam Nyiut-penrinssen. Kota Singkawang sendiri memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pada sektor penyediaan akomodasi, akan tetapi kontribusinya pada PDRB masih relatif kecil, sehingga sektor tersebut berpotensi menjadi sektor unggulan di kota Singkawang. Sektor perdagangan sendiri merupakan sektor basis dan berkontribusi besar terhadap PDRB, sehingga menjadi pendorong ekonomi daerah.

Sektor industri informasi dan komunikasi, real estate dan pertanian kota Singkawang tidak mempunyai daya saing atau berkecenderungan menurun produksinya dan bukan sektor basis. Adapun beberapa highlight kebijakan wilayah pada klaster ini terdiri dari:

1. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai komoditas unggulan wilayah.
2. Pengembangan pusat-pusat industri pariwisata dan jasa, serta hilirisasi komoditas dan perikanan.
3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan.
4. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan penguatan aspek pemerintahan digital.
5. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup luasan hutan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi serta risiko bencana.
6. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman
7. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended finance
8. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar

BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi Kota Singkawang yaitu Singkawang Cemerlang 2045 (Kreatif, Maju Merata, Atraktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing) terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045 harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrument pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kota Singkawang.

6.2. Konsistensi Perencanaan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan Nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.2.1. Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang memiliki posisi menengah dalam perencanaan pembangunan Nasional, yang tertinggi adalah RPJPN dan RPJPD selanjutnya menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah.

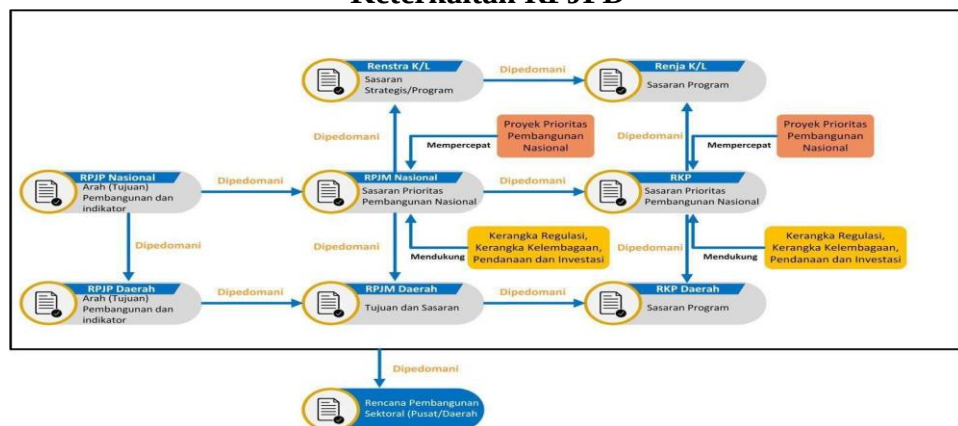
Konsistensi antara RPJPD 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

- Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD 2025-2045 dan RPJMD. Periodisasi RPJPD 2025-2045 mengikuti RPJPN, dan misi (agenda) pembangunan Kalimantan Barat serta misi (agenda) pembangunan Kota Singkawang berikut upaya transformative prioritas mempedomani muatan RPJPN 2025-2045.
- RPJPD 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Singkawang Cemerlang 2045 (Kreatif, Maju Merata, Atraktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing). Hal-hal lain yang bersifat spesifik pusat tidak dimuat di RPJPD 2025-2045, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan dimuat ke dalam RPJMD dengan memperhatikan kondisi masing-masing perangkat daerah.
- Arah (Tujuan) Pembangunan Kota Singkawang dan indikator dalam RPJPD 2025-2045 mempedomani RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Kalimantan Barat serta menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kota Singkawang dalam RPJMD.
- Sasaran dan indikator prioritas daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kota Singkawang pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

- Sasaran dan indikator strategis/program Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.
- Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kota Singkawang pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja-PD. Indikator prioritas pembangunan Kota Singkawang dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/master plan/grad strategi, peta jalan atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Kota Singkawang.
- Dokumen RPJPD 2025-2045 menjadi pedoman visi misi dan program bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang, dan anggota DPRD Kota Singkawang,

Pencapaian sasaran pembangunan Kota Singkawang juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kota Singkawang juga ditentukan proyek prioritas pembangunan Kota Singkawang pada RPJMD dan RKPD. Proyek prioritas pembangunan Kota Singkawang tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kota Singkawang.

Gambar 6.1.
Keterkaitan RPJPD



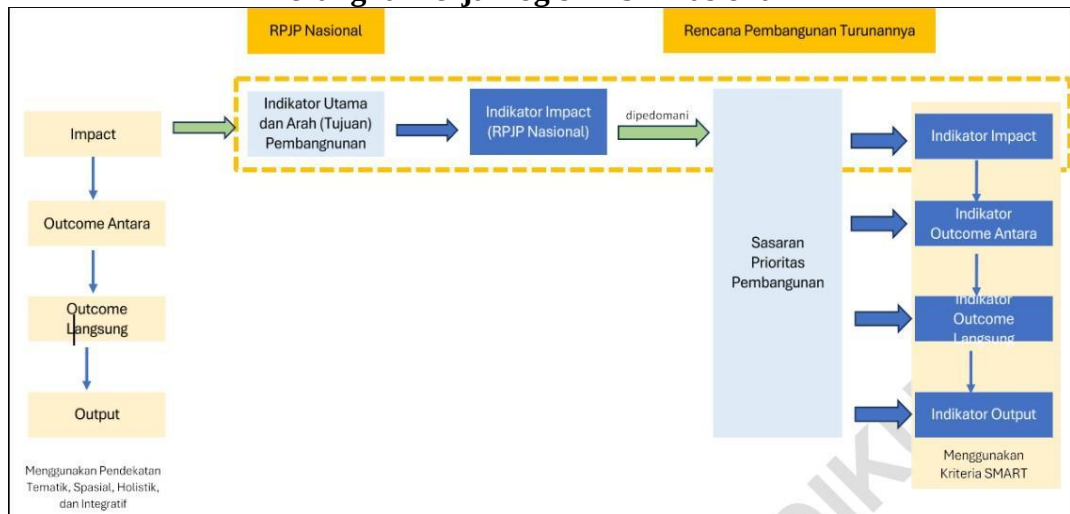
6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif sebagai berikut:

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (Kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan input-proses-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah.

Gambar 6.2
Kerangka Kerja Logis RPJP Nasional



Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2023, (diolah)

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi Indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant dan Time-Bound (SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembagunan Nasional Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota. Dalam memastikan kesinambungan pembagunan seluruh indikator RPJPD 2025-2045 harus menjadi bagian dari RPJMD dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra-PD.

6.2.3. Kerangka Pengendalian → Termasuk Manajemen Risiko

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan di dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di daerah dan di instansi masing-masing. Dengan pemikiran maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan dilaksanakan pengendaliannya melalui pengendalian terhadap dokumen jangka menengah dan dokumen jangka pendek. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan

risiko-risiko yang akan terjadi dalam upaya mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintah daerah tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJPN). Tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan atau operasional dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang serta mendukung pencapaian pembangunan Nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti kerangka pengendalian RPJPD 2025-2045 mengacu pada pengendalian RPJP nasional 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana gambar berikut.

Gambar 6.3
Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045



Pengendalian RPJPD mengacu RPJP nasional dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali kota). Berdasarkan tahapan pelaksanaannya ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi 2 bagian.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah;
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan;
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah;
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku serta diharapkan dapat mewujudkan Kota Singkawang yang CEMERLANG sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2025-2045.

6.3. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kota Singkawang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang

mencakup:

1. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: Penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*Delivery Mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendekatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
2. Perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling mendukung kerja sama ekonomi lainnya;
3. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju menu model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik , utilitas dan infrastruktur sosial;
4. Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar gulling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas dan kebijakan disuatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui:

1. Pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrument di pasar modal, dan Sovereign Wealth Fund);
2. Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa jual beli dan bagi hasil;
3. Inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular;
4. Produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya;
5. serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan Nasional.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakans secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup;

1. Penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah;
2. Penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik;
3. Penyelarasan prioritas investasi publik skala Nasional dan daerah;
4. Modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik;
5. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik;
6. Penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan
7. Penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

6.4. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang merupakan pedoman di dalam penyelenggaraan pembagunan daerah pada Tahun 2025-2045. RPJPD ini merupakan pedoman bagi calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD lima tahun.

RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan RTRW Kota Singkawang, RPJMD Kota Singkawang, RKPD Kota Singkawang, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya di Kota Singkawang;
2. Menjamin terwujudnya intergrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta Nasional;

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembaguan daerah dalam mewujudkan visi : **“SINGKAWANG CEMERLANG 2045 (Kreatif, Maju Merata, Atraktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing)”** perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
3. Keberpihakan kepada rakyat; dan
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif di Kota Singkawang.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



G.K. SARI TANGKAU, S.H., MH.

NIP 19851027 201001 2 016